



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Jl. Pattimura No. 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Telepon (021) 7397727 / 7264064

NOTA DINAS NOMOR KU0503/B/RS/2026/15

Yth. : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Hal : Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Nomor 305/ND/Pk/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Penyampaian Batas Waktu Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025, bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum,

Reni Ahiantini

Tembusan:
Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

KARTU KENDALI SURAT KELUAR				
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM				
PERIHAL :				
Penyampaian Laporan Kinerja				
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA. 2025				
KONSEP				
No	Keterangan	Nama/Jabatan	Penerima Naskah	Paraf/Tgl
1	Konseptor	Puteri Rizqi Amelia/Perencana Ahli Pertama		
		Bayu Kusuma DCS / Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan / JF Analisis Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
2	Pemeriksa	Desy Nina Wulandari / Kepala Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan		
3	Disetujui Oleh	Reni Ahiantini / Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		
Catatan				Tanggal
Penyerahan ke Dirjen PI		Penerima :		



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM

TAHUN
ANGGARAN
2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja disusun sesuai amanat: i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; ii) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; iii) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; iv) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan v) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan serta menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai mengenai pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Laporan Kinerja dapat berperan sebagai alat penilaian kinerja dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu laporan kinerja merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak karena keberhasilan yang diraih atas berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh pegawai. Sebagai salah satu pertanggungjawaban kinerja, kami berharap Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi sarana untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Jakarta, 15 Januari 2026
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum



Reni Ahiantini



RENI AHANTINI

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
EXECUTIVE SUMMARY	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	1
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	2
1.3.1. Struktur Organisasi	2
1.3.2. Sumber Daya Manusia	3
1.3.2.1. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis	3
1.3.2.2. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan	4
1.3.2.3. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia	6
1.3.2.4. Pengembangan Kompetensi SDM	7
1.4. Sarana dan Prasarana	8
1.4.1. Sarana dan Prasarana Fisik	8
1.4.2. Teknologi Informasi	10
1.5. Isu Strategis	11
1.6. Sistematika Laporan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis.....	13
2.1.1. Visi dan Misi.....	13
2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi	13
2.1.3. Program dan Kebijakan	15
2.2 Perjanjian Kinerja.....	15
2.2.1. Perjanjian Kinerja Awal	15
2.2.2. Perjanjian Kinerja Revisi ke-1	16
2.2.3. Perjanjian Kinerja Revisi ke-2	18
2.2.4. Perjanjian Kinerja Revisi ke-3	19
2.2.5. Kronologis Perubahan Perjanjian Kinerja	20
2.3 Metode Pengukuran	23
2.4 Target Kinerja Tahun Pelaporan Dalam Pemenuhan Target Rencana Strategis	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	27
3.2. Capaian Kinerja.....	30
3.3. Analisis Perbandingan Kinerja	33
3.3.1. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir	33
3.3.2. Perbandingan Kinerja dengan dengan Target Jangka Menengah.....	34
3.3.3. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (<i>Benchmarking</i>).	36
3.4. Analisis Realisasi Anggaran	37
3.4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	37

3.4.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025	39
3.4.3. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	43
3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
BAB IV PENUTUP	47
4.1. Simpulan Umum.....	47
4.2. Faktor Pendukung Keberhasilan	48
4.3. Permasalahan.....	51
4.4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	52
LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 Dokumen Perjanjian Kinerja	
LAMPIRAN 2 Bukti Dukung Capaian Kinerja	
LAMPIRAN 3 Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja	
LAMPIRAN 4 Penghargaan Dari Pihak Luar	
LAMPIRAN 5 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Berdasarkan Jabatan Fungsional	6
Tabel 1.2	Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025	8
Tabel 1.3	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana.....	8
Tabel 2.1	Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	22
Tabel 2.2	Metode Perhitungan Kinerja	23
Tabel 2.3	Target Berdasarkan Rencana Strategis	24
Tabel 2.4	Sandingan Target Kinerja dan Rencana Strategis	26
Tabel 3.1	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi AKIP.....	29
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Target Rencana Strategis Dan Target Perjanjian Kinerja	31
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	33
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.....	34
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Output Tahun 2025 berdasarkan Target Rencana Strategis.....	34
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025 dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2024	36
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Tahun 2025 per KRO dan RO	42
Tabel 3.8	Perbedaan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024	44
Tabel 3.9	Sumber Daya dan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	44
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025.....	45
Tabel 3.11	Perbandingan Nilai Efisiensi tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya ..	46
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Tahun 2025	47
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja	48
Tabel 4.3	Realisasi Anggaran per KRO.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025	3
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	3
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis dan Jenis Kelamin Per Unit Bagian	4
Gambar 1.4	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	4
Gambar 1.5	Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	5
Gambar 1.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Gambar 1.7	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin	7
Gambar 1.8	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	7
Gambar 1.9	Dokumentasi Sarana dan Prasarana	10
Gambar 2.1	Struktur Program Sekretariat Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029	14
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025	16
Gambar 2.3	Perjanjian Kinerja Revisi Ke-1 Tahun 2025	17
Gambar 2.4	Perjanjian Kinerja Revisi Ke-2 Tahun 2025	18
Gambar 2.5	Perjanjian Kinerja Revisi Ke-3 Tahun 2025	20
Gambar 2.6	Kronologi Revisi Perjanjian Kinerja	21
Gambar 3.1	Tren Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.....	27
Gambar 3.2	Nilai Setiap Komponen dari Tahun 2020-2024	28
Gambar 3.3	Nilai Setiap Komponen terhadap Nilai Maksimal Penilaian AKIP Tahun 2024	28
Gambar 3.4	Kronologi Anggaran	37
Gambar 3.5	Proporsi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	39
Gambar 3.6	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	39
Gambar 3.7	Kurva S Realisasi Keuangan Tahun 2025.....	40
Gambar 3.8	Kurva S Realisasi Fisik Tahun 2025.....	40
Gambar 4.1	Halaman Depan Aplikasi E-JFAPI	49
Gambar 4.2	Halaman Depan Aplikasi SIDIA-DJPI	49
Gambar 4.3	Halaman Depan Aplikasi DIMonev DJPI	50
Gambar 4.4	Halaman Depan Aplikasi POSESIP	50
Gambar 4.5	Surveillance SMAP	50
Gambar 4.6	Penghargaan Pentaan Arsip Terbaik.....	51

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama 1 tahun atas target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 (sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja ke-3 pada 24 Desember 2025) dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dinilai dari 1 indikator kinerja kegiatan (IKK). Selama tahun 2025, terjadi 3 kali revisi perjanjian kinerja dan 7 kali Revisi DIPA. Adapun capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel Capaian Kinerja berdasarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan/IKK	Jenis Indikator/Komposit	Bobot	Target	Capaian	Kinerja
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI) (7764 Kegiatan 1. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum)					
IKK.1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)		100%	84,72%	93,21%	110,02%
	1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	10,00%	77,05	73,00	94,74%
	2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	3. Tingkat Layanan Hukum	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	4. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	5. Nilai layanan keuangan	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP	10,00%	88,01%	100,00%	113,62%
	7. Nilai SAKIP	10,00%	77,42	87,65	113,21%
	8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	9. Transformasi Digital Unit Kerja	10,00%	24,76	78,79	318,21%
	10. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	10,00%	80,01	92,69	115,85%

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025 sebesar 93,21%. Capaian dan realisasi kinerja tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025. Mendukung pencapaian kinerja tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum didukung oleh sumber daya yang terdiri dari anggaran, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025 sebesar Rp66.875.168.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp75.602.833.000,00 atau sebesar 88,48% terhadap pagu DIPA dan 90,76% terhadap pagu efektif. Terdapat pula anggaran sebesar Rp1.902.842.000,00 yang di blokir. Adapun realisasi ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2025

(Status iemonitoring PUPR tanggal 9 Januari 2026)

(status pemantauan) Periode tanggal 1 Januari 2020

Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Blokir	Realisasi	Keuangan (%)			Fisik (%)		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL DIPA	RL Efektif	RN	RL	Kinerja
Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)			78.125.339	1.902.842	68.380.950	100	87,53	90,76	100	100	100
Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan/ Laporan /Dokumen	71.323.118	1.669.797	62.884.331	100	88,17	90,28	100	100	100
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	93	Unit/m2/ Paket	2.806.627	0	2.803.292	100	99,88	99,88	100	100	100
Layanan Manajemen SDM Internal	272	Orang/ Layanan	318.428	114.350	196.889	100	61,83	96,48	100	100	100
Layanan Manajemen Kinerja Internal	8	Layanan/ Laporan /Dokumen	1.134.580	118.695	990.657	100	87,31	97,52	100	100	100

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum didukung oleh 124 pegawai yang terdiri dari :

1. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebanyak 1 orang;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU sebanyak 1 orang;
3. Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan sebanyak 36 orang;
4. Bagian Kepegawaian dan Umum sebanyak 64 orang; dan
5. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik sebanyak 22 orang.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menghadapi beberapa isu dan kendala. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan adalah :

1. Melakukan dan terus meningkatkan fungsi pelayanan dengan baik;
2. Menerapkan budaya dialog kinerja antara pimpinan dan staf/pegawai sebagai wujud komunikasi dan komitmen terhadap pengelolaan kinerja dan kegiatan guna mencapai output sesuai dengan rencana;
3. Koordinasi dengan satuan kerja, unit kerja, unit organisasi dan/atau kementerian/Lembaga lainnya dalam memaksimalkan pencapaian kinerja;
4. Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada SE No 3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pola Kerja Baru Dalam Rangka Efisiensi Belanja di Kementerian PU;
5. Penyusunan profil risiko disusun mengacu pada kejadian di tahun 2024 dengan penyesuaian di tahun 2025;
6. Meningkatkan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kualitas kinerja dan efisiensi organisasi;
7. Review dan revisi dokumen perencanaan (Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja) sesuai dengan perubahan dan dinamika selama tahun berjalan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
8. Memaksimalkan penyelesaian dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
9. Merencanakan pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya sebaik mungkin dengan mengacu pada pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun berjalan/sebelumnya;
10. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun untuk meminimalisir adanya revisi selama pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum mengamanatkan bahwa kementerian/ Lembaga bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja melalui pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan capaian pada Laporan Kinerja. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum perlu melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja sebagai amanat dalam perundang-undangan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja Tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan serta tugas dan fungsi sesuai tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Rakyat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum terhadap jumlah anggaran yang dimanfaatkan. Selain itu, Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dan penyampaian gambaran permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi masukan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum maupun Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki tugas berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum berupa:

“Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal”

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum melakukan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum;
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan pembinaan perbendaharaan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran serta keuangan;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah di Direktorat Jenderal;
- e. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
- f. Pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai dan jabatan fungsional;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal;
- j. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- k. Pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum; dan
- l. Pelaksanaan urusan komunikasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1. Struktur Organisasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan dibantu oleh tiga Kepala Bagian yang saling mendukung dalam melaksanakan amanat tugas dan fungsi organisasi. Adapun struktur organisasi beserta tugas dan fungsi pada setiap bagian sebagai berikut:

Bagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan;

Tugas : Bagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja anggaran, urusan administrasi keuangan dan pembinaan perbendaharaan, koordinasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan keuangan, serta koordinasi penerapan dan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah.

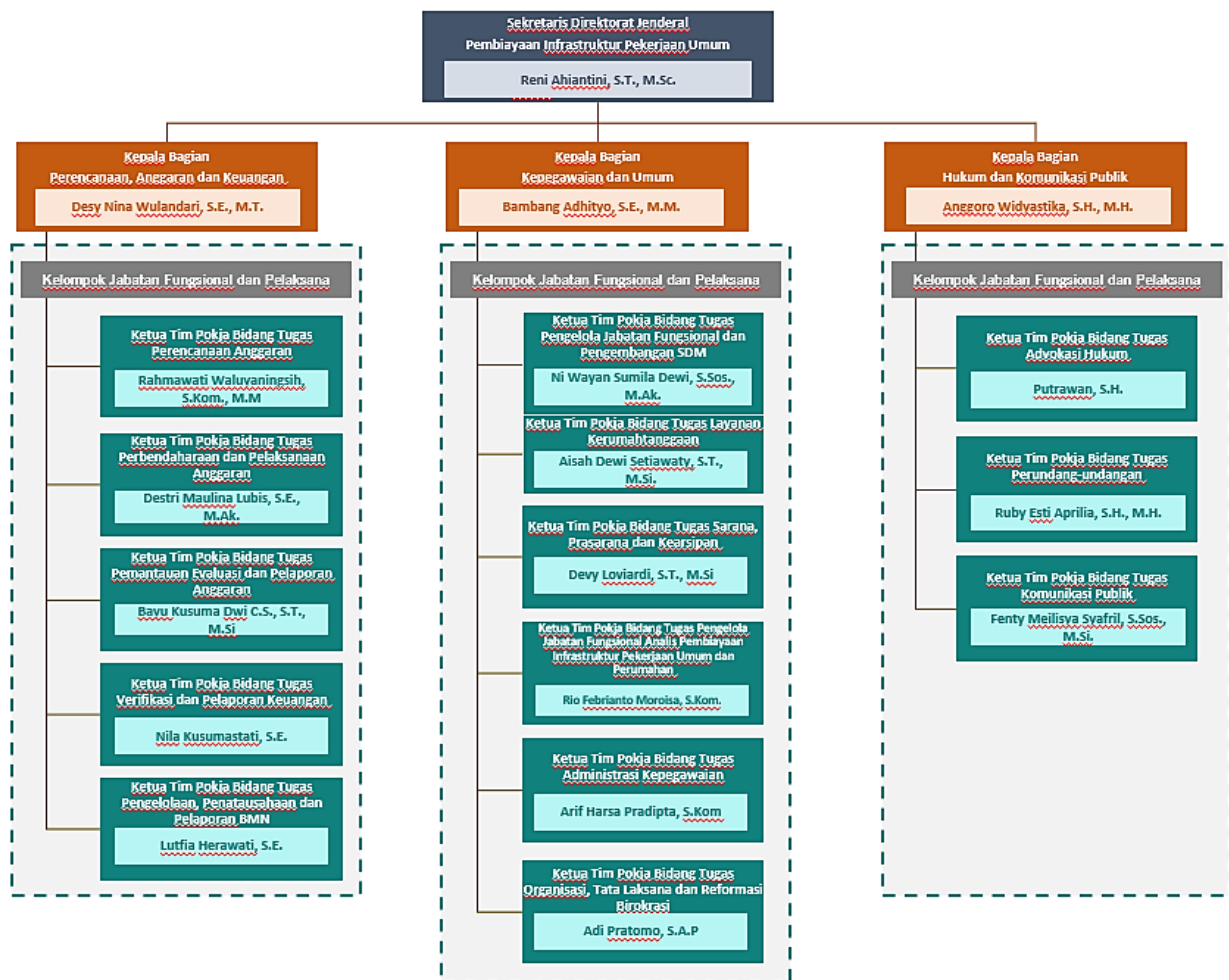
Bagian Kepegawaian dan Umum;

Tugas : Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, pengelolaan pengembangan pegawai, pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, fasilitasi reformasi birokrasi, urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Tugas : Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama, urusan komunikasi publik dan pengelolaan pengaduan Masyarakat di bidang pelaksanaan Pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.

Susunan organisasi pada setiap bagian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025
Sumber : Olah Data Pegawai Bulan Desember, 2025

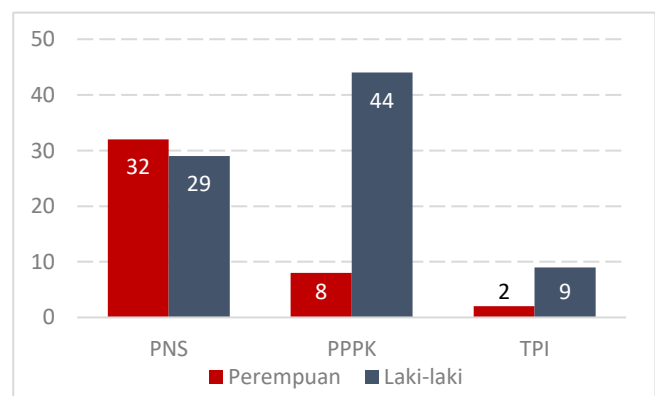
1.3.2. Sumber Daya Manusia

1.3.2.1. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki sumber daya manusia total sebanyak 124 orang termasuk didalamnya Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Adapun pegawai yang terdapat di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum ditampilkan pada Gambar 1.2.

Rincian pegawai (Lampiran 1) pada setiap bagian sebagai berikut:

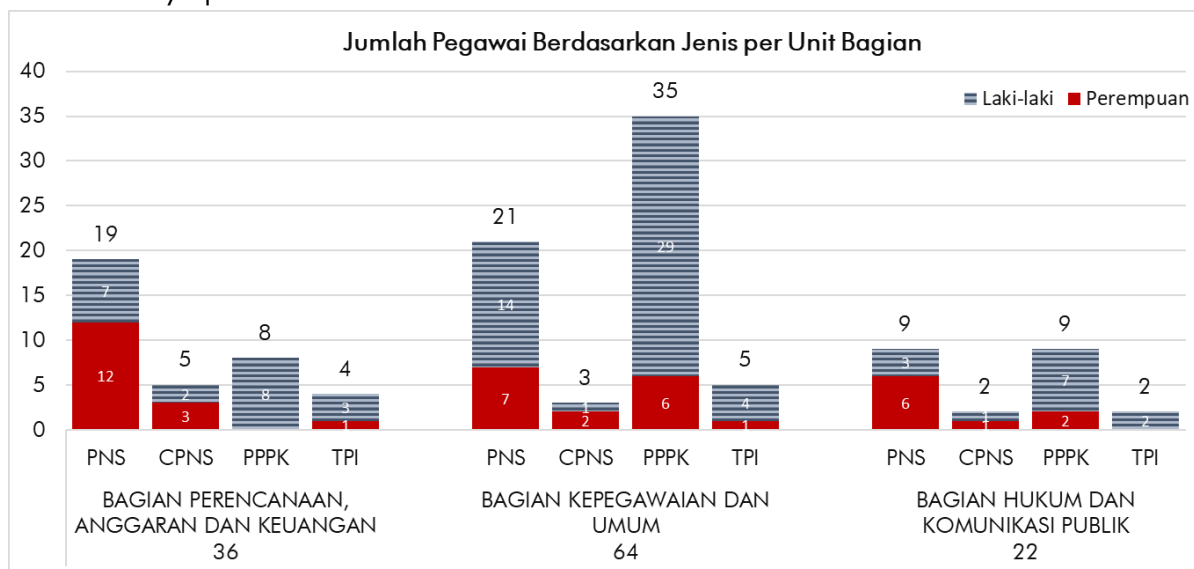
1. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebanyak 1 orang;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebanyak 1 orang;
3. Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan sebanyak 36 orang;
4. Bagian Kepegawaian dan Umum sebanyak 64 orang; dan



Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber : Data Pegawai Bulan Desember, 2025

5. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik sebanyak 22 orang.

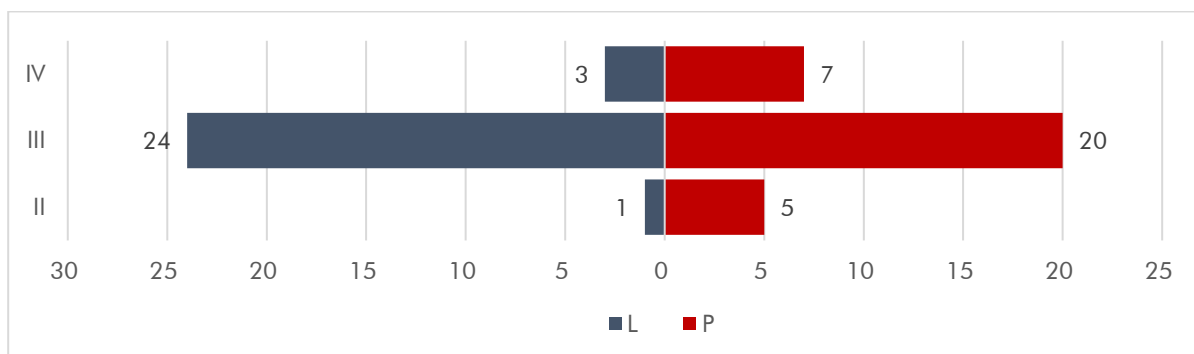
Berdasarkan gambar 1.2, total pegawai PNS sebanyak 61 orang, PPPK sebanyak 52 orang, dan Tenaga Pendukung Individu (TPI) sebanyak 11 orang. Jumlah pegawai untuk mendukung tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025 idealnya didukung oleh 181 ASN. Dengan jumlah ASN yang ada saat ini, masih terdapat kebutuhan ASN sebanyak 57 pegawai yang belum dapat dipenuhi sehingga gap antara kebutuhan dan kondisi pegawai saat ini, dipenuhi melalui pengadaan Tenaga Pendukung Individu (TPI). Pemenuhan kebutuhan pegawai ASN mengalami peningkatan jumlah di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dengan bertambahnya jumlah PNS melalui CPNS dan PPPK di tahun 2025.



Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis dan Jenis Kelamin per Unit Bagian
Sumber : Data Pegawai Bulan Desember, 2025

1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

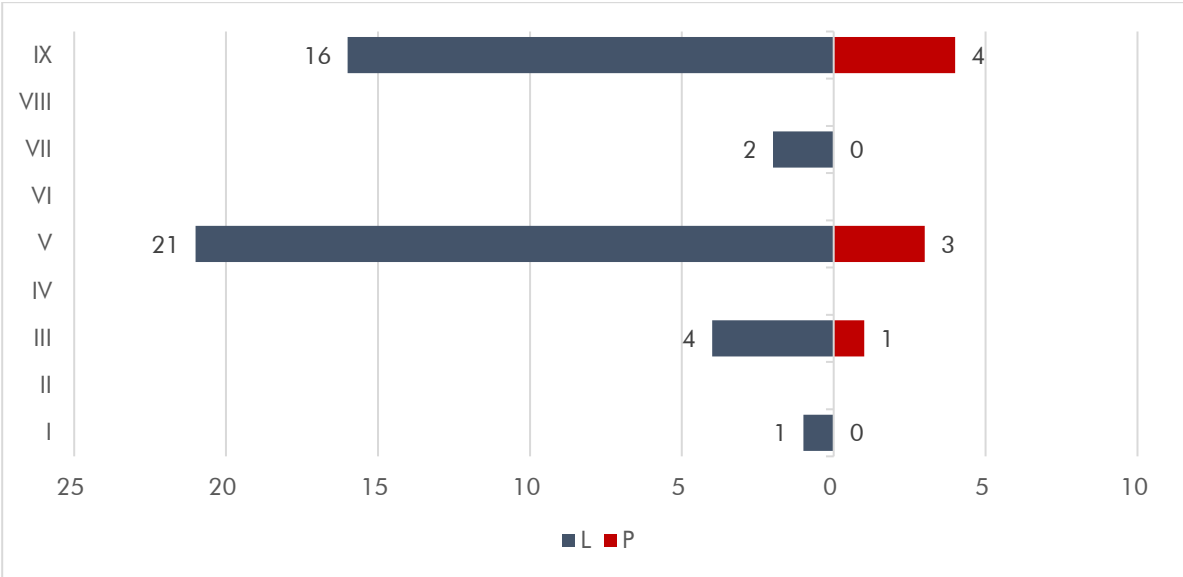
Pegawai PNS dan PPPK di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari Eselon I, II, III, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum. Golongan pegawai berdasarkan PNS dan PPPK berbeda, sehingga jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin ditampilkan pada Gambar 1.4. dan Gambar 1.5.



Gambar 1.4
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Sumber : Data Pegawai Bulan Desember, 2025

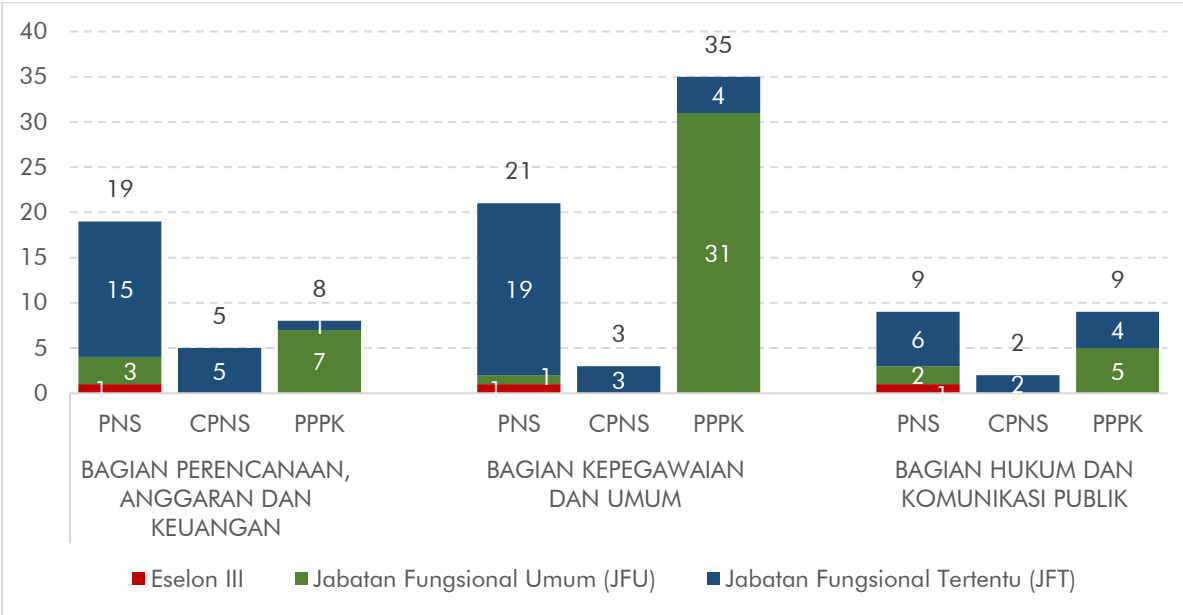
Tidak terdapat PNS dengan Golongan I di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Hanya terdapat 6 pegawai pada Golongan II. Dominasi pegawai di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan

Umum pada Golongan III. Sedangkan pegawai Golongan IV sebanyak 10 orang. Sedangkan sebaran pegawai PPPK berdasarkan golongan ditampilkan pada Gambar 1.5. berikut.



Gambar 1.5
Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Sumber : Data Pegawai Bulan Desember, 2025

Berdasarkan pada gambar 1.5, terdapat 9 golongan untuk pegawai PPPK. Pegawai PPPK di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tidak terdapat di Golongan II, IV, VI dan VIII. Jumlah pegawai terbanyak pada Golongan V sebanyak 24 orang dan Golongan IX sebanyak 20 orang. Dari keseluruhan pegawai PNS, CPNS, dan PPPK menduduki jabatan tertentu yang ditampilkan pada Gambar 1.6. berikut.



Gambar 1.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Sumber : Data Pegawai Bulan Desember, 2025

Jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum paling banyak menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sejumlah 59 pegawai dan sebanyak 49 pegawai menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU). Adapun jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu ditampilkan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

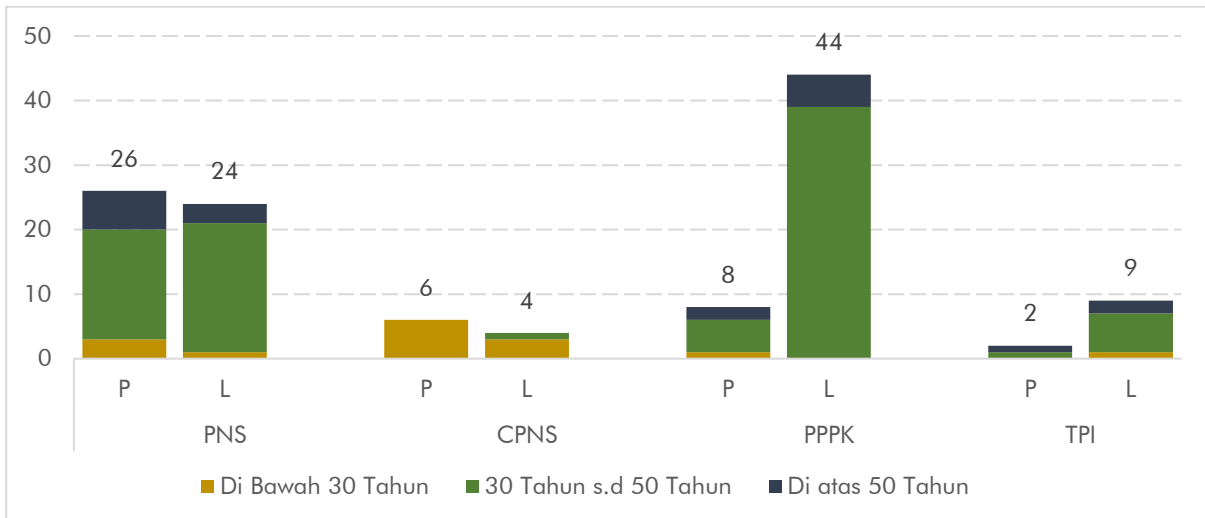
No	Jabatan Fungsional	Madya	Muda	Pertama	Penyelia	Mahir	Terampil	Jumlah
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)		5	22	30	0	0	4	60
1	Analisis Anggaran	1	1	-	-	-	-	2
2	Analisis Hukum	-	2	2	-	-	-	4
3	Analisis Kebijakan	-	-	3	-	-	-	3
4	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	6	7	-	-	-	14
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	-	4	2	-	-	2	8
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	3	3	-	-	-	7
7	Arsiparis	-	3	2	-	-	1	6
8	Penata Kelola Jalan dan Jembatan	1	-	-	-	-	-	1
9	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	1	-	-	-	-	-	1
10	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	-	1	-	-	-	-	1
11	Perencana	-	-	1	-	-	-	1
12	Pranata Hubungan Masyarakat	-	2	5	-	-	-	7
13	Pranata Komputer	-	-	5	-	-	-	5
Jabatan Fungsional Umum (JFU)		48						48
14	Analisis Advokasi Hukum	1						1
15	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1						1
16	Penata Layanan Operasional	11						11
17	Pengadministrasi Perkantoran	8						8
18	Pengelola Keuangan	3						3
19	Pengelola Layanan Operasional	2						2
20	Pengelola Umum Operasional	6						6
21	Operator Layanan Operasional	16						0
Karyasiswa		1						1
22	Karyasiswa Master	1						1
	Jumlah							109

Sumber : Data Pelatihan Pegawai Bulan Desember, 2025

Berdasarkan tabel 1.1, jabatan fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan yang paling besar jumlahnya dengan jumlah 14 orang di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan belum terdapat jabatan fungsional tertentu tingkat penyelia dan mahir. Pada tahun 2025, terdapat 1 pegawai yang sedang melakukan karyasiswa (sekolah) yaitu Fikri Nuru Jaman, S.E. Selain karyasiswa, terdapat 1 pegawai yang sedang ditugaskan di BP Tapera yaitu Siska Purnianti, S.H., M.Hum selama 5 tahun sejak 1 April 2022.

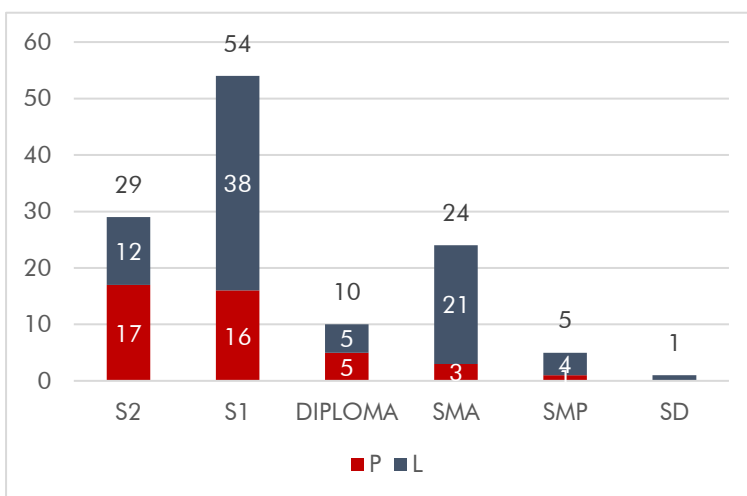
1.3.2.3. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dikelompokkan menjadi usia dibawah 30 tahun, 30 tahun sampai dengan 50 tahun dan diatas 50 tahun. Adapun pengelompokan pegawai berdasarkan usia ditampilkan pada Gambar 1.7. berikut.



Gambar 1.7
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin
Sumber : Data Pegawai Bulan Desember, 2025

Berdasarkan gambar 1.7, pegawai pada kelompok usia 30 tahun sampai dengan usia 50 tahun yang mendominasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025. Sedangkan pegawai dengan usia dibawah 30 tahun didominasi oleh CPNS. Secara total, sebanyak 15 orang pegawai berusia dibawah 30 tahun, 89 orang pegawai berusia antara 30 sampai dengan 50 tahun, dan 19 orang pegawai berusia dibawah 50 tahun. Selain usia, berikut jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.



Gambar 1.8
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Sumber : Data Pegawai Bulan Desember, 2025

Gambar 1.8 menggambarkan mayoritas pegawai didominasi pendidikan S1 sebanyak 54 pegawai, kemudian 29 pegawai dengan pendidikan S2 dan 24 pegawai dengan pendidikan SMA. Terdapat 1 orang pegawai dengan pendidikan SD dan 5 orang pegawai dengan pendidikan SMP. Untuk meningkatkan kualitas pegawai dilakukan pengembangan pegawai dengan memberikan kesempatan pelatihan dan pendidikan.

1.3.2.4 Pengembangan Kompetensi SDM

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mendukung penuh pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau pendidikan. Saat ini terdapat 1 orang pegawai yang sedang menempuh pendidikan master (Karyasiswa). Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan dan kesempatan pengembangan kapasitas SDM.

Kualitas sebuah organisasi dapat dipengaruhi dari kualitas pegawainya. Kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai terus dilaksanakan baik dari internal maupun

eksternal Kementerian Pekerjaan Umum. Pengembangan kompetensi ini dapat berupa peningkatan kapasitas organisasi secara keseluruhan maupun per individu. Pada tahun 2025, terdapat 65 pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, manajerial dan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum maupun yang diselenggarakan selain Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun pegawai yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan ditampilkan pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025

Jenis Pelatihan / Pendidikan	2025
Pelatihan Kepemimpinan	7
Pelatihan Bidang PUPR	27
Pelatihan Bidang Umum dan Manajemen	29
Pelatihan Jabatan Fungsional	1
Karyasiswa	1
TOTAL	65

Sumber : Data Pelatihan Pegawai Bulan Desember, 2025

1.4. Sarana dan Prasarana

1.4.1. Sarana dan Prasarana Fisik

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, dibutuhkan sarana dan prasarana sebagai alat pendukung untuk mencapai output dan outcome organisasi. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menempati ruangan kerja yang terletak di Gedung G lantai 5, lantai 7 dan lantai 8. Adapun rekap sarana dan prasarana di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum ditampilkan pada Tabel 1.3 berikut.

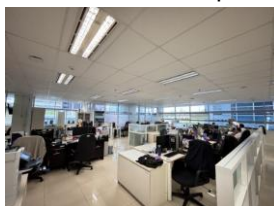
Tabel 1.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana

No	Nama BMN	Jumlah Total (Unit)	Kondisi		
			Baik	Cukup Baik	Rusak
1	A.C. Split	27	25	2	0
2	Access Control System	4	2	0	2
3	Access Point	6	6	0	0
4	Air Cleaner	10	10	0	0
5	Alat Dapur Lainnya (Cooker Hood Portable)	1	1	0	0
6	Alat Musik Modern/Band	1	1	0	0
7	Alat Penghancur Kertas	20	14	1	5
8	Alat Studio Lainnya	2	2	0	0
9	Camera Conference	13	8	3	2
10	Camera Digital	14	10	4	0
11	Camera Video	2	1	0	1
12	CCTV	39	9	8	22
13	Digital Multimeter	1	1	0	0
14	Dispenser	4	4	0	0
15	Drone	6	5	0	1
16	Filing Cabinet Besi	27	20	0	7
17	Finger Print Attendance System	6	6	0	0
18	Focusing Screen / Layar LCD	4	4	0	0
19	Gedung dan Bangunan (Renovasi)	6	6	0	0

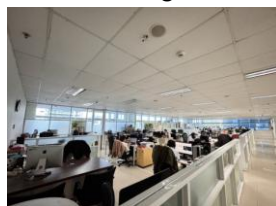
No	Nama BMN	Jumlah Total (Unit)	Kondisi		
			Baik	Cukup Baik	Rusak
20	Handy Talky (HT)	16	16	0	0
21	Hard Disk	14	14	0	0
22	Heater	2	2	0	0
23	Karpet	4	0	4	0
24	Kitchen Set	1	0	0	1
25	Kursi Besi/Metal	382	311	29	42
26	Kursi Fiber/Plastik	50	42	3	5
27	Kursi Kayu	22	22	0	0
28	Laptop	8	8	0	0
29	LCD Projector / Infocus	16	13	1	2
30	Lemari Besi/Metal	26	24	2	0
31	Lemari Es	8	7	1	0
32	Lemari Kayu	5	3	1	1
33	Locker	2	0	2	0
34	Meja Kerja Kayu	101	101	0	0
35	Meja Rapat	26	25	1	0
36	Meja Resepsionis	16	15	1	0
37	Mesin Cuci	1	1	0	0
38	Notebook	92	78	9	5
39	PC Unit	183	151	19	13
40	Printer	47	39	4	4
41	Pintu Elektrik	4	0	0	4
42	Video Conference	1	0	1	0
43	Voice Recorder	2	2	0	0
44	White Board	4	4	0	0
45	Wireless Access Point	16	16	0	0
TOTAL		1.281	1.074	110	97

Sumber : Daftar Barang Ruangan, Desember 2025

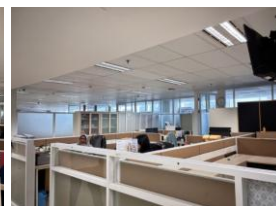
Berdasarkan tabel 1.3, total sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebanyak 1.281 unit. Adapun beberapa dokumentasi sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebagai berikut.



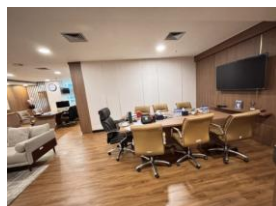
Ruang Kerja Lantai 5



Ruang Kerja Lantai 8



Ruang Kerja Dirjen PI (Lantai 8)



Ruang Kerja Sesditjen PI (Lantai 7)





Ruang Rapat Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Lantai 7)



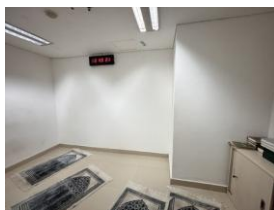
Ruang Rapat Bersama BPAK dan BHKP (Lantai 5)



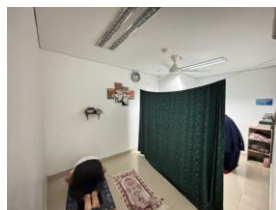
Ruang Rapat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Lantai 8)



Ruang Laktasi (Lantai 8 dan Lantai 6)



Musholla



Toilet



Pantry



Ruang Kerja Satker (Lantai 7)



Ruang Creative



Lobby



Gambar 1.9
Dokumentasi Sarana dan Prasarana
Sumber : Dokumentasi Tim, 2025

Selain dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, terdapat pula sarana dan prasarana bersama yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung pencapaian output dan outcome seperti Lift gedung, ruang parkir, dan AC Sentral.

1.4.2. Teknologi Informasi

Berkembangnya dan manfaat dari penggunaan teknologi dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output dan outcome yang dicapai menjadikan teknologi dan informasi salah satu pendukung penting dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun teknologi dan informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan basis data. Perangkat keras yang mendukung dapat berupa PC Unit, tablet PC, laptop, ataupun notebook. Sedangkan perangkat lunak merupakan aplikasi dan server yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Jaringan internet yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan jaringan yang disediakan oleh Pusdatin, Sekretariat Jenderal. Selain itu, adapula penambahan *backup* jaringan untuk mengakomodir kebutuhan pimpinan. Untuk hal ini dibutuhkan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp184.520.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 98,86% (Rp182.415.484,00). Selain anggaran untuk jaringan, terdapat pula anggaran untuk belanja hardware seperti PC Unit dan laptop untuk CPNS yang termasuk dalam Belanja Modal (RO Layanan Sarana dan Prasarana).

1.5. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2025, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi kendala dan/atau meningkatkan capaian dalam kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Adapun beberapa isu strategis yang terjadi selama tahun 2025 sebagai berikut:

1. Rencana Strategis
 - Penyusunan Renstra Setditjen PI 2025–2029 perlu penyesuaian dengan Renstra DJPI 2025–2029; dan
 - Penambahan RO baru (IR dan SAKIP) pada matriks pendanaan yang dicantumkan dalam Renstra.
2. Pelaksanaan Anggaran

Blokir anggaran memberikan dampak pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran efektif.
3. Capaian Kinerja Organisasi

Penyesuaian perhitungan capaian kinerja berdasarkan rencana strategis 2025–2029 pasca terbit di Triwulan IV Tahun 2025.
4. Tata Laksana

Penyusunan peta lintas fungsi masih belum final dikarenakan terdapat simplifikasi dan penyesuaian pada proses dan masih adanya proses perubahan peraturan.
5. Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 - Penyelesaian standar kompetensi JF Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di tahun 2025 melebihi waktu yang direncanakan dan berdampak pada pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - Belum dapat dilaksanakannya uji kompetensi di tahun 2025 sehingga pelaksanaan uji kompetensi baru dapat dilaksanakan pada tahun 2026. Strategi akhir tahun 2025 disesuaikan menjadi persiapan pelaksanaan uji kompetensi di awal tahun 2026.
6. Pengelolaan Barang Milik Negara

Proses alih status Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum masih berlanjut ke tahun 2026 dikarenakan terdapat pemenuhan dokumen yang masih harus dilengkapi.
7. Manajemen Risiko
 - Keterlambatan dalam penyusunan profil risiko baik di tingkat UPR T2 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan UPR T1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dikarenakan Rencana Strategis baru terbit di Triwulan IV 2025.
 - Kendala pada Portal SIMR (Sistem Informasi Manajemen Risiko) yang dikelola oleh Biro Keuangan.

8. Penyelesaian Temuan LHP BPK RI
Seluruh temuan sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, namun beberapa rekomendasi masih dalam penelaahan BPK RI.
9. Kinerja Pegawai
 - Penyusunan dan penilaian kinerja pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 tidak sesuai dengan jadwal (penyusunan di awal tahun dan penilaian per triwulan) dikarenakan dokumen Rencana Strategis baru terbit di Triwulan IV Tahun 2025. Hal ini berpengaruh pada penyusunan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; dan
 - Penyesuaian Perjanjian Kinerja yang digunakan dalam penyusunan SKP Tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum.
10. Pelaksanaan Dokumentasi dan Penyebaran Informasi
Penyesuaian dalam pelaksanaan dokumentasi pimpinan dengan efisiensi anggaran melalui pembiayaan bersama.
11. Produk Hukum
 - Diperlukan penyesuaian terhadap produk hukum mengingat adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum;
 - Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; dan
 - Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha.

1.6. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, isu strategis dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan secara singkat terkait Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, metode pengukuran, dan target kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab III, dijelaskan terkait upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, capaian kinerja tahun anggaran 2025, analisis perbandingan kinerja (yang terdiri dari perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah, dan perbandingan realisasi capaian kinerja dengan standar nasional (benchmarking)), analisis realisasi anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan terkait simpulan umum, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan, rekomendasi dan tindak lanjut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mendukung Sasaran Program Dukungan Manajemen Kementerian Pekerjaan. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Nomor 75/KPTS/Dp/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025-2029 tanggal 24 Desember 2025. Adapun tujuan dan sasaran kegiatan disampaikan sebagai berikut.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kementerian Pekerjaan Umum yakni **"Terwujudnya Indonesia Maju dalam mendukung Fondasi Indonesia Emas 2045 melalui penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkelanjutan"**. Visi besar ini diterjemahkan ke dalam Sasaran Utama PU 608, meliputi Efisiensi Investasi (ICOR < 6), Pengentasan Kemiskinan (menuju 0%), dan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (mencapai 8%). Guna mendukung visi tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki tugas:

"Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal"

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menetapkan tujuan untuk periode 2025-2029 yaitu:

"Mendukung tercapainya Peningkatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum"

Tugas dan tujuan ini mendukung pencapaian visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Kementerian Pekerjaan Umum.

2.1.2 Arah Kebijakan Dan Strategi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mendukung Sasaran Strategis (SS-6) Kementerian Pekerjaan Umum dan Sasaran Program yakni :

"Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Tugas Teknis Lainnya".

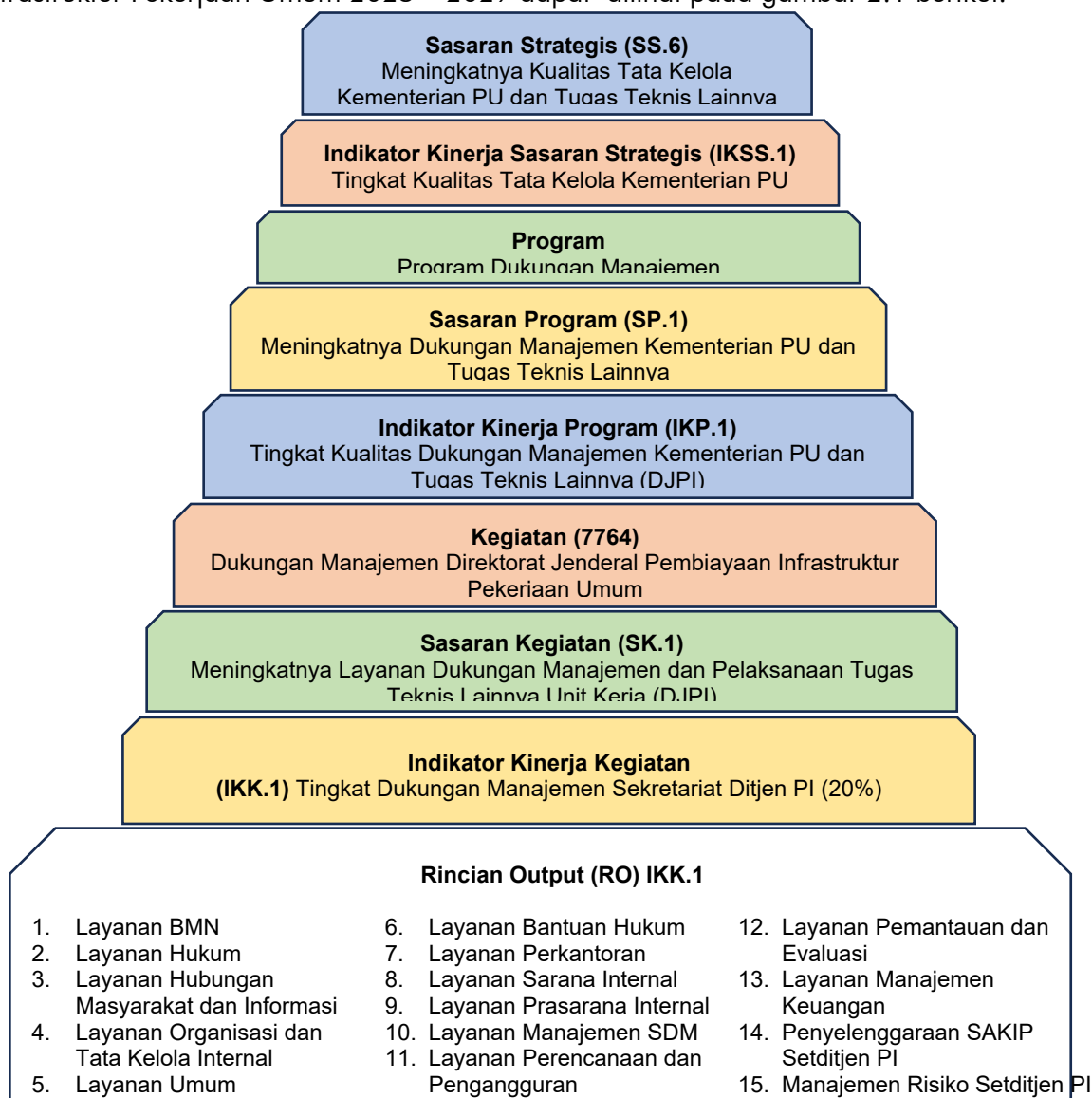
Indikator kinerja pada sasaran program tersebut adalah Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Pekerjaan Umum. Program Dukungan Manajemen merujuk pada seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Kementerian melalui penguatan fungsi-fungsi manajerial, administratif, serta koordinatif di lingkungan Kementerian. Program ini mencakup berbagai aspek penting seperti perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan sumber daya manusia, sistem informasi dan teknologi, pengelolaan keuangan, serta penguatan tata kelola organisasi. Kegiatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi fondasi dan penunjang

utama agar seluruh program teknis di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Program Dukungan Manajemen menjadi bagian dari kerangka penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, peran dukungan manajemen tidak hanya administratif, melainkan juga strategis yakni memastikan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai arah pembangunan nasional dan mencapai target-target yang telah ditetapkan. Dukungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum terletak pada Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yaitu dengan menjabarkannya kedalam **Sasaran Kegiatan (SK)** :

"Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)"

Adapun cascading Struktur Program Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 2025 – 2029 dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1
Struktur Program Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU 2025-2029

2.1.3 Program dan Kegiatan

Sebagai salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, kontribusi dalam pencapaian sasaran program dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 2025-2029. Dalam pelaksanaan kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mendukung pelayanan manajemen dan administrasi pemerintahan melalui 15 Layanan dimana didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian pada setiap layanan.

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum secara keseluruhan merupakan program generik yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur atau administrasi pemerintahan. Selain Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, program dukungan manajemen dan administrasi pemerintahan juga dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

2.2 Perjanjian Kinerja

2.2.1 Perjanjian Kinerja Awal

Berdasarkan pada Surat Direktur Pengembangan Sistem dan Strategis Penyelenggaraan Pembiayaan Nomor: 81/ND/Pk/2025 perihal Pejabat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 tanggal 30 April 2025, menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja awal tahun 2025 masih menggunakan jabatan eksisting dengan nomenklatur unit kerja sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya, perjanjian kinerja revisi tahun 2025 disusun setelah adanya pelantikan pejabat eselon II dan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 diterbitkan. Berdasarkan surat ini, Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025 ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Perjanjian kinerja awal disahkan pada tanggal 31 Januari 2025 dan mengacu pada DIPA dikarenakan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2025-2029 belum terbit. Pada Perjanjian Kinerja Awal, jumlah Indikator Kinerja Kegiatan berjumlah 7 dengan total bobot target berupa 100% dengan total anggaran sebesar Rp68.053.675.614,00. Adapun Perjanjian Kinerja Awal ditampilkan pada Gambar 2.2. berikut.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reni Ahiantini
 Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

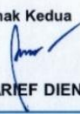
Nama : Rachman Arief Dienaputra
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

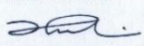
Pihak Kedua



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Pertama



RENI AHANTINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
IKSP. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	
IKK 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	15 %
IKK 2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15 %
IKK 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15 %
IKK 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15 %
IKK 5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	15 %
IKK 6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	15 %
IKK 7. Nilai SAKIP Unit Organisasi	10 %

Kegiatan:
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Anggaran
Rp 68.053.675.614,00

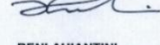
DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 31 Januari 2025

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



RENI AHANTINI

Gambar 2.2.

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU Tahun 2025

2.2.2 Perjanjian Kinerja Revisi Ke-1

Penetapan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 534/KPTS/M/2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Di Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 23 Mei 2025 dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Nomor: 22/KPTS/Dp/2025 tentang Penempatan dan Penugasan Aparatur Sipil Negara Beserta Kelas Jabatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, menetapkan bahwa telah ditlantik pimpinan unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebagai

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Adanya perubahan ini menyebabkan perubahan/revisi Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang ditanda tangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Selain itu, terdapat perubahan anggaran menjadi Rp69.779.268.000,00. Adapun Perjanjian Kinerja Revisi 1 ditampilkan pada Gambar 2.3. berikut.

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reni Ahiantini
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rachman Arief Dienaputra
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 12 Agustus 2025

Pihak Pertama



RENI AHANTINI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
IKSP. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	
IKK 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Kelembagaan	15 %
IKK 2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15 %
IKK 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15 %
IKK 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15 %
IKK 5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	15 %
IKK 6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	15 %
IKK 7. Nilai SAKIP Unit Organisasi	10 %

Kegiatan:
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Anggaran
Rp69.779.268.000,00

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM



RENI AHANTINI

Gambar 2.3.

Perjanjian Kinerja Revisi Ke-1 Tahun 2025

Sumber: Perjanjian Kinerja Revisi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU Tahun 2025

2.2.3 Perjanjian Kinerja Revisi Ke-2

Revisi kedua pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025 didasarkan pada Surat Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor: KP 0102-Kw/142 perihal Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Kementerian PU Tahun 2025 tanggal 17 November 2025 yang menyatakan bahwa Rencana Aksi Revisi disusun mulai Bulan September 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Revisi Menteri PU (status 29 September 2025). Dengan adanya arahan ini, Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Revisi Menteri PU dimana terdapat perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan metode perhitungan. Tidak terdapat perubahan anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja Revisi Ke-2 ditampilkan pada Gambar 2.4.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: Reni Ahiantini
Jabatan	: Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	: Rachman Arief Dienaputra
Jabatan	: Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 30 September 2025	
Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA	RENI AHANTINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	84,72 %
Kegiatan: Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Anggaran Rp69.779.268.000,00
Jakarta, 30 September 2025	
DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
	
RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA	RENI AHANTINI

MANUAL INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM			
NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (10%) 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (10%) 1. Layanan pengelolaan BMN yang dilakukan Indikator 3 (10%) 1. Layanan hukum yang dilakukan Indikator 4 (10%) 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 5 (10%) 1. Layanan keuangan yang dilakukan Indikator 6 (10%) 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 7 (10%) 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB Indikator 8 (10%) 1. Layanan komunikasi publik yang dilakukan Indikator 9 (10%) 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 10 (10%) 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 30 September 2025

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM



RENI AHANTINI

Gambar 2.4.
Perjanjian Kinerja Revisi Ke-2 Tahun 2025

Sumber: Perjanjian Kinerja Revisi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU Tahun 2025

2.2.4 Perjanjian Kinerja Revisi Ke-3 (Terakhir)

Perjanjian Kinerja Revisi terakhir terbit pada 24 Desember 2025, dimana perubahan terdapat pada jumlah indikator kinerja kegiatan dan pagu anggaran. Pagu anggaran sesuai dengan Revisi DIPA ke-7 dan Revisi POK ke-3 sebesar Rp75.582.753.000,00. Perjanjian Kinerja revisi terakhir ditampilkan pada Gambar 2.5.



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reni Ahiantini
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rachman Arief Dienaputra
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 24 Desember 2025

Pihak Pertama



RENI AHANTINI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	84,72 %

Kegiatan:
 Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Anggaran
 Rp75.582.753.000,00

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 24 Desember 2025
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

RENI AHIANITNI

MANUAL INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (10%) 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (10%) 1. Layanan pengelolaan BMN yang dilakukan Indikator 3 (10%) 1. Layanan hukum yang dilakukan Indikator 4 (10%) 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 5 (10%) 1. Layanan keuangan yang dilakukan Indikator 6 (10%) 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 7 (10%) 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB Indikator 8 (10%) 1. Layanan komunikasi publik yang dilakukan Indikator 9 (10%) 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 10 (10%) 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 24 Desember 2025
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

RENI AHIANITNI

Gambar 2.5.
Perjanjian Kinerja Revisi Ke-3 (Terakhir) Tahun 2025
Sumber: Perjanjian Kinerja Revisi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU Tahun 2025

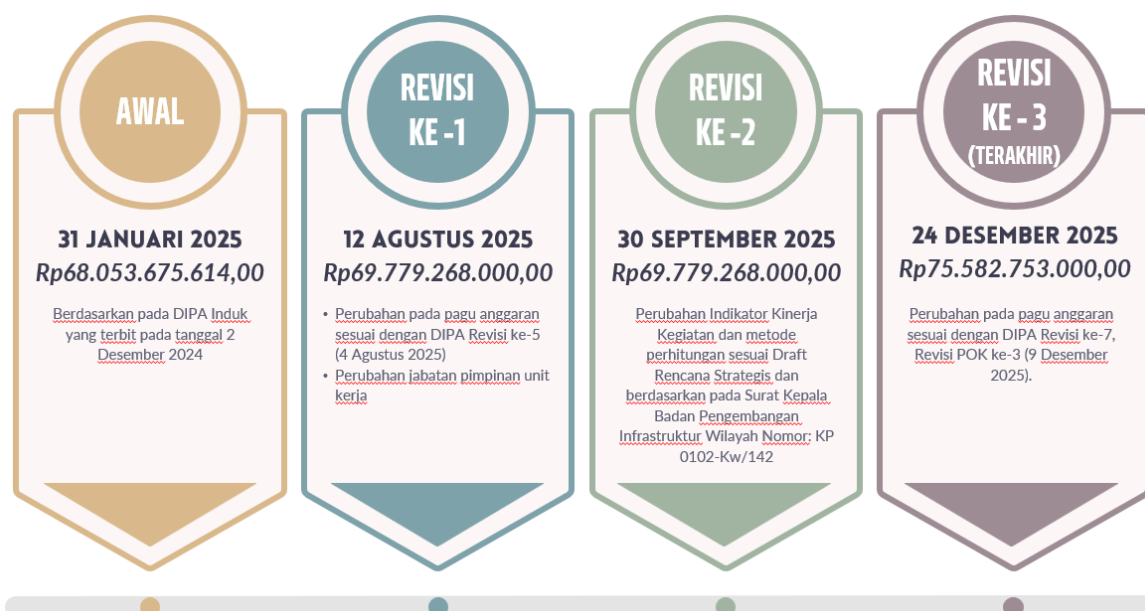
2.2.5 Kronologis Perubahan Perjanjian Kinerja

Sepanjang tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum melakukan 3 kali revisi Perjanjian Kinerja dimana setiap perubahannya terdapat perbedaan pagu anggaran dan beberapa hal lainnya. Adapun kronologis perubahan perjanjian kinerja sebagai berikut:

1. **Perjanjian Kinerja Awal**, terbit pada 31 Januari 2025 yang disusun berdasarkan DIPA Induk yang terbit pada tanggal 2 Desember 2024 dengan pagu anggaran sebesar

- Rp68.053.675.614,00 (Enam puluh delapan milyar lima puluh tiga ratus juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah);
2. **Revisi ke-1**, terbit pada 12 Agustus 2025 yang disusun berdasarkan perubahan pagu anggaran sesuai dengan DIPA Revisi ke-5 (4 Agustus 2025) dengan pagu sebesar Rp69.779.268.000,00 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Revisi untuk mengakomodir perubahan jabatan pimpinan unit kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 534/KPTS/M/2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Di Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 23 Mei 2025;
 3. **Revisi ke-2**, terbit pada 30 September 2025 yang disusun berdasarkan perubahan Indikator Kinerja Kegiatan dan metode perhitungan berdasarkan pada Surat Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor: KP 0102-Kw/142 perihal Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Kementerian PU Tahun 2025 tanggal 17 November 2025. Jumlah IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menjadi hanya 1 yaitu IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Tidak terdapat perubahan pagu anggaran pada revisi ke-2;
 4. **Revisi ke-3**, terbit pada 24 Desember 2025 yang disusun berdasarkan perubahan pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sesuai dengan DIPA Revisi ke-7 (14 November 2025) dan Revisi POK ke-3. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah Rp75.582.753.000,00 (Tujuh puluh lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Adapun rekap kronologi perubahan perjanjian kinerja selama Tahun 2025 dirangkum pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6.
Kronologi Revisi Perjanjian Kinerja
Sumber: Olah Data Perjanjian Kinerja, 2025

Detail kronologis perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, target, dan anggaran pada Perjanjian Kinerja Awal hingga Perjanjian Kinerja Revisi Ke-3 (terakhir) ditampilkan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

PK Awal		PK Revisi Ke-1		PK Revisi Ke-2		PK Revisi Ke-3 (Terakhir)	
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target
SK. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU		SK. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU		SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)		SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)	
IKK.1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan	15%	IKK.1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan	15%	IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	84,72%	IKK. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	84,72%
IKK.2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15%	IKK.2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15%				
IKK.3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15%	IKK.3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15%				
IKK.4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15%	IKK.4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15%				
IKK.5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	15%	IKK.5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	15%				
IKK.6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	15%	IKK.6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	15%				
IKK.7. Nilai SAKIP unit Organisasi	10%	IKK.7. Nilai SAKIP unit Organisasi	10%				
Anggaran : Rp68.053.675.614,00		Anggaran : Rp69.779.268.000,00		Anggaran : Rp69.779.268.000,00		Anggaran : Rp75.582.753.000,00	

Sumber: Olah Data Perjanjian Kinerja, 2025

2.3. Metode Pengukuran

Pengukuran merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Metode pengukuran berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029. Terdapat 1 Indikator Kinerja Kegiatan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)” dimana dalam perhitungannya terdapat 10 komposit yaitu:

Tabel 2.2
Metode Perhitungan Kinerja

Sasaran Kegiatan/ IKK	Jenis Indikator/Komposit	Target/ Bobot	Metode Perhitungan
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI) (7764 Kegiatan 1. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum)			
IKK.1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Ditjen PI (%)		84,72%	
	1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	10%	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum
	2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	10%	Layanan pengelolaan BMN yang dilakukan
	3. Tingkat Layanan Hukum	10%	Layanan hukum yang dilakukan
	4. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	10%	Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
	5. Nilai layanan keuangan	10%	Layanan keuangan yang dilakukan
	6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP	10%	Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu
	7. Nilai SAKIP	10%	Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPAN-RB
	8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	10%	Layanan komunikasi publik yang dilakukan
	9. Transformasi Digital Unit Kerja	10%	Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN
	10. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	10%	Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2

Sumber: Olah Data Rencana Strategis Sekretariat Pekerjaan Umum 2025-2029

2.4. Target Kinerja Tahun Pelaporan Dalam Pemenuhan Target Rencana Strategis

Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029, target kinerja pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI) didukung oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Capaian kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum terdiri dari 1 IKK yaitu IKK.1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%) yang terdiri dari 10 komposit dengan metode perhitungan pada Tabel 2.2. Adapun rincian target sepanjang periode Rencana Strategis 2025-2029 ditampilkan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Target Berdasarkan Rencana Strategis

PROG RAM/ KEGIA TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET					TOTAL (2025- 2029)
					2025	2026	2027	2028	2029	
Unit Kerja: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum										
PROGRAM 1: DUKUNGAN MANAJEMEN										
	Sasaran Program: 06.01 - Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU									
		Indikator Kinerja Program: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian	%		86,81	86,82	86,82	86,83	86,84	86,84
KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM										
	Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan									
	Indikator Kinerja Kegiatan:									
		1 Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infastruktur Pekerjaan Umum	%		84,72	84,73	84,73	84,74	84,74	84,74
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana									
	RO: Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		Rekomendas i Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal									
	RO: Layanan BMN		Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5
	Indikator Kinerja RO:									
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	Laporan		2	1	2	2	2	9
	RO: Layanan Hukum		Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5
	Indikator Kinerja RO:									
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	Laporan		1	1	1	1	1	5
	2	Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Laporan		3	2	3	3	3	14
	RO: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5
	Indikator Kinerja RO:									
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	Laporan		1	1	1	1	1	5
	2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	Laporan		3	2	3	3	3	14

PROG RAM/ KEGIA TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET					TOTAL (2025- 2029)
					2025	2026	2027	2028	2029	
Unit Kerja: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum										
		RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5
		Indikator Kinerja RO:								
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan		1	1	1	1	1	5
	2	Jumlah Laporan Pelayanan Pelaksanaan Tata Laksana Organisasi	Laporan		1	1	1	1	1	5
	3	Pengelolaan Jabatan Fungsional Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	Laporan		1	1	1	1	1	5
		RO: Layanan Umum	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5
		Indikator Kinerja RO:								
	1	Jumlah Laporan Layanan Kerumahtanggan	Laporan		2	3	2	2	2	11
	2	Jumlah Laporan Pelaksana Tata Kelola TNDE dan Arsip	Laporan		1	1	1	1	1	5
		RO: Layanan Bantuan Hukum	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5
		Indikator Kinerja RO:								
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	Laporan		1	1	1	1	1	5
		RO: Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5
		Indikator Kinerja RO:								
	1	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan DJPI	Layanan		1	1	1	1	1	5
	2	Jumlah Layanan Operasionalisasi Kantor DJPI	Layanan		1	1	1	1	1	5
		KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
		RO: Layanan Sarana Internal	Unit	Pusat	1	1	1	1	1	5
		Indikator Kinerja RO:								
	1	Jumlah Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Unit		0	1	1	1	1	4
	1	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit		1	1	1	1	1	5
		KRO: Layanan Manajemen SDM Internal								
		RO: Layanan Manajemen SDM	Orang	Pusat	272	348	385	415	444	1864
		Indikator Kinerja RO:								
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	Orang		272	348	385	415	444	1864
		KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal								
		RO: Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	Pusat	1	0	0	0	0	1
		Indikator Kinerja RO:								
	1	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan		1	0	0	0	0	1
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	Laporan		3	0	0	0	0	3
		RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5
		Indikator Kinerja RO:								
	1	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Kinerja	Laporan		1	1	0	0	0	2
	1	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan		2	1	2	2	2	9
		RO: Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5
		Indikator Kinerja RO:								
	1	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan		3	2	2	2	2	11
	1	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan		0	1	1	1	1	5
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	Laporan		0	3	3	3	3	15
		RO: Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	4

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Pekerjaan Umum 2025-2029

Berdasarkan tabel 2.3, target tahun 2025 adalah 84,72 yang terdiri 13 Rincian Indikator (RO) dan total output sebanyak 10 layanan, 1 unit, dan 272 orang. Target yang tercantum pada Rencana Strategis menjadi acuan dalam penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja. Adapun perbandingan target pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja ditampilkan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Sandingan Target Kinerja dan Rencana Strategis

Sasaran Kegiatan/ IKK	Jenis Indikator/Komposit	Target	
		Perjanjian Kinerja	Rencana Strategis
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI) (7764 Kegiatan 1. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum)			
IKK.1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)		84,72%	84,72%

Sumber: Olah Data Rencana Strategis Sekretariat Pekerjaan Umum 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja, 2025

Sesuai dengan tabel 2.4, tidak terdapat perbedaan target pada Perjanjian Kinerja maupun Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029.

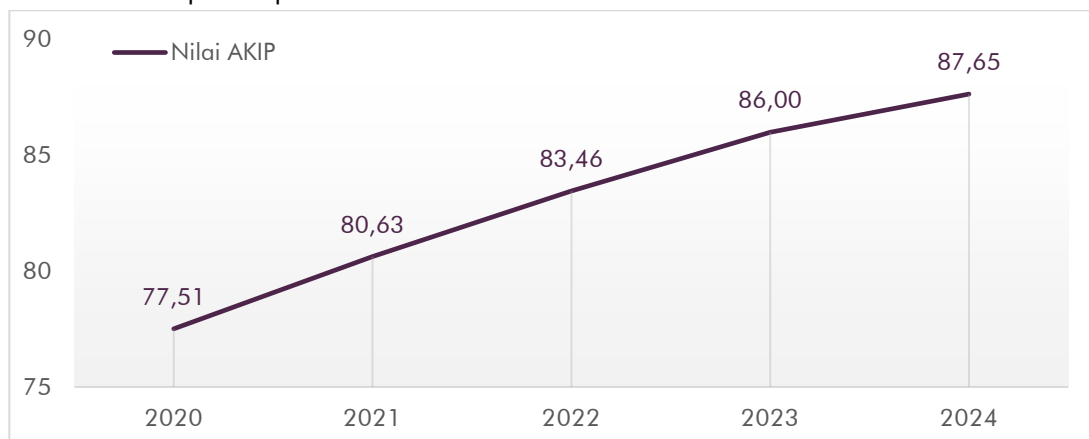
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan salah unit kerja yang mendukung pencapaian output Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Dikarenakan merupakan salah satu unit kerja baru sesuai nomenklatur Permen PU 1/2024, maka belum terdapat penilaian AKIP di tahun sebelumnya. Tahun 2024, penilaian AKIP masih dilakukan terhadap unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Evaluasi AKIP menggunakan pedoman Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dilaksanakan oleh evaluator dari Direktorat PSSPP (Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan) melalui surat Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan No. PR0304-PK/121 tanggal 11 Mei 2025 (surat terlampir pada Lampiran 2), menyatakan bahwa nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2024 adalah 87,65 dengan predikat A (Memuaskan). Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 86,00 dengan predikat A (Memuaskan). Adapun perkembangan nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ditampilkan pada Gambar 3.1 berikut.

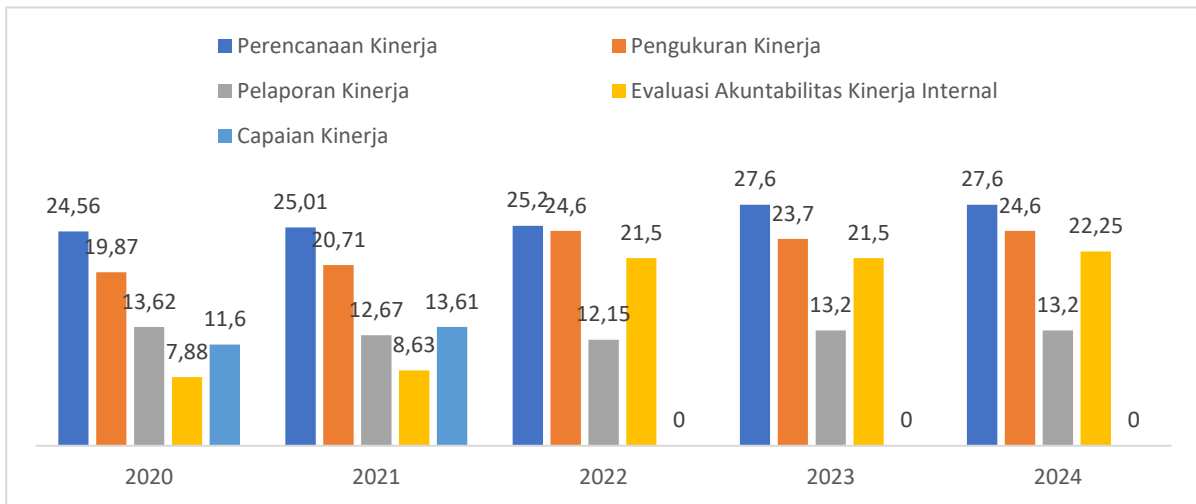


Gambar 3.1

Tren Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sumber: Olah Data, 2025

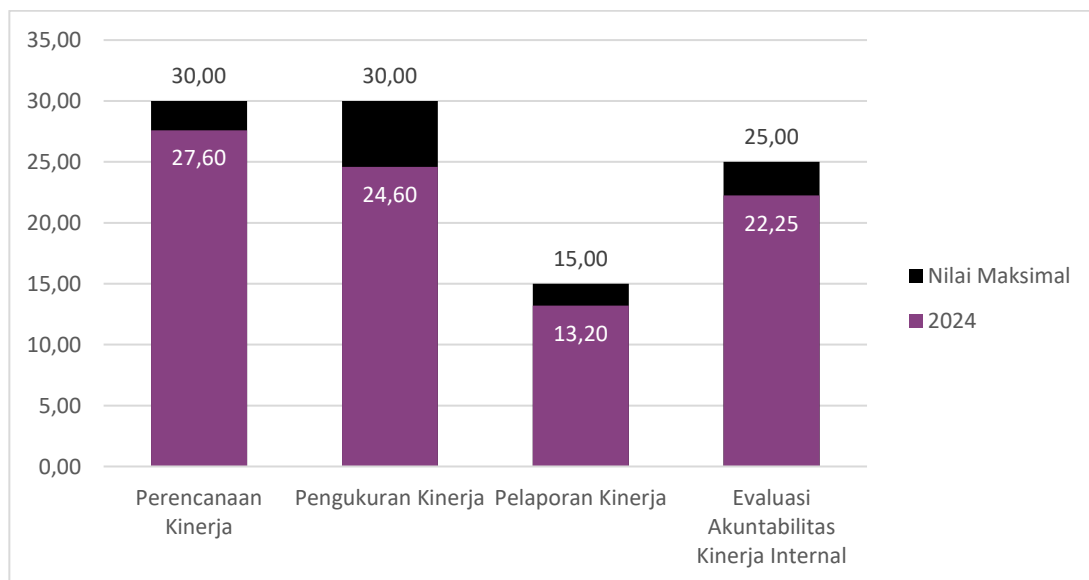
Berdasarkan gambar 3.1, nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Predikat Memuaskan didapat sejak tahun 2021. Adapun nilai pada setiap komponen ditampilkan pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2
Nilai Setiap Komponen AKIP dari Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data, 2025

Terdapat perubahan komponen perhitungan pada penilaian AKIP dimulai tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana hanya terdapat 4 komponen (sebelumnya 5 komponen) dimana komponen Capaian Kinerja tidak menjadi salah satu komponen dalam penilaian AKIP. Terdapat peningkatan nilai pada komponen Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di tahun 2024 dibandingkan nilai pada komponen yang sama di tahun 2023. Adapun nilai pada setiap komponen penilaian AKIP terhadap nilai maksimal di tahun 2024 ditampilkan pada Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3
Nilai Setiap Komponen terhadap Nilai Maksimal Penilaian AKIP Tahun 2024

Sumber: Olah Data, 2025

Nilai pada komponen Pengukuran Kinerja merupakan yang paling rendah jika dibandingkan terhadap nilai maksimal. Masih diperlukan perbaikan pada pengukuran kinerja berkala secara efektif dan berjenjang. Walaupun telah mendapat kategori memuaskan, masih terdapat beberapa rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti. Adapun rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atas hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 ditampilkan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi AKIP

Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
A. Perencanaan Kinerja	- Menyampaikan dokumen perencanaan kinerja yang sesuai dengan hasil unggahan pada e-Sakip yang telah dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang - Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja sesuai dengan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Kementerian PUPR - Menyampaikan bukti dukung terkait pohon kinerja secara keseluruhan pada Setditjen PI untuk menunjukkan kesinambungan antara indikator kinerja organisasi	Sesuai dengan ND Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 105/ND/Ps/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Notulensi Rapat Pembahasan tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Setditjen PI Tahun 2024 Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pihak evaluator, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum komitmen untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi sebagai berikut: - Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat PSSPP dalam pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen monitoring evaluasi kinerja; - Telah disusun SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; - Peningkatan kompetensi pegawai melalui Pelatihan SAKIP pada tanggal 18-25 Agustus 2025 terhadap 10 pegawai; - Pelaksanaan pemantauan kinerja berkala sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum nomor: 143/ND/Ps/2025 tanggal 24 Juni 2025; 381/ND/Ps/2025 tanggal 30 Oktober 2025; 479/ND/Ps/2025 tanggal 12 Desember 2025; Dan Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan nomor: 120/ND/Ps.1/2025 tanggal 5 Agustus 2025; 155/ND/Ps.1/2025 tanggal 18 September 2025 206/ND/Ps.1/2025 tanggal 19 November 2025;
B. Pengukuran Kinerja	- Menyusun SOP unit kerja terkait pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai panduan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan - Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti-bukti rapat pembahasan mengenai peningkatan capaian kinerja berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebagai bukti pendukung pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kinerja - Melakukan pembahasan terkait move capaian kinerja secara berkala dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (<i>decision maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja yang dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	- Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat PSSPP dalam pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen monitoring evaluasi kinerja; - Telah disusun SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; - Peningkatan kompetensi pegawai melalui Pelatihan SAKIP pada tanggal 18-25 Agustus 2025 terhadap 10 pegawai; - Pelaksanaan pemantauan kinerja berkala sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum nomor: 143/ND/Ps/2025 tanggal 24 Juni 2025; 381/ND/Ps/2025 tanggal 30 Oktober 2025; 479/ND/Ps/2025 tanggal 12 Desember 2025; Dan Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan nomor: 120/ND/Ps.1/2025 tanggal 5 Agustus 2025; 155/ND/Ps.1/2025 tanggal 18 September 2025 206/ND/Ps.1/2025 tanggal 19 November 2025;
C. Pelaporan Kinerja	- Menyampaikan laporan move berkala secara tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP PUPR - Menyajikan segala informasi terkait capaian kinerja sasaran strategis dan sasaran program dalam laporan kinerja secara relevan - Melakukan pemantauan secara berkala serta verifikasi secara	Komitmen dalam pendokumentasian kelengkapan administrasi, keterlibatan

Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	berjenjang dari Tim Pelaksana hingga melibatkan pimpinan atas pengukuran kinerja dalam Laporan Monev berkala sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP PUPR	pimpinan, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan dan pembahasan capaian kinerja berkala.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Menyusun tim evaluator internal dalam surat tugas dengan keanggotaan yang telah memiliki sertifikat Bimtek SAKIP sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR dan SE Itjen Nomor 02/SE/IJ/2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi di Kementerian PUPR 2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja tahun sebelumnya, sehingga seluruh perbaikan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja	

Sumber: Olah Data, 2025

3.2. Capaian Kinerja

Prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka melakukan akuntabilitas kinerja tersebut, maka perlu disampaikan berbagai capaian kinerja.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mendukung capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI). Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025 sebesar 93,21% dimana 8,49% lebih tinggi dibandingkan target pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja sebesar 84,72%. Berdasarkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025-2029, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki bobot 20% dalam mendukung capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI). Adapun capaian pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disampaikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Target Rencana Strategis Dan Target Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan/ IKK	Jenis Indikator/Komposit	Bobot	Target	Capaian	Kinerja
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI) <i>(7764 Kegiatan 1. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum)</i>					
IKK.1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)		100%	84,72%	93,21%	110,02%
	1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	10,00%	77,05	73,00	94,74%
	2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	3. Tingkat Layanan Hukum	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	4. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	5. Nilai layanan keuangan	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP	10,00%	88,01%	100,00%	113,62%
	7. Nilai SAKIP	10,00%	77,42	87,65	113,21%
	8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	9. Transformasi Digital Unit Kerja	10,00%	24,76	78,79	318,21%
	10. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	10,00%	80,01	92,69	115,85%

Sumber: Olah Data, 2025

Berdasarkan tabel 3.2, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Pekerjaan Umum tahun 2025 hanya terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan capaian yang lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025. Adapun penjelasan capaian kinerja berdasarkan komposit sebagai berikut:

1. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan tahun 2025 adalah 73,00 dengan kategori BB – Sangat Baik dan merupakan peringkat ketiga terbaik di kategori unit sekretariat organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Namun capaian ini masih dibawah target 2025 yang merupakan target Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN memiliki capaian 100% dimana penatausahaan barang milik negara telah dilakukan sesuai dengan target;
3. Tingkat layanan hukum memiliki capaian 100%. Seluruh layanan hukum dan advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan rencana di tahun 2025;
4. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu memiliki nilai 100%. Penilaian berdasarkan survei kepuasan layanan kepegawaian. Dimana hasil survei memiliki kriteria berikut:
 - a. Nilai Kepuasan diantara 85,01% - 100,00% maka nilai kinerja layanan adalah 100%;
 - b. Nilai Kepuasan diantara 75,01% - 85,00% maka nilai kinerja layanan adalah 90%;

- c. Nilai Kepuasan diantara 65,01% - 75,00% maka nilai kinerja layanan adalah 80%;
 - d. Nilai Kepuasan diantara 55,01% - 65,00% maka nilai kinerja layanan adalah 70%;
 - e. Nilai Kepuasan kurang dari 55,01% maka nilai kinerja layanan adalah 60%;
5. Nilai layanan keuangan dilakukan sesuai dengan rencana dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran sehingga capaian tahun 2025 adalah 100%;
 6. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP memiliki capaian 100% dimana sebanyak 79 temuan telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Saat ini masih terdapat beberapa rekomendasi yang sedang proses telaah oleh BPK RI;
 7. Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2024 belum ada, sehingga menggunakan nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2024 dengan capaian sebesar 87,65, predikat A (Memuaskan). Capaian ini lebih tinggi dibandingkan target 2025 dan merupakan target Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 77,42;
 8. Tingkat layanan komunikasi publik memiliki capaian 100%. Seluruh pelaksanaan kegiatan layanan komunikasi publik dilaksanakan sesuai dengan rencana;
 9. Transformasi digital unit kerja memiliki capaian 78,79 dan merupakan capaian tertinggi mencapai 318,21% lebih tinggi dibandingkan dengan target sebesar 24,76%;
 10. Tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko T2 memiliki capaian 92,69 dan diatas target tahun 2025 sebesar 80,01. Tingkat efektivitas pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan yang tertinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan masuk dalam kategori *Optimized! Level 5*.

Berdasarkan tabel 3.2, capaian/realisasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah 93,21%. Besaran capaian ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal sebagai berikut.

Faktor Eksternal

- Adanya perubahan metode penilaian Transformasi Digital yang mempengaruhi hasil penilaian;
- Kerjasama dari seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian/Lembaga lainnya (Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman) dalam penyelesaian temuan dan penataan arsip dan Barang Milik Negara; dan
- Kerjasama dari seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan dan layanan dukungan manajemen.

Faktor Internal

- Komitmen dari tingkat pimpinan hingga staf dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;
- Penerapan SOP (*Standart Operating Procedures*) dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
- Peningkatan *awareness* dalam pendokumentasian pelaksanaan kegiatan; dan
- Pelaksanaan monitoring berkala sebagai bentuk preventif terhadap kendala dan permasalahan yang terjadi.

3.3. Analisis Perbandingan Kinerja

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dilakukan untuk melihat adanya perbaikan terhadap capaian di tahun 2025.

3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2025 merupakan tahun pertama untuk periode Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 akan dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2024. Adapun perbandingan capaian kinerja ditampilkan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	
2024		2025	
Indikator Kinerja	Capaian	Indikator Kinerja	Capaian
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	99,96%	SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)	
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan)	100,59 %		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan	14,96%	IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	93,21%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15,00%		
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15,34%		
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15,43%		
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	14,50%		
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik	15,24%		
IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi	10,13%		

Sumber: Olah Data, 2025

Berdasarkan tabel 3.3, terdapat perbedaan jumlah indikator kinerja kegiatan di tahun 2024 dimana sebanyak 7 IKK dan tahun 2025 sebanyak 1 IKK. Capaian tahun 2025 sebesar

93,21% secara total lebih rendah daripada capaian tahun 2024 sebesar 100,59%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah indikator kinerja kegiatan dan metode perhitungan serta pembobotan pada tahun 2025 dan 2024 berbeda.

3.3.2 Perbandingan Kinerja dengan dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah tercatat pada dokumen Rencana Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar 84,74 yang terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun perbandingan kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah ditampilkan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Indikator Kinerja	Target 2025	Target Jangka Menengah 2029	Capaian
			2025
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)			
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)			
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)			
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	84,72	84,74	93,21%

Sumber: Olah Data, 2025

Berdasarkan pada tabel 3.4, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Pada dokumen Rencana Strategis, disampaikan pula target output yang mendukung pencapaian outcome. Adapun capaian kinerja output tahun 2025 terhadap target tahun 2025 dan target jangka menengah ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Output Tahun 2025 berdasarkan Target Rencana Strategis

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	2025		TOTAL RENSTRA	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal					
RO: Layanan BMN	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan BMN	Laporan	1	1	5	1
RO: Layanan Hukum	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan kerjasama	Laporan	1	1	3	1
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan	Laporan	3	3	14	3
RO: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan kehumasan dan pengaduan masyarakat	Laporan	1	1	5	1

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	2025		TOTAL RENSTRA	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
2. Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan media kreatif dan penyebaran informasi	Laporan	3	3	14	3
RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	Laporan	1	1	5	1
2. Jumlah laporan pelayanan pelaksanaan tata laksana organisasi	Laporan	1	1	5	1
3. Pengelolaan jabatan fungsional pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan	1	1	5	1
RO: Layanan Umum	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan layanan kerumahtanggan	Laporan	2	4	11	4
2. Jumlah laporan pelaksana tata kelola TNDE dan arsip	Laporan	1	1	5	1
RO: Layanan Bantuan Hukum	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan pelaksanaan advokasi dan pendampingan hukum	Laporan	1	1	5	1
RO: Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan gaji dan tunjangan DJPI	Laporan	1	1	5	1
2. Jumlah layanan operasionalisasi kantor DJPI	Laporan	1	1	5	1
KRO : Layanan Sarana dan Prasarana Internal					
RO: Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	5	1
1. Jumlah pengadaan fasilitas perkantoran	Unit	0	0	4	0
2. Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Unit	1	1	5	1
KRO: Layanan Manajemen SDM Internal					
RO: Layanan manajemen SDM	Orang	272	272	1864	272
1. Jumlah laporan pelaksanaan tata kelola pegawai	Orang	272	272	1864	272
KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal					
RO: Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	1	1	1
1. Jumlah laporan penyusunan rencana kerja dan anggaran	Laporan	1	1	1	1
2. Jumlah laporan pelaksanaan administrasi anggaran dan perbendaharaan	Laporan	3	3	3	3
RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan penyusunan laporan kinerja	Laporan	1	1	5	1

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	2025		TOTAL RENSTRA	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
2. Jumlah laporan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi	Laporan	2	2	9	2
RO: Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan keuangan	Laporan	3	3	11	3
2. Jumlah laporan penyusunan rencana kerja dan anggaran	Laporan	0	0	4	0
3. Jumlah laporan pelaksanaan administrasi anggaran dan perbendaharaan	Laporan	0	0	12	0
RO: Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dokumen	0	0	4	0

Sumber: Olah Data, 2025

Capaian output dibandingkan target jangka menengah masih sangat rendah mengingat tahun 2025 masih tahun pertama pada periode Rencana Strategis. Capaian ini akan terus meningkat di tahun berikutnya.

3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan standar nasional (*benchmarking*) menggunakan unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024. Perbandingan kedua unit kerja tersebut dengan mempertimbangkan adanya beberapa kesamaan diantaranya berupa skala unit organisasi yang mirip dimana kedua unit organisasi merupakan unit kerja eselon II, memiliki 1 Sasaran Program yang sama. Adapun perbandingan realisasi kinerja antara kedua unit kerja disampaikan pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025 dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2024

Sekretariat DJPI Tahun 2025			Sekretariat DJBM Tahun 2024		
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)			SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)			IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)			SK. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan jalan		
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal	84,72%	93,21%	IKK. Tingkat Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN & Umum	100,00%	99,96%

Sekretariat DJPI Tahun 2025			Sekretariat DJBM Tahun 2024		
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum			IKK. Tingkat Fasilitas Produk Hukum dan Advokasi Hukum	100,00%	103,70%
			IKK. Persentase Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara	100,00%	100,00%
			IKK. Persentase Tingkat Pelayanan Kepegawaian DJBM	100,00%	101,74%

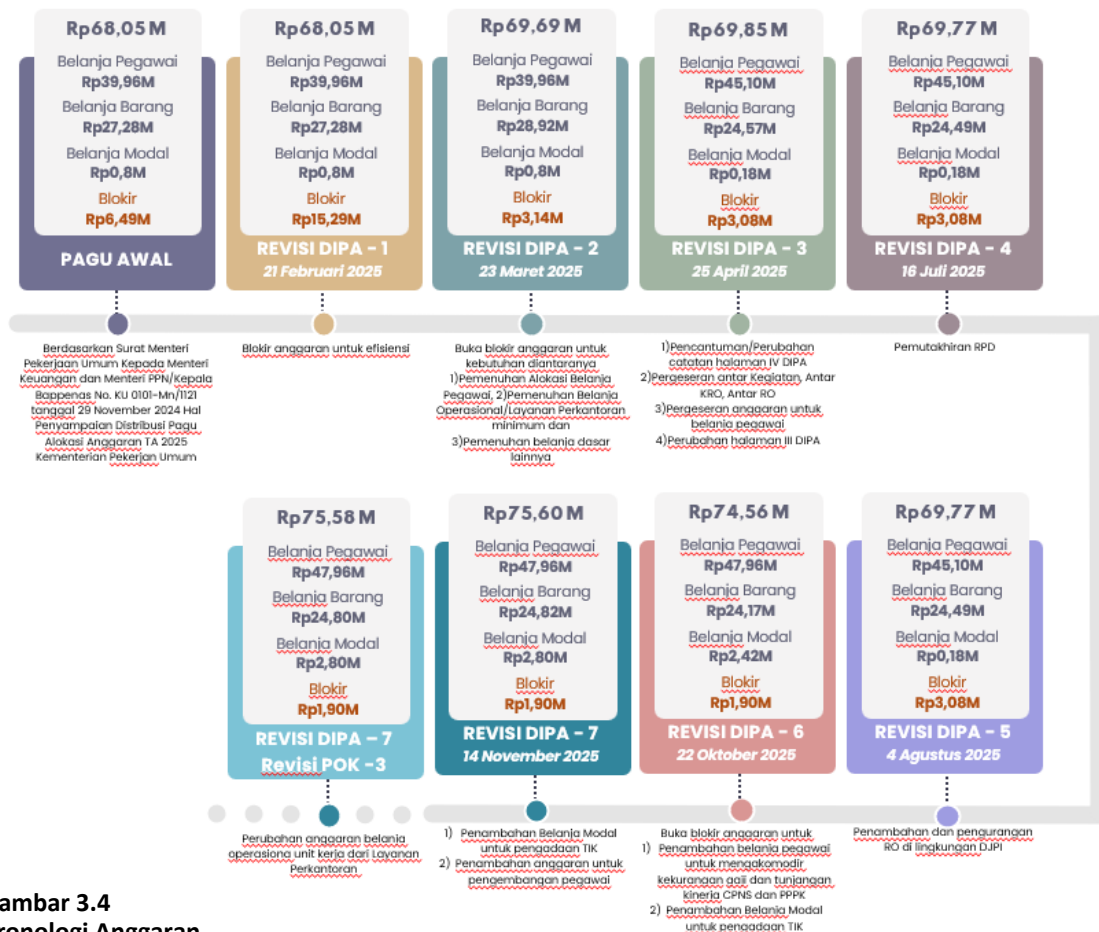
Sumber: Olah Data, 2025

Berdasarkan tabel 3.6, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2024 memiliki 4 IKK sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025 hanya memiliki 1 IKK. Seluruh IKK pada Sekretariat DJBM merupakan komposit pada IKK di Sekretariat DJPI. Terdapat 1 IKK pada Sekretariat DJBM yang memiliki capaian dibawah target sedangkan pada Sekretariat DJPI memiliki capaian diatas target.

3.4. Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki total anggaran awal sebesar Rp68.053.675.000,00 (enam puluh delapan milyar lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selama tahun 2025, dilakukan 7 kali Revisi DIPA yang mempengaruhi perubahan anggaran. Adapun kronologi anggaran ditampilkan pada gambar 3.4.



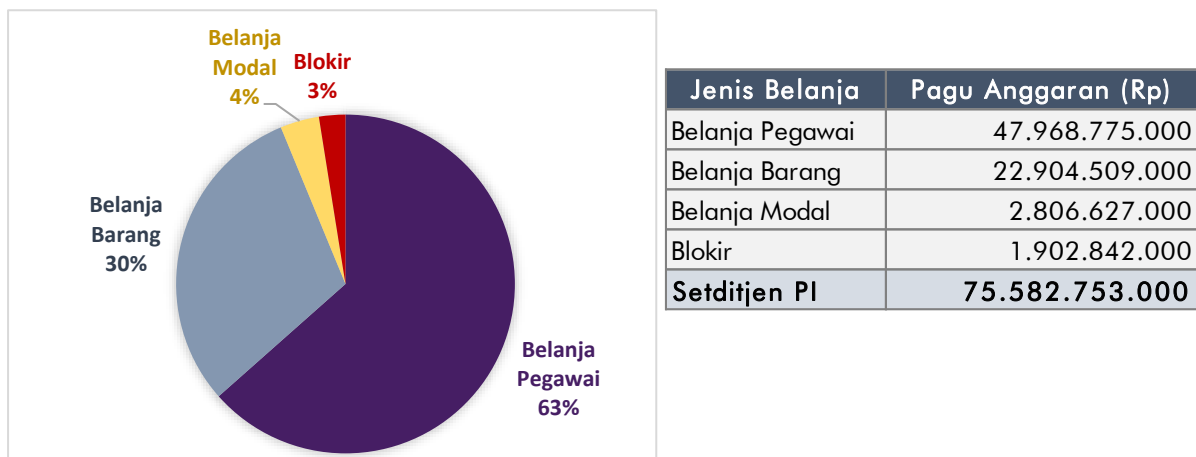
Gambar 3.4
Kronologi Anggaran

Sumber: Olah Data iemonitoring PU, 2025

Berdasarkan gambar 3.4, terdapat 5 kali perubahan pagu anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA ke-1, pada tanggal 21 Februari 2025 dimana tidak terdapat perubahan total anggaran, namun terdapat perubahan anggaran blokir menjadi Rp15.290.590.000,00 untuk efisiensi tahun anggaran 2025;
2. Revisi DIPA ke-2, pada tanggal 23 Maret 2025. Terjadi perubahan pagu anggaran menjadi Rp69.692.034.000,00 untuk penambahan anggaran dari buka blokir untuk belanja pegawai, belanja operasional/layanan perkantoran dan belanja lainnya (belanja barang). Anggaran blokir pasca revisi DIPA ke-2 menjadi Rp3.141.292.000,00;
3. Revisi DIPA ke-3, tanggal 25 April 2025. Terdapat penambahan anggaran belanja pegawai menjadi Rp45.102.177.000,00, penurunan anggaran belanja barang dan pergeseran anggaran antar kegiatan menjadi Rp24.573.014.000,00 dan penurunan anggaran belanja modal menjadi Rp180.000.000,00 sehingga total pagu sebesar Rp69.855.191.000,00 dengan blokir anggaran sebesar Rp3.085.915.000,00. Pada revisi ini juga dilaksanakan untuk perubahan Halaman III DIPA;
4. Revisi DIPA ke-4, tanggal 16 Juli 2025. Terdapat perubahan anggaran belanja barang operasional yang mempengaruhi pagu anggaran total menjadi Rp69.779.268.000,00. pada revisi DIPA ke-4 dilaksanakan untuk pemutakhiran RPD;
5. Revisi DIPA ke-5, tanggal 4 Agustus 2025. Tidak terdapat perubahan pagu anggaran dan blokir pada revisi ini. Revisi ini mengakomodir penambahan dan pengurangan RO di lingkungan DJPI;
6. Revisi DIPA ke-6, tanggal 22 Oktober 2025. Pada revisi ini dilakukan buka blokir anggaran untuk penambahan anggaran belanja pegawai menjadi Rp47.968.775.000,00 mengakomodir kekurangan gaji dan tunjangan kinerja CPNS dan PPPK dan penambahan belanja modal untuk pengadaan TIK menjadikan pagu belanja modal menjadi Rp2.421.000.000,00. Karena ada buka blokir, anggaran blokir menjadi Rp1.902.842.000,00;
7. Revisi DIPA ke-7, tanggal 14 November 2025. Pada revisi ini dilakukan penambahan anggaran belanja barang untuk pengembangan pegawai dan belanja modal untuk pengadaan TIK. Total pagu menjadi Rp75.602.833.000,00. Pasca Revisi DIPA ke-7, dilakukan Revisi POK ke-3 yang menyebabkan perubahan pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menjadi Rp75.582.753.000,00 (tujuh puluh lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan anggaran blokir sebesar Rp1.902.842.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah). Perubahan anggaran pada revisi POK ke-3 dikarenakan perubahan anggaran belanja operasional unit kerja pada layanan perkantoran. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tanpa blokir (efektif) sebesar Rp73.679.911.000,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Adapun proporsi anggaran berdasarkan jenis belanja ditampilkan pada Gambar 3.5.

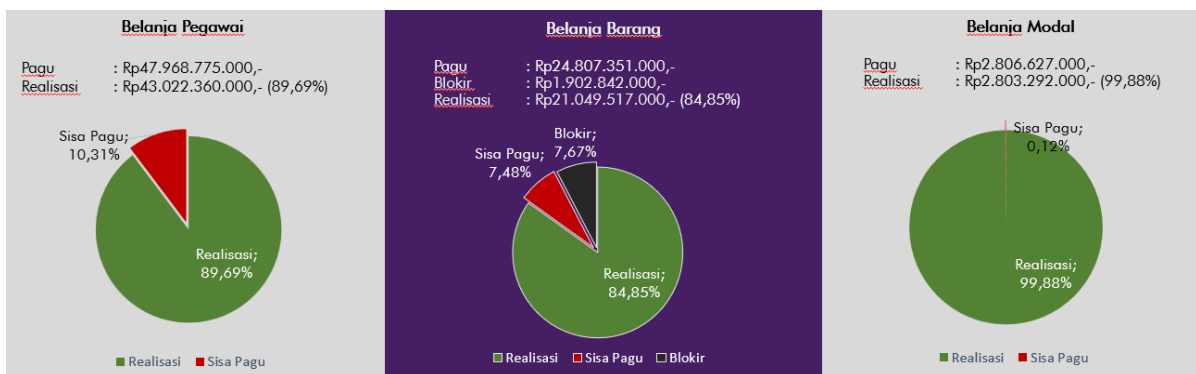


Gambar 3.5
Proporsi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Sumber: Olah Data iemonitoring PU, 2025

Proporsi anggaran terbesar pada belanja pegawai mencapai 63% dari total pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Blokir anggaran seluruhnya pada belanja barang dan pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas. Dengan adanya blokir anggaran, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada SE No 3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pola Kerja Baru Dalam Rangka Efisiensi Belanja di Kementerian PU.

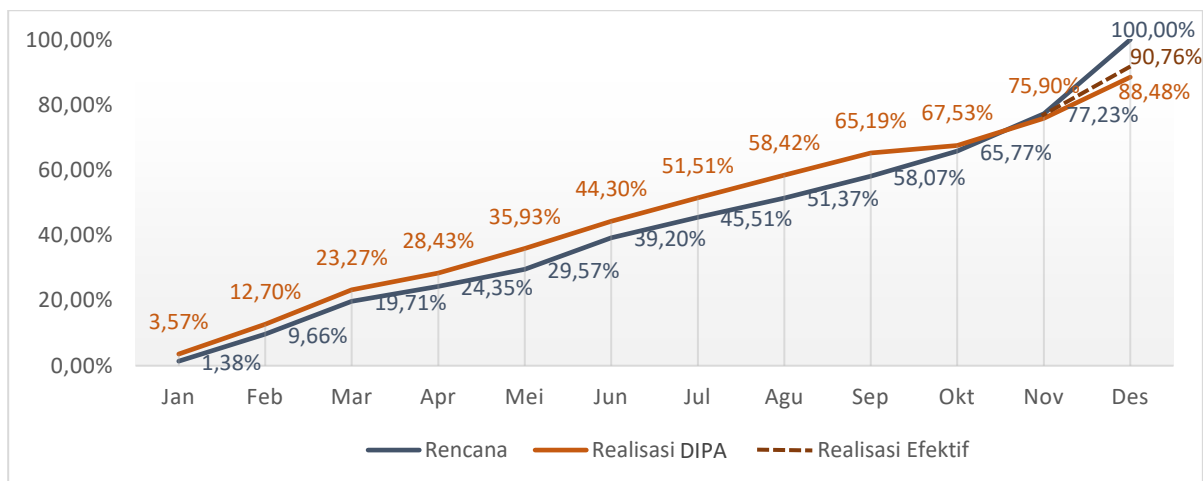
3.4.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan iemonitoring PU tanggal 13 Januari 2025 pukul 16.00 WIB, realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar Rp66.875.168.000,00 (Enam puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 88,48% terhadap pagu DIPA dan 90,76% terhadap pagu efektif. Adapun realisasi per jenis belanja ditampilkan pada Gambar 3.6. berikut.

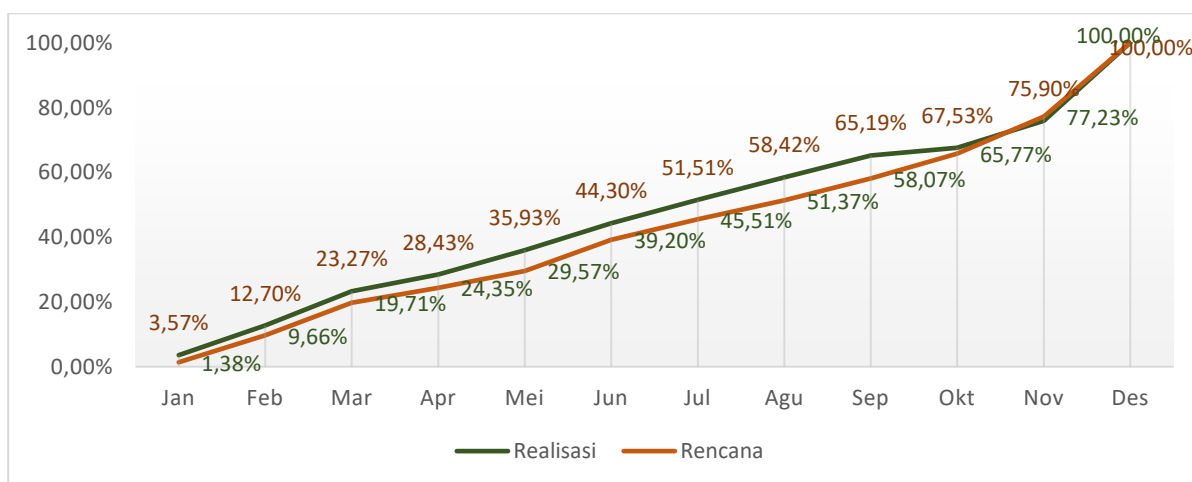


Gambar 3.6
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Sumber: Olah Data iemonitoring PU, 13 Januari 2025 pukul 08.00 WIB

Adapun grafik realisasi keuangan dan fisik ditampilkan pada gambar 3.7 dan 3.8 berikut.



Gambar 3.7
Kurva S Realisasi Keuangan Tahun 2025
 Sumber: Olah Data iemonitoring PU, 13 Januari 2025 pukul 08.00 WIB



Gambar 3.8
Kurva S Realisasi Fisik Tahun 2025
 Sumber: Olah Data iemonitoring PU, 13 Januari 2025 pukul 08.00 WIB

Gambar 3.7 menunjukkan kurva S persentase realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025. Dengan realisasi sebesar Rp66.875.168.000,00 di Bulan Desember, maka deviasi terhadap rencana pagu DIPA sebesar -11,52% dan terhadap prognosis (pagu efektif) sebesar -9,24%. Deviasi pagu DIPA dikarenakan terdapat blokir anggaran sebesar Rp1.902.842.000,00. Selain itu, terdapat beberapa kendala dalam realisasi anggaran di tahun 2025 sebagai berikut:

Belanja Pegawai

1. Kondisi Internal

- a. Penambahan anggaran belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK pada triwulan II tahun 2025;
- b. Satuan Kerja belum secara optimal mampu memperkirakan dampak perubahan kebijakan perpajakan dengan penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sehingga terdapat kelebihan alokasi anggaran Belanja Tunjangan PPh PNS;
- c. Mutasi pegawai keluar dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sepanjang tahun anggaran berjalan, terdapat 30 (tiga puluh) orang pegawai mutasi keluar Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum ke Unit Organisasi lain dan ke Instansi lain. Kondisi tersebut secara langsung mengurangi kebutuhan riil pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan kinerja;

- d. Terdapat 7 (tujuh) orang pegawai yang memasuki masa purnabakti, 6 (enam) orang diantaranya pensiun di semester I 2025. Selain itu, terdapat 2 (dua) orang pegawai yang diberhentikan dari jabatannya sebagai PNS dan PPPK di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.
 - e. Terdapat pegawai yang tidak dibayarkan tunjangan kinerjanya sejak Oktober 2025 dikarenakan tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 an. Ahmad Muhajir.
2. Kondisi Eksternal
- a. Sebagaimana arahan Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana terkait tambahan alokasi belanja pegawai, untuk PPPK dialokasikan 81 (delapan puluh satu) orang PPPK namun terkontrak sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang dan 91 (sembilan puluh satu) orang CPNS namun dalam realisasinya jumlah pegawai yang benar-benar diterima dan dibayarkan gajinya hanya 47 (empat puluh tujuh) orang CPNS;
 - b. Pengalokasian tunjangan fungsional yang belum dapat direalisasikan, hal ini disebabkan antara lain karena SKP belum disusun sehingga proses kenaikan JF belum bisa diproses dan dalam komponen Belanja Pegawai telah dialokasikan anggaran untuk Tunjangan Fungsional bagi PNS dengan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Namun sampai dengan saat ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian tunjangan dimaksud belum ditetapkan, sehingga anggaran tersebut belum dapat direalisasikan demikian juga dengan alokasi Tunjangan Fungsional bagi CPNS;
 - c. perhitungan tambahan gaji dan tunjangan dengan skema maksimal dimana jumlah pegawai dihitung masing-masing dengan tunjangan istri/suami dan 2 (dua) orang anak sebagaimana arahan dari Biro PAKLN.

Belanja Barang

1. Blokir anggaran menyebabkan perlunya strategi dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No.3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pola Kerja Baru Dalam Rangka Efisiensi Belanja di Kementerian PU;
2. Penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan;
3. Penambahan anggaran untuk pelaksanaan dan *surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyupaan (SMAP) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
4. Terdapat sisa anggaran pada Paket Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/Satpam/Sopir karena Sisa lelang tidak dapat dimanfaatkan;
5. Penambahan anggaran sebesar Rp778.040.000,00 untuk kegiatan Pendampingan Pelelangan Kerjasama Pemanfaatan Wisma Werdhapura pada Revisi DIPA ke-3 tanggal 25 April 2025. Selain itu, pada revisi DIPA ke-3 juga dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan, antar KRO/RO dan perubahan target RO berupa :
 - Pengurangan RO Layanan Sarana Internal (7764.EBB.951) sebanyak 1 Unit karena efisiensi pada Pengadaan fasilitas perkantoran;
 - Pengurangan RO Layanan Prasarana Internal (7764.EBB.971) sebanyak 2 Unit karena efisiensi pada Renovasi Gedung dan Bangunan dan Revitalisasi Sistem Jaringan Data;
 - Pengurangan RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran (7764.EBD.952) sebanyak 1 Dokumen karena penghapusan paket pekerjaan Fasilitas Koordinasi Pelaksanaan P3DN dan TKDN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA 2025 yang disebabkan oleh menurunnya anggaran pengadaan barang dan jasa yang memerlukan ijin impor; dan

- Pengurangan RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi (7764.EBD.953) sebanyak 1 Dokumen karena penghapusan paket pekerjaan Fasilitas Dukungan KPBU TA. 2024 yang digunakan untuk memfasilitasi undangan dari unit kerja pengampu KPBU di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.
6. Pergeseran Antar Kegiatan antar KRO pada revisi DIPA 7 yang menyebabkan pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum bertambah dengan rincian berikut :
- Penambahan pagu KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (7764.EBA) Sebesar Rp410.640.000,00 untuk paket kegiatan Fasilitas Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penatausahaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) serta Arsip Aktif dan Inaktif Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Pelaksanaan Tata Laksana Organisasi, Pengelolaan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Dukungan Media Penyebaran Informasi;
 - Penambahan pagu KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal (7764.EBB) sebesar Rp385.627.000,00 untuk pembelian Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) TA 2025;
 - Penambahan pagu KRO Layanan Manajemen SDM Internal (7764.EBC) sebesar Rp68.805.000,00 untuk paket kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU; dan
 - Penambahan pagu KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal (7764.EBD) sebesar Rp233.220.000,00 untuk paket kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA. 2026 dan Penyusunan Laporan Manajemen Risiko.

Belanja Modal

1. Penambahan anggaran untuk belanja meubelair pimpinan dan pengadaan perangkat data dan komunikasi pada triwulan 4 tahun 2025 sehingga diperlukan strategi realisasi sebelum akhir tahun 2025.

Adapun rincian realisasi anggaran pada setiap KRO dan RO berdasarkan data iemonitoring PU tanggal 13 Januari 2026 ditampilkan pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2025 per KRO dan RO

Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Blokir	Realisasi	Keuangan (%)			Fisik (%)		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL DIPA	RL Efektif	RN	RL	Kinerja
Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)			78.125.339	1.902.842	68.380.950	100	87,53	90,76	100	100	100
Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan/ Laporan /Dokumen	71.323.118	1.669.797	62.884.331	100	88,17	90,28	100	100	100
Layanan BMN	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	122.983	76.602	40.172	100	32,66	86,61	100	100	100
Layanan Hukum	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	303.026	110.035	189.374	100	62,49	98,13	100	100	100
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	413.902	55.194	355.776	100	85,96	99,18	100	100	100

Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Blokir	Realisasi	Keuangan (%)			Fisik (%)		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL DIPA	RL Efektif	RN	RL	Kinerja
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	564.296	135.515	426.307	100	75,55	99,42	100	100	100
Layanan Umum	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	1.260.325	56.991	1.163.446	100	92,31	96,69	100	100	100
Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	43.103	11.895	27.507	100	63,82	88,14	100	100	100
Layanan Perkantoran	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	68.615.483	1.223.565	60.681.749	100	88,44	88,92	100	100	100
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	93	Unit/m2/ Paket	2.806.627	0	2.803.292	100	99,88	99,88	100	100	100
Layanan Sarana Internal	93	Unit/m2/ Paket	2.806.627	0	2.803.292	100	99,88	99,88	100	100	100
Layanan Manajemen SDM Internal	272	Orang/ Layanan	318.428	114.350	196.889	100	61,83	96,48	100	100	100
Layanan Manajemen SDM	272	Orang/ Layanan	318.428	114.350	196.889	100	61,83	96,48	100	100	100
Layanan Manajemen Kinerja Internal	8	Layanan/ Laporan /Dokumen	1.134.580	118.695	990.657	100	87,31	97,52	100	100	100
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3	Layanan/ Laporan /Dokumen	472.031	57.061	414.405	100	87,79	99,86	100	100	100
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	Layanan/ Laporan /Dokumen	237.325	0	237.044	100	99,88	99,98	100	100	100
Layanan Manajemen Keuangan	3	Layanan/ Laporan /Dokumen	425.224	61.634	339.209	100	79,77	93,29	100	100	100

Sumber: iemonitoring PU 13 Januari 2025 pukul 08.00 WIB

Berdasarkan tabel 3.7, kinerja fisik pada seluruh KRO dan RO di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah 100%. Target keuangan pada iemonitoring PU secara keseluruhan 100%. Dengan adanya blokir anggaran, realisasi keuangan tidak akan mencapai 100%.

3.4.3. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Total anggaran tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Perbedaan anggaran ini terlihat jelas dipengaruhi oleh adanya pengurangan belanja pegawai karena pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, adanya kebijakan efisiensi di tahun anggaran 2025 juga mempengaruhi strategi pelaksanaan kegiatan dan prioritas pekerjaan. Adapun perbedaan realisasi anggaran sebagai berikut.

Tabel 3.8
Perbedaan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024

Jenis Belanja	2024				2025			
	Pagu	Blokir	Realisasi		Pagu	Blokir	Realisasi	
	Rp Ribu	Rp Ribu	Rp Ribu	%	Rp Ribu	Rp Ribu	Rp Ribu	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(6)
Belanja Pegawai	50.905.326	0	47.450.911	93,21	47.968.775	0	43.022.360	89,69
Belanja Barang	31.772.581	97.615	31.422.618	98,90	24.807.351	1.902.842	21.049.517	84,85
- Operasional	23.660.000	73.111	23.456.425	99,14	20.646.708	1.223.565	17.659.389	85,53
- Non Operasional	8.112.581	24.504	7.966.193	98,20	4.160.643	679.277	3.390.128	81,48
Belanja Modal	3.166.799	0	3.123.245	98,62	2.806.627	0	2.803.292	99,88
Total	85.844.706	97.615	81.996.774	95,52	75.582.753	1.902.842	66.875.169	88,48

Sumber: iemonitoring PU 13 Januari 2025 pukul 08.00 WIB

Berdasarkan pada tabel 3.8, pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024. Selain itu, persentase realisasi pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah blokir anggaran pada tahun 2024 yang lebih kecil sebesar Rp97.615.000,00 sedangkan pada tahun 2025, jumlah blokir sebesar Rp1.902.842.000,00. Persentase realisasi tanpa blokir tahun 2024 sebesar 95,63% sedangkan pada tahun 2025 sebesar 90,76%. Hanya belanja modal yang secara persentase realisasi pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Realisasi anggaran tahun 2025 dipengaruhi adanya perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dan belanja sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No.3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pola Kerja Baru Dalam Rangka Efisiensi Belanja di Kementerian Pekerjaan Umum.

3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Jumlah sumber daya manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025 adalah 124 pegawai. Jumlah sarana dan prasarana Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada tahun 2025 sebanyak 1.281 unit. Sedangkan jumlah anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp75.582.753.000,00. Adapun perbandingan sumber daya tahun 2025 dengan tahun 2024 ditampilkan pada Tabel 3.9. berikut.

Tabel 3.9
Sumber Daya dan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber Daya	2024	2025
Sumber Daya Manusia (orang)	126 pegawai	124 pegawai
Sarana dan Prasarana (Unit)	845 unit	1.281 unit
Anggaran (Rp)	Rp85.844.706.000,00	Rp75.582.753.000,00
Kinerja Capaian (%)	100,59%	110,02%

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2024 dan olah data Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 2025

Berdasarkan tabel 3.9, terdapat penurunan jumlah pegawai dan anggaran namun terdapat penambahan jumlah sarana dan prasarana. Terdapat efisiensi pagu anggaran sebesar 11,95% dibandingkan anggaran tahun 2024. Walau terdapat penurunan sumber daya di tahun 2025, persentase kinerja capaian tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa walau sumber daya manusia dan anggaran berkurang

namun Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tetap mengalami peningkatan kinerja. Selain terhadap tahun 2024, efisiensi selama tahun 2025 terlihat dari jumlah sisa anggaran efektif sebesar Rp6.804.743.000,00 (9,00% terhadap pagu DIPA) dimana capaian output dan capaian fisik tahun 2025 sebesar 100,00%. Capaian keuangan berdasarkan pada persentase realisasi terhadap pagu DIPA. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2025 pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

Program/Kegiatan/ KRO/RO	Target DIPA	Capaian	Satuan	Capaian Keuangan Terhadap Pagu DIPA (%)	Capaian Keuangan Terhadap Pagu Efektif (%)	Capaian Fisik (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)
Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)				87,53	90,76	100	114,25
Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	7	Layanan/Laporan /Dokumen	88,17	90,28	100	113,42
Layanan BMN	1	1	Layanan	32,66	86,61	100	306,18
Layanan Hukum	1	1	Layanan	62,49	98,13	100	160,03
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	1	Layanan	85,96	99,18	100	116,33
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	1	Layanan	75,55	99,42	100	132,36
Layanan Umum	1	1	Layanan	92,31	96,69	100	108,33
Layanan Bantuan Hukum	1	1	Layanan	63,82	88,14	100	156,69
Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	88,44	88,92	100	113,07
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	93	93	Unit/m2/Paket	99,88	99,88	100	100,12
Layanan Sarana Internal	93	93	Unit/m2/Paket	99,88	99,88	100	100,12
Layanan Manajemen SDM Internal	272	272	Orang/Layanan	61,83	96,48	100	161,73
Layanan Manajemen SDM	272	272	Orang/Layanan	61,83	96,48	100	161,73
Layanan Manajemen Kinerja Internal	8	8	Dokumen/Layanan /Laporan	87,31	97,52	100	114,53
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3	3	Dokumen	87,79	99,86	100	113,91
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	2	Dokumen	99,88	99,88	100	100,12
Layanan Manajemen Keuangan	3	4	Dokumen	79,77	93,29	100	125,36

Sumber: Olah Data iemonitoring PU 9 Januari 2025 pukul 08.00 WIB

Berdasarkan tabel 3.10, nilai efisiensi tahun 2025 adalah 114,25% dimana pada setiap RO di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum seluruhnya diatas 100. Efisiensi tertinggi pada RO Layanan BMN dimana nilai efisiensi mencapai 306,18. Efisiensi penggunaan sumber daya dihitung terhadap persentase realisasi DIPA dengan mempertimbangkan ketercapaian output yang dihasilkan didalam kondisi anggaran yang terblokir. Adapun perbandingan nilai efisiensi tahun 2024 dengan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Nilai Efisiensi Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

	2024	2025
Nilai Efisiensi	104,44	114,25

Sumber: Olah Data Tim, 2025

Nilai efisiensi tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Hal ini dipengaruhi oleh capaian tahun 2025 yang tetap maksimal ditengah kondisi anggaran yang terblokir. berdasarkan capaian output yang dihasilkan, terlihat bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tetap tercapai output walau terdapat blokir anggaran dan efisiensi.

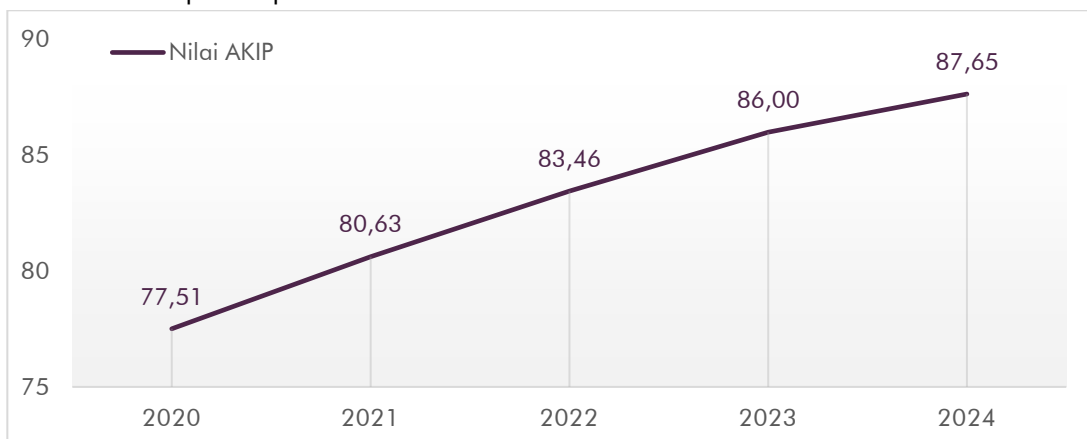
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan salah unit kerja yang mendukung pencapaian output Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Dikarenakan merupakan salah satu unit kerja baru sesuai nomenklatur Permen PU 1/2024, maka belum terdapat penilaian AKIP di tahun sebelumnya. Tahun 2024, penilaian AKIP masih dilakukan terhadap unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Evaluasi AKIP menggunakan pedoman Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dilaksanakan oleh evaluator dari Direktorat PSSPP (Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan) melalui surat Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan No. PR0304-PK/121 tanggal 11 Mei 2025 (surat terlampir pada Lampiran 2), menyatakan bahwa nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2024 adalah 87,65 dengan predikat A (Memuaskan). Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 86,00 dengan predikat A (Memuaskan). Adapun perkembangan nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ditampilkan pada Gambar 3.1 berikut.

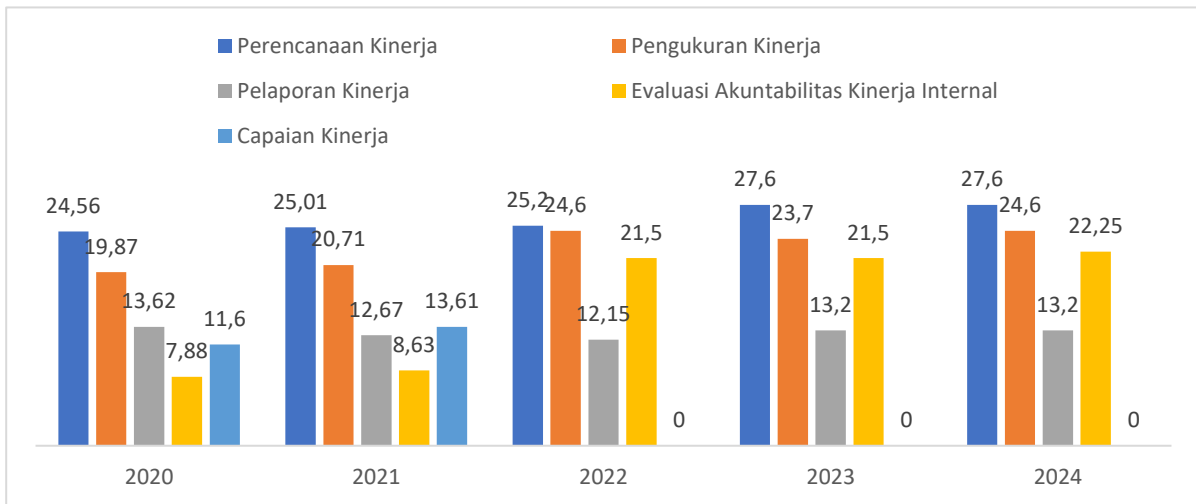


Gambar 3.1

Tren Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sumber: Olah Data, 2025

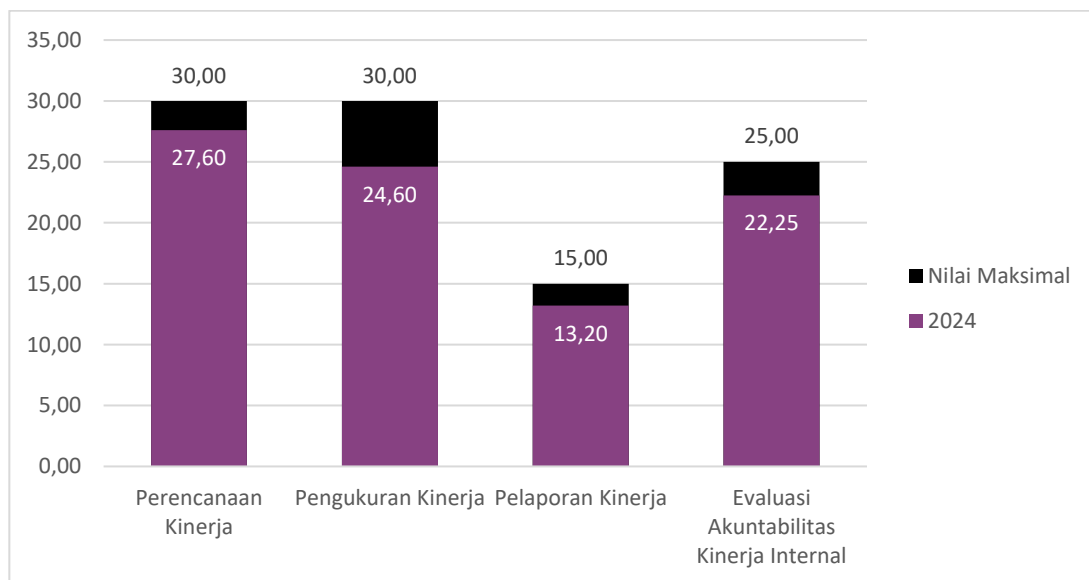
Berdasarkan gambar 3.1, nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Predikat Memuaskan didapat sejak tahun 2021. Adapun nilai pada setiap komponen ditampilkan pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2
Nilai Setiap Komponen AKIP dari Tahun 2020-2024

Sumber: Olah Data, 2025

Terdapat perubahan komponen perhitungan pada penilaian AKIP dimulai tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana hanya terdapat 4 komponen (sebelumnya 5 komponen) dimana komponen Capaian Kinerja tidak menjadi salah satu komponen dalam penilaian AKIP. Terdapat peningkatan nilai pada komponen Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di tahun 2024 dibandingkan nilai pada komponen yang sama di tahun 2023. Adapun nilai pada setiap komponen penilaian AKIP terhadap nilai maksimal di tahun 2024 ditampilkan pada Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3
Nilai Setiap Komponen terhadap Nilai Maksimal Penilaian AKIP Tahun 2024

Sumber: Olah Data, 2025

Nilai pada komponen Pengukuran Kinerja merupakan yang paling rendah jika dibandingkan terhadap nilai maksimal. Masih diperlukan perbaikan pada pengukuran kinerja berkala secara efektif dan berjenjang. Walaupun telah mendapat kategori memuaskan, masih terdapat beberapa rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti. Adapun rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atas hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 ditampilkan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi AKIP

Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
A. Perencanaan Kinerja	- Menyampaikan dokumen perencanaan kinerja yang sesuai dengan hasil unggahan pada e-Sakip yang telah dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang - Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja sesuai dengan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Kementerian PUPR - Menyampaikan bukti dukung terkait pohon kinerja secara keseluruhan pada Setditjen PI untuk menunjukkan kesinambungan antara indikator kinerja organisasi	Sesuai dengan ND Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 105/ND/Ps/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Notulensi Rapat Pembahasan tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Setditjen PI Tahun 2024 Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pihak evaluator, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum komitmen untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi sebagai berikut: - Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat PSSPP dalam pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen monitoring evaluasi kinerja; - Telah disusun SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; - Peningkatan kompetensi pegawai melalui Pelatihan SAKIP pada tanggal 18-25 Agustus 2025 terhadap 10 pegawai; - Pelaksanaan pemantauan kinerja berkala sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum nomor: 143/ND/Ps/2025 tanggal 24 Juni 2025; 381/ND/Ps/2025 tanggal 30 Oktober 2025; 479/ND/Ps/2025 tanggal 12 Desember 2025; Dan Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan nomor: 120/ND/Ps.1/2025 tanggal 5 Agustus 2025; 155/ND/Ps.1/2025 tanggal 18 September 2025 206/ND/Ps.1/2025 tanggal 19 November 2025;
B. Pengukuran Kinerja	- Menyusun SOP unit kerja terkait pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai panduan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan - Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti-bukti rapat pembahasan mengenai peningkatan capaian kinerja berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebagai bukti pendukung pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kinerja - Melakukan pembahasan terkait monev capaian kinerja secara berkala dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (<i>decision maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja yang dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	- Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat PSSPP dalam pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen monitoring evaluasi kinerja; - Telah disusun SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; - Peningkatan kompetensi pegawai melalui Pelatihan SAKIP pada tanggal 18-25 Agustus 2025 terhadap 10 pegawai; - Pelaksanaan pemantauan kinerja berkala sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum nomor: 143/ND/Ps/2025 tanggal 24 Juni 2025; 381/ND/Ps/2025 tanggal 30 Oktober 2025; 479/ND/Ps/2025 tanggal 12 Desember 2025; Dan Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan nomor: 120/ND/Ps.1/2025 tanggal 5 Agustus 2025; 155/ND/Ps.1/2025 tanggal 18 September 2025 206/ND/Ps.1/2025 tanggal 19 November 2025;
C. Pelaporan Kinerja	- Menyampaikan laporan monev berkala secara tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP PUPR - Menyajikan segala informasi terkait capaian kinerja sasaran strategis dan sasaran program dalam laporan kinerja secara relevan - Melakukan pemantauan secara berkala serta verifikasi secara	Komitmen dalam pendokumentasian kelengkapan administrasi, keterlibatan

Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	berjenjang dari Tim Pelaksana hingga melibatkan pimpinan atas pengukuran kinerja dalam Laporan Monev berkala sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP PUPR	pimpinan, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan dan pembahasan capaian kinerja berkala.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	- Menyusun tim evaluator internal dalam surat tugas dengan keanggotaan yang telah memiliki sertifikat Bimtek SAKIP sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR dan SE Itjen Nomor 02/SE/IJ/2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi di Kementerian PUPR - Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja tahun sebelumnya, sehingga seluruh perbaikan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja	

Sumber: Olah Data, 2025

3.2. Capaian Kinerja

Prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka melakukan akuntabilitas kinerja tersebut, maka perlu disampaikan berbagai capaian kinerja.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mendukung capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI). Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025 sebesar 93,21% dimana 8,49% lebih tinggi dibandingkan target pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja sebesar 84,72%. Berdasarkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025-2029, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki bobot 20% dalam mendukung capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI). Adapun capaian pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disampaikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Target Rencana Strategis Dan Target Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan/ IKK	Jenis Indikator/Komposit	Bobot	Target	Capaian	Kinerja
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI) <i>(7764 Kegiatan 1. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum)</i>					
IKK.1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)		100%	84,72%	93,21%	110,02%
	1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	10,00%	77,05	73,00	94,74%
	2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	3. Tingkat Layanan Hukum	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	4. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	5. Nilai layanan keuangan	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP	10,00%	88,01%	100,00%	113,62%
	7. Nilai SAKIP	10,00%	77,42	87,65	113,21%
	8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	9. Transformasi Digital Unit Kerja	10,00%	24,76	78,79	318,21%
	10. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	10,00%	80,01	92,69	115,85%

Sumber: Olah Data, 2025

Berdasarkan tabel 3.2, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Pekerjaan Umum tahun 2025 hanya terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan capaian yang lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025. Adapun penjelasan capaian kinerja berdasarkan komposit sebagai berikut:

1. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan tahun 2025 adalah 73,00 dengan kategori BB – Sangat Baik dan merupakan peringkat ketiga terbaik di kategori unit sekretariat organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Namun capaian ini masih dibawah target 2025 yang merupakan target Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN memiliki capaian 100% dimana penatausahaan barang milik negara telah dilakukan sesuai dengan target;
3. Tingkat layanan hukum memiliki capaian 100%. Seluruh layanan hukum dan advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan rencana di tahun 2025;
4. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu memiliki nilai 100%. Penilaian berdasarkan survei kepuasan layanan kepegawaian. Dimana hasil survei memiliki kriteria berikut:
 - a. Nilai Kepuasan diantara 85,01% - 100,00% maka nilai kinerja layanan adalah 100%;
 - b. Nilai Kepuasan diantara 75,01% - 85,00% maka nilai kinerja layanan adalah 90%;

- c. Nilai Kepuasan diantara 65,01% - 75,00% maka nilai kinerja layanan adalah 80%;
- d. Nilai Kepuasan diantara 55,01% - 65,00% maka nilai kinerja layanan adalah 70%;
- e. Nilai Kepuasan kurang dari 55,01% maka nilai kinerja layanan adalah 60%;
5. Nilai layanan keuangan dilakukan sesuai dengan rencana dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran sehingga capaian tahun 2025 adalah 100%;
6. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP memiliki capaian 100% dimana sebanyak 79 temuan telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Saat ini masih terdapat beberapa rekomendasi yang sedang proses telaah oleh BPK RI;
7. Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2024 belum ada, sehingga menggunakan nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2024 dengan capaian sebesar 87,65, predikat A (Memuaskan). Capaian ini lebih tinggi dibandingkan target 2025 dan merupakan target Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 77,42;
8. Tingkat layanan komunikasi publik memiliki capaian 100%. Seluruh pelaksanaan kegiatan layanan komunikasi publik dilaksanakan sesuai dengan rencana;
9. Transformasi digital unit kerja memiliki capaian 78,79 dan merupakan capaian tertinggi mencapai 318,21% lebih tinggi dibandingkan dengan target sebesar 24,76%;
10. Tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko T2 memiliki capaian 92,69 dan diatas target tahun 2025 sebesar 80,01. Tingkat efektivitas pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan yang tertinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan masuk dalam kategori *Optimized! Level 5*.

Berdasarkan tabel 3.2, capaian/realisasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah 93,21%. Besaran capaian ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal sebagai berikut.

Faktor Eksternal

- Adanya perubahan metode penilaian Transformasi Digital yang mempengaruhi hasil penilaian;
- Kerjasama dari seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian/Lembaga lainnya (Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman) dalam penyelesaian temuan dan penataan arsip dan Barang Milik Negara; dan
- Kerjasama dari seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan dan layanan dukungan manajemen.

Faktor Internal

- Komitmen dari tingkat pimpinan hingga staf dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;
- Penerapan SOP (*Standart Operating Procedures*) dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
- Peningkatan *awareness* dalam pendokumentasian pelaksanaan kegiatan; dan
- Pelaksanaan monitoring berkala sebagai bentuk preventif terhadap kendala dan permasalahan yang terjadi.

3.3. Analisis Perbandingan Kinerja

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dilakukan untuk melihat adanya perbaikan terhadap capaian di tahun 2025.

3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2025 merupakan tahun pertama untuk periode Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 akan dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2024. Adapun perbandingan capaian kinerja ditampilkan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	
2024		2025	
Indikator Kinerja	Capaian	Indikator Kinerja	Capaian
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	99,96%	SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)	
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan)	100,59 %		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan	14,96%	IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	93,21%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15,00%		
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15,34%		
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15,43%		
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	14,50%		
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik	15,24%		
IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi	10,13%		

Sumber: Olah Data, 2025

Berdasarkan tabel 3.3, terdapat perbedaan jumlah indikator kinerja kegiatan di tahun 2024 dimana sebanyak 7 IKK dan tahun 2025 sebanyak 1 IKK. Capaian tahun 2025 sebesar

93,21% secara total lebih rendah daripada capaian tahun 2024 sebesar 100,59%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah indikator kinerja kegiatan dan metode perhitungan serta pembobotan pada tahun 2025 dan 2024 berbeda.

3.3.2 Perbandingan Kinerja dengan dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah tercatat pada dokumen Rencana Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar 84,74 yang terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun perbandingan kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah ditampilkan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Indikator Kinerja	Target 2025	Target Jangka Menengah 2029	Capaian
			2025
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)			
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)			
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)			
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	84,72	84,74	93,21%

Sumber: Olah Data, 2025

Berdasarkan pada tabel 3.4, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Pada dokumen Rencana Strategis, disampaikan pula target output yang mendukung pencapaian outcome. Adapun capaian kinerja output tahun 2025 terhadap target tahun 2025 dan target jangka menengah ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Output Tahun 2025 berdasarkan Target Rencana Strategis

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	2025		TOTAL RENSTRA	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal					
RO: Layanan BMN	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan BMN	Laporan	1	1	5	1
RO: Layanan Hukum	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan kerjasama	Laporan	1	1	3	1
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan	Laporan	3	3	14	3
RO: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan kehumasan dan pengaduan masyarakat	Laporan	1	1	5	1

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	2025		TOTAL RENSTRA	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
2. Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan media kreatif dan penyebaran informasi	Laporan	3	3	14	3
RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	Laporan	1	1	5	1
2. Jumlah laporan pelayanan pelaksanaan tata laksana organisasi	Laporan	1	1	5	1
3. Pengelolaan jabatan fungsional pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan	1	1	5	1
RO: Layanan Umum	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan layanan kerumahtanggan	Laporan	2	4	11	4
2. Jumlah laporan pelaksana tata kelola TNDE dan arsip	Laporan	1	1	5	1
RO: Layanan Bantuan Hukum	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan pelaksanaan advokasi dan pendampingan hukum	Laporan	1	1	5	1
RO: Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan gaji dan tunjangan DJPI	Laporan	1	1	5	1
2. Jumlah layanan operasionalisasi kantor DJPI	Laporan	1	1	5	1
KRO : Layanan Sarana dan Prasarana Internal					
RO: Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	5	1
1. Jumlah pengadaan fasilitas perkantoran	Unit	0	0	4	0
2. Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Unit	1	1	5	1
KRO: Layanan Manajemen SDM Internal					
RO: Layanan manajemen SDM	Orang	272	272	1864	272
1. Jumlah laporan pelaksanaan tata kelola pegawai	Orang	272	272	1864	272
KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal					
RO: Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	1	1	1
1. Jumlah laporan penyusunan rencana kerja dan anggaran	Laporan	1	1	1	1
2. Jumlah laporan pelaksanaan administrasi anggaran dan perbendaharaan	Laporan	3	3	3	3
RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan penyusunan laporan kinerja	Laporan	1	1	5	1

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	2025		TOTAL RENSTRA	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
2. Jumlah laporan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi	Laporan	2	2	9	2
RO: Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	1	5	1
1. Jumlah laporan keuangan	Laporan	3	3	11	3
2. Jumlah laporan penyusunan rencana kerja dan anggaran	Laporan	0	0	4	0
3. Jumlah laporan pelaksanaan administrasi anggaran dan perbendaharaan	Laporan	0	0	12	0
RO: Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dokumen	0	0	4	0

Sumber: Olah Data, 2025

Capaian output dibandingkan target jangka menengah masih sangat rendah mengingat tahun 2025 masih tahun pertama pada periode Rencana Strategis. Capaian ini akan terus meningkat di tahun berikutnya.

3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan standar nasional (*benchmarking*) menggunakan unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024. Perbandingan kedua unit kerja tersebut dengan mempertimbangkan adanya beberapa kesamaan diantaranya berupa skala unit organisasi yang mirip dimana kedua unit organisasi merupakan unit kerja eselon II, memiliki 1 Sasaran Program yang sama. Adapun perbandingan realisasi kinerja antara kedua unit kerja disampaikan pada tabel 3.6 berikut.

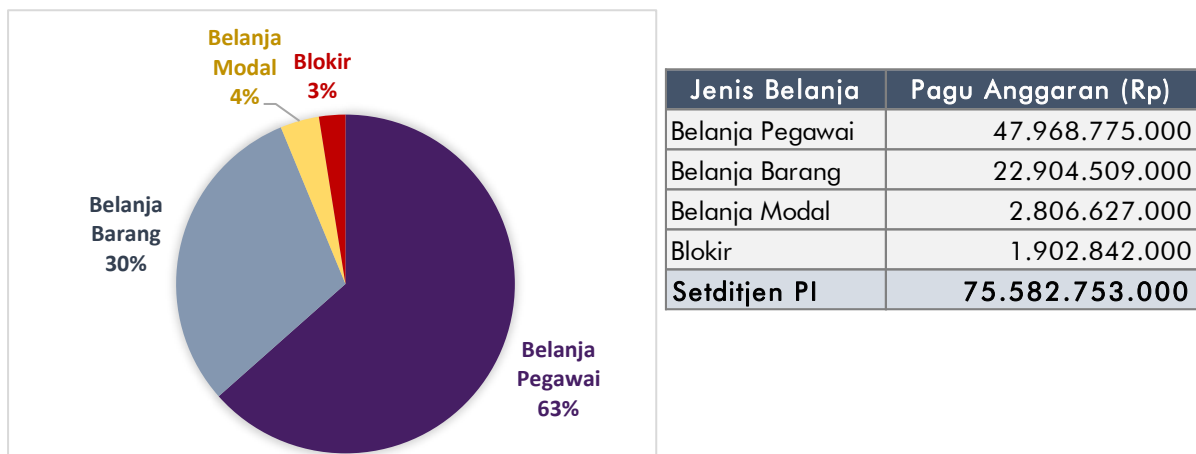
Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025 dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2024

Sekretariat DJPI Tahun 2025			Sekretariat DJBM Tahun 2024		
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)			SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)			IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)			SK. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan jalan		
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal	84,72%	93,21%	IKK. Tingkat Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN & Umum	100,00%	99,96%

Berdasarkan gambar 3.4, terdapat 5 kali perubahan pagu anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA ke-1, pada tanggal 21 Februari 2025 dimana tidak terdapat perubahan total anggaran, namun terdapat perubahan anggaran blokir menjadi Rp15.290.590.000,00 untuk efisiensi tahun anggaran 2025;
2. Revisi DIPA ke-2, pada tanggal 23 Maret 2025. Terjadi perubahan pagu anggaran menjadi Rp69.692.034.000,00 untuk penambahan anggaran dari buka blokir untuk belanja pegawai, belanja operasional/layanan perkantoran dan belanja lainnya (belanja barang). Anggaran blokir pasca revisi DIPA ke-2 menjadi Rp3.141.292.000,00;
3. Revisi DIPA ke-3, tanggal 25 April 2025. Terdapat penambahan anggaran belanja pegawai menjadi Rp45.102.177.000,00, penurunan anggaran belanja barang dan pergeseran anggaran antar kegiatan menjadi Rp24.573.014.000,00 dan penurunan anggaran belanja modal menjadi Rp180.000.000,00 sehingga total pagu sebesar Rp69.855.191.000,00 dengan blokir anggaran sebesar Rp3.085.915.000,00. Pada revisi ini juga dilaksanakan untuk perubahan Halaman III DIPA;
4. Revisi DIPA ke-4, tanggal 16 Juli 2025. Terdapat perubahan anggaran belanja barang operasional yang mempengaruhi pagu anggaran total menjadi Rp69.779.268.000,00. pada revisi DIPA ke-4 dilaksanakan untuk pemutakhiran RPD;
5. Revisi DIPA ke-5, tanggal 4 Agustus 2025. Tidak terdapat perubahan pagu anggaran dan blokir pada revisi ini. Revisi ini mengakomodir penambahan dan pengurangan RO di lingkungan DJPI;
6. Revisi DIPA ke-6, tanggal 22 Oktober 2025. Pada revisi ini dilakukan buka blokir anggaran untuk penambahan anggaran belanja pegawai menjadi Rp47.968.775.000,00 mengakomodir kekurangan gaji dan tunjangan kinerja CPNS dan PPPK dan penambahan belanja modal untuk pengadaan TIK menjadikan pagu belanja modal menjadi Rp2.421.000.000,00. Karena ada buka blokir, anggaran blokir menjadi Rp1.902.842.000,00;
7. Revisi DIPA ke-7, tanggal 14 November 2025. Pada revisi ini dilakukan penambahan anggaran belanja barang untuk pengembangan pegawai dan belanja modal untuk pengadaan TIK. Total pagu menjadi Rp75.602.833.000,00. Pasca Revisi DIPA ke-7, dilakukan Revisi POK ke-3 yang menyebabkan perubahan pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menjadi Rp75.582.753.000,00 (tujuh puluh lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan anggaran blokir sebesar Rp1.902.842.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah). Perubahan anggaran pada revisi POK ke-3 dikarenakan perubahan anggaran belanja operasional unit kerja pada layanan perkantoran. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tanpa blokir (efektif) sebesar Rp73.679.911.000,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Adapun proporsi anggaran berdasarkan jenis belanja ditampilkan pada Gambar 3.5.

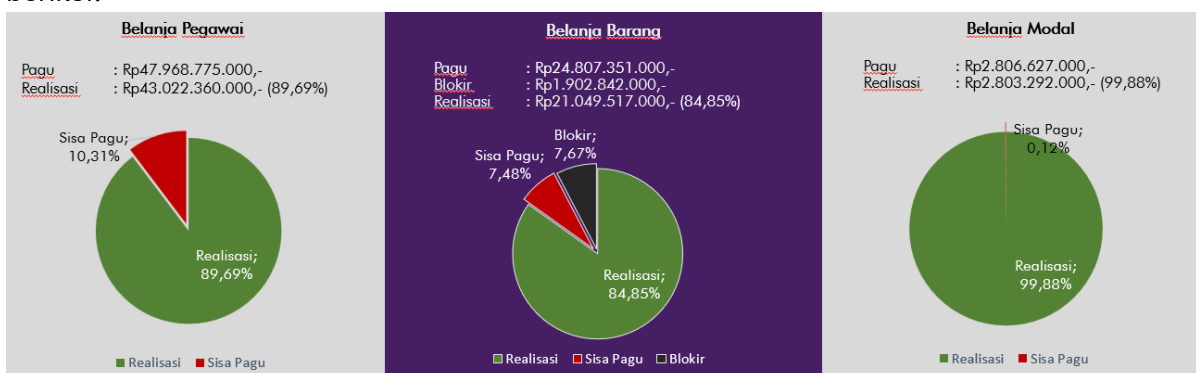


Gambar 3.5
Proporsi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Sumber: Olah Data iemonitoring PU, 2025

Proporsi anggaran terbesar pada belanja pegawai mencapai 63% dari total pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Blokir anggaran seluruhnya pada belanja barang dan pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas. Dengan adanya blokir anggaran, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada SE No 3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pola Kerja Baru Dalam Rangka Efisiensi Belanja di Kementerian PU.

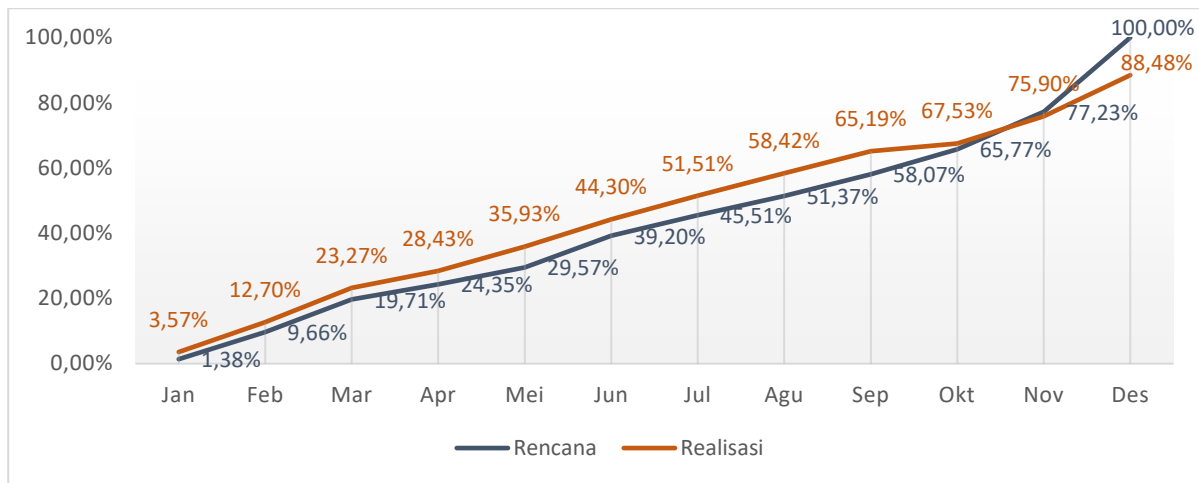
3.4.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan iemonitoring PU tanggal 9 Januari 2025 pukul 08.00 WIB, realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar Rp66.875.168.000,00 (Enam puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 88,48% terhadap pagu DIPA dan 90,76% terhadap pagu efektif. Adapun realisasi per jenis belanja ditampilkan pada Gambar 3.6. berikut.



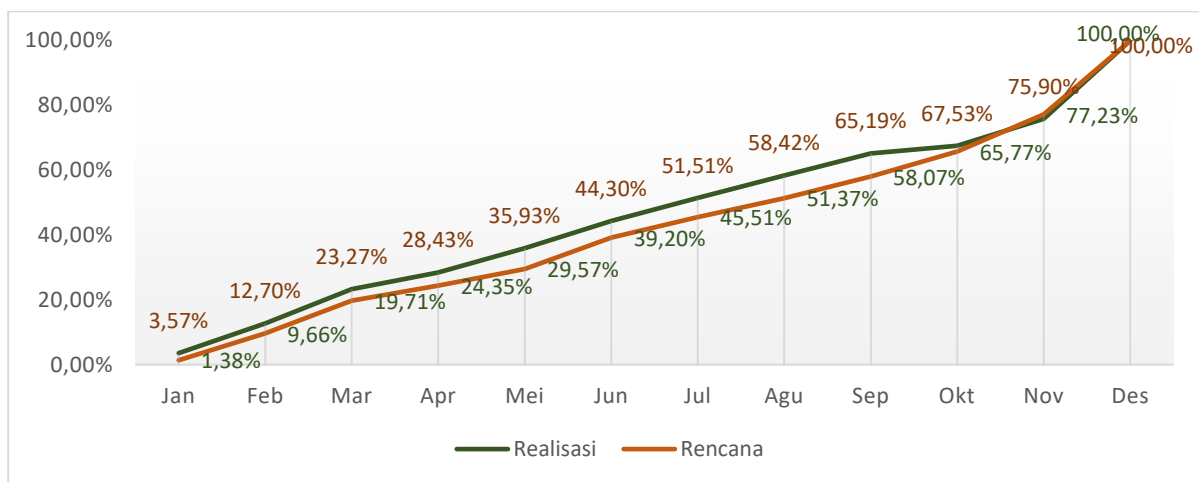
Gambar 3.6
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Sumber: Olah Data iemonitoring PU, 9 Januari 2025 pukul 08.00 WIB

Adapun grafik realisasi keuangan dan fisik ditampilkan pada gambar 3.7 dan 3.8 berikut.



Gambar 3.7
Kurva S Realisasi Keuangan Tahun 2025

Sumber: Olah Data iemonitoring PU, 5 Januari 2025 pukul 08.00 WIB



Gambar 3.8
Kurva S Realisasi Fisik Tahun 2025

Sumber: Olah Data iemonitoring PU, 5 Januari 2025 pukul 08.00 WIB

Gambar 3.7 menunjukkan kurva S persentase realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025. Dengan realisasi sebesar Rp66.875.168.000,00 di Bulan Desember, maka deviasi terhadap rencana pagu DIPA sebesar -11,52% dan terhadap prognosis sebesar -9,24%. Deviasi pagu DIPA dikarenakan terdapat blokir anggaran sebesar Rp1.902.842.000,00. Selain itu, terdapat beberapa kendala dalam realisasi anggaran di tahun 2025 sebagai berikut:

Belanja Pegawai

1. Kondisi Internal

- a. Penambahan anggaran belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK pada triwulan II tahun 2025;
- b. Satuan Kerja belum secara optimal mampu memperkirakan dampak perubahan kebijakan perpajakan dengan penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sehingga terdapat kelebihan alokasi anggaran Belanja Tunjangan PPh PNS;
- c. Mutasi pegawai keluar dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sepanjang tahun anggaran berjalan, terdapat 30 (tiga puluh) orang pegawai mutasi keluar Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum ke Unit Organisasi lain dan ke Instansi lain. Kondisi tersebut secara langsung mengurangi kebutuhan riil pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan kinerja;

- d. Terdapat 7 (tujuh) orang pegawai yang memasuki masa purnabakti, 6 (enam) orang diantaranya pensiun di semester I 2025. Selain itu, terdapat 2 (dua) orang pegawai yang diberhentikan dari jabatannya sebagai PNS dan PPPK di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.
 - e. Terdapat pegawai yang tidak dibayarkan tunjangan kinerjanya sejak Oktober 2025 dikarenakan tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 an. Ahmad Muhajir.
2. Kondisi Eksternal
- a. Sebagaimana arahan Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana terkait tambahan alokasi belanja pegawai, untuk PPPK dialokasikan 81 (delapan puluh satu) orang PPPK namun terkontrak sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang dan 91 (sembilan puluh satu) orang CPNS namun dalam realisasinya jumlah pegawai yang benar-benar diterima dan dibayarkan gajinya hanya 47 (empat puluh tujuh) orang CPNS;
 - b. Pengalokasian tunjangan fungsional yang belum dapat direalisasikan, hal ini disebabkan antara lain karena SKP belum disusun sehingga proses kenaikan JF belum bisa diproses dan dalam komponen Belanja Pegawai telah dialokasikan anggaran untuk Tunjangan Fungsional bagi PNS dengan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Namun sampai dengan saat ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian tunjangan dimaksud belum ditetapkan, sehingga anggaran tersebut belum dapat direalisasikan demikian juga dengan alokasi Tunjangan Fungsional bagi CPNS;
 - c. perhitungan tambahan gaji dan tunjangan dengan skema maksimal dimana jumlah pegawai dihitung masing-masing dengan tunjangan istri/suami dan 2 (dua) orang anak sebagaimana arahan dari Biro PAKLN.

Belanja Barang

1. Blokir anggaran menyebabkan perlunya strategi dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No.3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pola Kerja Baru Dalam Rangka Efisiensi Belanja di Kementerian PU;
2. Penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan;
3. Penambahan anggaran untuk pelaksanaan dan *surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyusutan (SMAP) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
4. Terdapat sisa anggaran pada Paket Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/Satpam/Sopir karena Sisa lelang tidak dapat dimanfaatkan;
5. Penambahan anggaran sebesar Rp778.040.000,00 untuk kegiatan Pendampingan Pelelangan Kerjasama Pemanfaatan Wisma Werdhapura pada Revisi DIPA ke-3 tanggal 25 April 2025. Selain itu, pada revisi DIPA ke-3 juga dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan, antar KRO/RO dan perubahan target RO berupa :
 - Pengurangan RO Layanan Sarana Internal (7764.EBB.951) sebanyak 1 Unit karena efisiensi pada Pengadaan fasilitas perkantoran;
 - Pengurangan RO Layanan Prasarana Internal (7764.EBB.971) sebanyak 2 Unit karena efisiensi pada Renovasi Gedung dan Bangunan dan Revitalisasi Sistem Jaringan Data;
 - Pengurangan RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran (7764.EBD.952) sebanyak 1 Dokumen karena penghapusan paket pekerjaan Fasilitas Koordinasi Pelaksanaan P3DN dan TKDN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA 2025 yang disebabkan oleh menurunnya anggaran pengadaan barang dan jasa yang memerlukan ijin impor; dan

- Pengurangan RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi (7764.EBD.953) sebanyak 1 Dokumen karena penghapusan paket pekerjaan Fasilitas Dukungan KPBU TA. 2024 yang digunakan untuk memfasilitasi undangan dari unit kerja pengampu KPBU di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.
6. Pergeseran Antar Kegiatan antar KRO pada revisi DIPA 7 yang menyebabkan pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum bertambah dengan rincian berikut :
- Penambahan pagu KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (7764.EBA) Sebesar Rp410.640.000,00 untuk paket kegiatan Fasilitas Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penatausahaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) serta Arsip Aktif dan Inaktif Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Pelaksanaan Tata Laksana Organisasi, Pengelolaan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Dukungan Media Penyebaran Informasi;
 - Penambahan pagu KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal (7764.EBB) sebesar Rp385.627.000,00 untuk pembelian Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) TA 2025;
 - Penambahan pagu KRO Layanan Manajemen SDM Internal (7764.EBC) sebesar Rp68.805.000,00 untuk paket kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU; dan
 - Penambahan pagu KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal (7764.EBD) sebesar Rp233.220.000,00 untuk paket kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA. 2026 dan Penyusunan Laporan Manajemen Risiko.

Belanja Modal

1. Penambahan anggaran untuk belanja meubelair pimpinan dan pengadaan perangkat data dan komunikasi pada triwulan 4 tahun 2025 sehingga diperlukan strategi realisasi sebelum akhir tahun 2025.

Adapun rincian realisasi anggaran pada setiap KRO dan RO berdasarkan data pemantauan PU tanggal 9 Januari 2026 ditampilkan pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2025 per KRO dan RO

Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Blokir	Realisasi	Keuangan (%)		Fisik (%)		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL	Kinerja
Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)			78.125.339	1.902.842	68.380.950	100	87,53	100	100	100
Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan/Laporan /Dokumen	71.323.118	1.669.797	62.884.331	100	88,17	100	100	100
Layanan BMN	1	Layanan/Laporan /Dokumen	122.983	76.602	40.172	100	32,66	100	100	100
Layanan Hukum	1	Layanan/Laporan /Dokumen	303.026	110.035	189.374	100	62,49	100	100	100
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan/Laporan /Dokumen	413.902	55.194	355.776	100	85,96	100	100	100
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan/Laporan /Dokumen	564.296	135.515	426.307	100	75,55	100	100	100

Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Blokir	Realisasi	Keuangan (%)		Fisik (%)		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL	Kinerja
Layanan Umum	1	Layanan/Laporan /Dokumen	1.260.325	56.991	1.163.446	100	92,31	100	100	100
Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan/Laporan /Dokumen	43.103	11.895	27.507	100	63,82	100	100	100
Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan /Dokumen	68.615.483	1.223.565	60.681.749	100	88,44	100	100	100
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	93	Unit/m2/Paket	2.806.627	0	2.803.292	100	99,88	100	100	100
Layanan Sarana Internal	93	Unit/m2/Paket	2.806.627	0	2.803.292	100	99,88	100	100	100
Layanan Manajemen SDM Internal	272	Orang/Layanan	318.428	114.350	196.889	100	61,83	100	100	100
Layanan Manajemen SDM	272	Orang/Layanan	318.428	114.350	196.889	100	61,83	100	100	100
Layanan Manajemen Kinerja Internal	8	Layanan/Laporan /Dokumen	1.134.580	118.695	990.657	100	87,31	100	100	100
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3	Layanan/Laporan /Dokumen	472.031	57.061	414.405	100	87,79	100	100	100
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	Layanan/Laporan /Dokumen	237.325	0	237.044	100	99,88	100	100	100
Layanan Manajemen Keuangan	3	Layanan/Laporan /Dokumen	425.224	61.634	339.209	100	79,77	100	100	100

Sumber: iemonitoring PU 9 Januari 2025 pukul 08.00 WIB

Berdasarkan tabel 3.7, kinerja fisik pada seluruh KRO dan RO di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah 100%. Target keuangan pada iemonitoring PU secara keseluruhan 100%. Dengan adanya blokir anggaran, realisasi keuangan tidak akan mencapai 100%.

3.4.3. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Total anggaran tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Perbedaan anggaran ini terlihat jelas dipengaruhi oleh adanya pengurangan belanja pegawai karena pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, adanya kebijakan efisiensi di tahun anggaran 2025 juga mempengaruhi strategi pelaksanaan kegiatan dan prioritas pekerjaan. Adapun perbedaan realisasi anggaran sebagai berikut.

Tabel 3.8
Perbedaan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024

Jenis Belanja	2024				2025			
	Pagu	Blokir	Realisasi		Pagu	Blokir	Realisasi	
	Rp Ribu	Rp Ribu	Rp Ribu	%	Rp Ribu	Rp Ribu	Rp Ribu	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(6)
Belanja Pegawai	50.905.326	0	47.450.911	93,21	47.968.775	0	43.022.360	89,69
Belanja Barang	31.772.581	97.615	31.422.618	98,90	24.807.351	1.902.842	21.049.517	84,85
- Operasional	23.660.000	73.111	23.456.425	99,14	20.646.708	1.223.565	17.659.389	85,53
- Non Operasional	8.112.581	24.504	7.966.193	98,20	4.160.643	679.277	3.390.128	81,48
Belanja Modal	3.166.799	0	3.123.245	98,62	2.806.627	0	2.803.292	99,88
Total	85.844.706	97.615	81.996.774	95,52	75.582.753	1.902.842	66.875.169	88,48

Sumber: iemonitoring PU 5 Januari 2025 pukul 08.00 WIB

Berdasarkan pada tabel 3.8, pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024. Selain itu, persentase realisasi pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah blokir anggaran pada tahun 2024 yang lebih kecil sebesar Rp97.615.000,00 sedangkan pada tahun 2025, jumlah blokir sebesar Rp1.902.842.000,00. Persentase realisasi tanpa blokir tahun 2024 sebesar 95,63% sedangkan pada tahun 2025 sebesar 90,76%. Hanya belanja modal yang secara persentase realisasi pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Realisasi anggaran tahun 2025 dipengaruhi adanya perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dan belanja sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No.3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pola Kerja Baru Dalam Rangka Efisiensi Belanja di Kementerian Pekerjaan Umum.

3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Jumlah sumber daya manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025 adalah 124 pegawai. Jumlah sarana dan prasarana Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada tahun 2025 sebanyak 1.281 unit. Sedangkan jumlah anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp75.582.753.000,00. Adapun perbandingan sumber daya tahun 2025 dengan tahun 2024 ditampilkan pada Tabel 3.9. berikut.

Tabel 3.9
Sumber Daya dan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber Daya	2024	2025
Sumber Daya Manusia (orang)	126 pegawai	124 pegawai
Sarana dan Prasarana (Unit)	845 unit	1.281 unit
Anggaran (Rp)	Rp85.844.706.000,00	Rp75.582.753.000,00
Kinerja Capaian (%)	100,59%	110,02%

Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2024 dan olah data Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 2025

Berdasarkan tabel 3.9, terdapat penurunan jumlah pegawai dan anggaran namun terdapat penambahan jumlah sarana dan prasarana. Terdapat efisiensi pagu anggaran sebesar 11,95% dibandingkan anggaran tahun 2024. Walau terdapat penurunan sumber daya di tahun 2025, persentase kinerja capaian tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa walau sumber daya manusia dan anggaran berkurang

namun Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tetap mengalami peningkatan kinerja. Selain terhadap tahun 2024, efisiensi selama tahun 2025 terlihat dari jumlah sisa anggaran efektif sebesar Rp6.804.743.000,00 (9,00% terhadap pagu DIPA) dimana capaian output dan capaian fisik tahun 2025 sebesar 100,00%. Capaian keuangan berdasarkan pada persentase realisasi terhadap pagu DIPA. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2025 pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

Program/Kegiatan/ KRO/RO	Target DIPA	Capaian	Satuan	Capaian Keuangan Terhadap Pagu DIPA (%)	Capaian Keuangan Terhadap Pagu Efektif (%)	Capaian Fisik (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)
Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)				87,53	90,88	100	114,25
Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	7	Layanan/Laporan /Dokumen	88,17	90,42	100	113,42
Layanan BMN	1	1	Layanan	32,66	96,61	100	306,18
Layanan Hukum	1	1	Layanan	62,49	98,13	100	160,03
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	1	Layanan	85,96	99,18	100	116,33
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	1	Layanan	75,55	99,42	100	132,36
Layanan Umum	1	1	Layanan	92,31	96,69	100	108,33
Layanan Bantuan Hukum	1	1	Layanan	63,82	88,14	100	156,69
Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	88,44	90,19	100	113,07
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	93	93	Unit/m2/Paket	99,88	99,88	100	100,12
Layanan Sarana Internal	93	93	Unit/m2/Paket	99,88	99,88	100	100,12
Layanan Manajemen SDM Internal	272	272	Orang/Layanan	61,83	96,48	100	161,73
Layanan Manajemen SDM	272	272	Orang/Layanan	61,83	96,48	100	161,73
Layanan Manajemen Kinerja Internal	8	8	Dokumen/Layanan /Laporan	87,31	97,52	100	114,53
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3	3	Dokumen	87,79	99,86	100	113,91
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	2	Dokumen	99,88	99,88	100	100,12
Layanan Manajemen Keuangan	3	4	Dokumen	79,77	93,29	100	125,36

Sumber: Olah Data iemonitoring PU 9 Januari 2025 pukul 08.00 WIB

Berdasarkan tabel 3.10, nilai efisiensi tahun 2025 adalah 114,25% dimana pada setiap RO di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum seluruhnya

diatas 100. Efisiensi tertinggi pada RO Layanan BMN dimana nilai efisiensi mencapai 306,18. Efisiensi penggunaan sumber daya dihitung terhadap persentase realisasi DIPA dengan mempertimbangkan ketercapaian output yang dihasilkan didalam kondisi anggaran yang terblokir, berdasarkan capaian output yang dihasilkan, terlihat bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tetap tercapai output walau terdapat blokir anggaran dan efisiensi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum telah mencapai target kinerja tahun 2025 sesuai yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025 adalah 93,21% dibandingkan target tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategi sebesar 84,27%. Keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan merupakan bentuk komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian organisasi. Adapun capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum ditampilkan pada tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan/ IKK	Jenis Indikator/Komposit	Target PK	Target Renstra	Capaian	Kinerja
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI) (7764 Kegiatan 1. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum)					
IKK.1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)		84,72%	84,72%	93,21%	110,02%

Sumber: Olah Data, 2025

Secara total, capaian kinerja Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025 tidak lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dimana capaian tahun 2024 sebesar 100,59%. Namun kinerja (capaian dibandingkan dengan target) tahun 2025 sebesar 110,02% lebih tinggi daripada kinerja tahun 2024 sebesar 100,59%. Hal-hal yang mendukung capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025 adalah:

1. Unit bagian yang mendukung di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum terdiri dari 3 bagian yaitu (1) Bagian Perencanaan, Anggaran dan keuangan, (2) Bagian Kepegawaian dan Umum, dan (3) Bagian Hukum dan Komunikasi Publik;
2. Sumber daya yang mendukung pencapaian output dan outcome tahun 2025 terdiri dari:
 - a. Sumber daya manusia sebanyak 124 pegawai yang terdiri dari 5 orang pejabat struktural, 60 orang jabatan fungsional tertentu, 48 orang jabatan fungsional umum, 1 pegawai karyawan dan 10 orang tenaga pendukung individual;
 - b. Sarana dan prasarana sejumlah 1.281 unit; dan
 - c. Anggaran sebesar Rp75.582.753.000,00.
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan tindak lanjut rekomendasi evaluator pada hasil evaluasi AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2024;
4. Realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Rp66.875.168.000,00 (Enam puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 88,48% terhadap pagu DIPA dan 90,76% terhadap pagu efektif. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp1.902.842.000,00. Realisasi per jenis belanja sebagai berikut.

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	2025					
	Pagu DIPA	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi		
	Rp Ribu	Rp Ribu	Rp Ribu	Rp Ribu	% Pagu DIPA	% Pagu Efektif
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(4)
Belanja Pegawai	47.968.775	0	47.968.775	43.022.360	89,69	89,69
Belanja Barang	24.807.351	1.902.842	22.904.509	21.049.517	84,85	91,90
- Operasional	20.646.708	1.223.565	19.423.143	17.659.389	85,53	90,92
- Non Operasional	4.160.643	679.277	3.481.366	3.390.128	81,48	97,37
Belanja Modal	2.806.627	0	2.806.627	2.803.292	99,88	99,88
Total	75.582.753	1.902.842	73.679.911	66.875.169	88,48	90,76

Sumber: iemonitoring PU tanggal 5 Januari 2025 pukul 08.00 WIB

Realisasi keuangan berdasarkan KRO tahun 2025 ditampilkan pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Realisasi Anggaran per KRO

Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Blokir	Realisasi	Keuangan (%)		Fisik (%)		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL	Kinerja
Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)			78.125.339	1.902.842	68.380.950	100	87,53	100	100	100
Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan/Laporan /Dokumen	71.323.118	1.669.797	62.884.331	100	88,17	100	100	100
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	93	Unit/m2/Paket	2.806.627	0	2.803.292	100	99,88	100	100	100
Layanan Manajemen SDM Internal	272	Orang/Layanan	318.428	114.350	196.889	100	61,83	100	100	100
Layanan Manajemen Kinerja Internal	8	Layanan/Laporan /Dokumen	1.134.580	118.695	990.657	100	87,31	100	100	100

Sumber: iemonitoring PU tanggal 5 Januari 2025 pukul 08.00 WIB

- Nilai efisiensi tahun 2025 adalah 114,25% dimana pada setiap RO di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum seluruhnya diatas 100. Efisiensi penggunaan sumber daya dihitung terhadap persentase realisasi DIPA dengan mempertimbangkan ketercapaian output yang dihasilkan didalam kondisi anggaran yang terblokir.

4.2 Faktor Pendukung Keberhasilan

Selama tahun anggaran 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum telah mengalami 6 kali perubahan anggaran untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah:

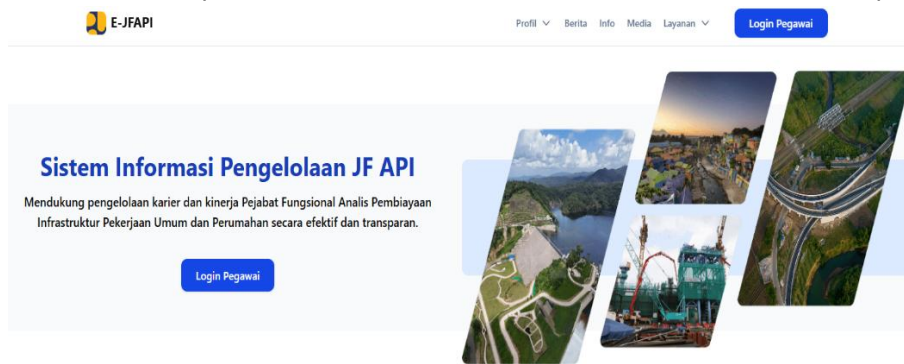
Faktor Eksternal

- Kerjasama dari seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan dan layanan dukungan manajemen;

2. Perubahan metode perhitungan pada penilaian transformasi digital tingkat unit kerja yang mempengaruhi nilai transformasi digital Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Faktor Internal

1. Komitmen dari tingkat pimpinan hingga staf dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;
2. Penerapan SOP (*Standart Operating Procedures*) dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
3. Pelaksanaan monitoring berkala sebagai bentuk pereventif terhadap kendala dan permasalahan yang terjadi;
4. Pengembangan aplikasi berbasis web dalam mendukung pencapaian kinerja dan output organisasi. Adapun beberapa aplikasi berbasis web yang disusun di tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Aplikasi E-JFAPI, merupakan Sistem Informasi Pengelolaan JF API yang disusun untuk mendukung pengelolaan karier dan kinerja Pejabat Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan secara efektif dan transparan.



Gambar 4.1
Halaman Depan Aplikasi E-JFAPI

Sumber: Diolah dari aplikasi E-JFAPI

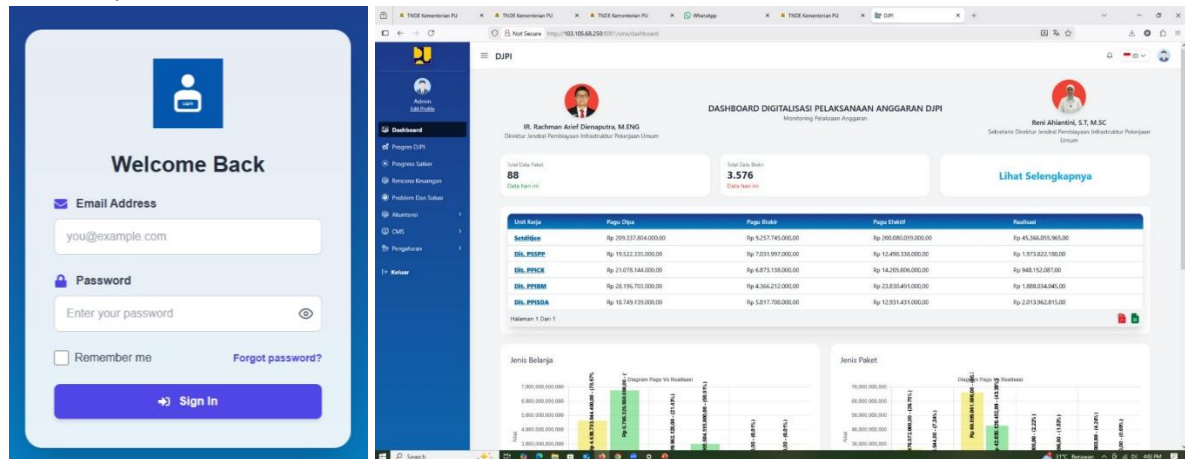
- b. Aplikasi SIDIA DJPI (Sistem Informasi Digitalisasi Inventarisasi Aset Data BMN), merupakan dashboard yang dirancang khusus untuk menghadirkan pengelolaan BMN bagi Unit Kerja di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Berbeda dari aplikasi SIMAN yang berfokus pada pencatatan administratif skala Unit Organisasi dan regulasi aset negara, SIDIA memberikan data yang ringkas, intuitif, dan langsung tiap-tiap Unit Kerja di DJPI sehingga siap digunakan analisis cepat, serta pengambilan keputusan harian.



Gambar 4.2
Halaman Depan Aplikasi SIDIA-DJPI
Sumber: Diolah dari aplikasi SIDIA-DJPI

- c. Aplikasi DIMonev DJPI (Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi DJPI), merupakan bentuk digitalisasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran yang diharapkan bermanfaat untuk menunjukkan monitoring dan evaluasi anggaran bisa berjalan efektif, dengan data realisasi dan rencana yang dapat diakses secara real-time hingga per unit kerja dan direkap per minggu. Aplikasi ini memberikan kesempatan kepada

Unit kerja untuk mengintegrasikan data rencana terbaru dengan menyampaikan pada aplikasi.

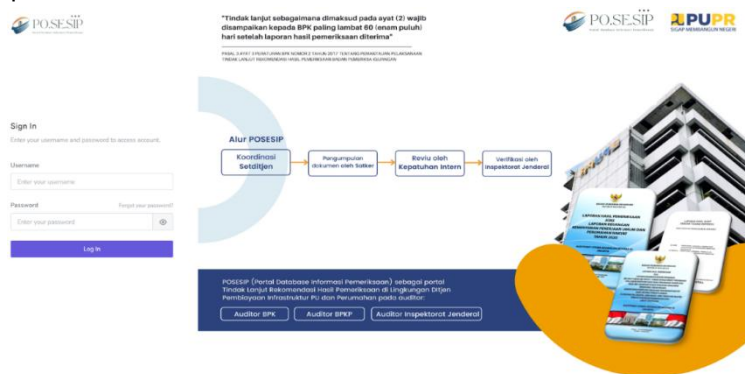


Gambar 4.3

Halaman Depan Aplikasi DIMonev DJPI

Sumber: Diolah dari aplikasi DIMonev DJPI

- d. Aplikasi POSESIP, Portal Database Informasi Pemeriksaan (POSESIP) merupakan suatu sistem informasi untuk monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan yang digunakan oleh Internal DJPI dalam rangka melakukan fungsi penatausahaan dan pemantauan tindak lanjut.



Gambar 4.4

Halaman Depan Aplikasi POSESIP

Sumber: Diolah dari aplikasi DIMonev DJPI

5. Beberapa penghargaan yang diterima oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2025 sebagai berikut :
- a. Telah berhasil mempertahankan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 sesuai Hasil Audit Eksternal Tanpa Temuan Mayor dan Minor



Gambar 4.5

Surveillance SMAP

Sumber: Dokumentasi Sekretariat Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, 2025

- b. Nilai IPA (Indeks Penilaian Aset) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum per 20 Oktober 2025 adalah 3,13 (peringkat 1 di Kementerian Pekerjaan Umum);
- c. Juara 3 Kategori Penataan Arsip Terbaik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025.



Gambar 4.6

Penghargaan Pentaan Arsip Terbaik

Sumber: Dokumentasi Sekretariat Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, 2025

4.3 Permasalahan

Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebagai berikut:

1. Blokir anggaran mempengaruhi pelaksanaan kegiatan seperti penyesuaian perjalanan dinas, efisiensi belanja bahan dan perubahan strategi pelaksanaan kegiatan;
2. Penginputan RKA-KL TA 2026 untuk KRO RO baru ke dalam SAKTI terkendala karena proses sinkronisasi RENJA antara lain penambahan RO MR dan SAKIP sudah disetujui oleh BAPPENAS namun belum di approve oleh Kementerian Keuangan dengan alasan sudah mendekati batas tenggat waktu penyusunan RKA-KL TA 2026;
3. Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum baru terbit di Triwulan 4 tahun 2025 menyebabkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum terbit pada Bulan Desember 2025. Hal ini memberikan dampak kepada :
 - Perhitungan capaian kinerja unit kerja belum dapat dilakukan berdasarkan rencana strategis dari Bulan Januari. Selain itu, perhitungan kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal berbeda dengan yang tercantum pada Rencana Strategis, sehingga diperlukan penyesuaian perhitungan capaian kinerja dan revisi Perjanjian Kinerja;
 - Penyusunan dan penilaian kinerja pegawai tidak sesuai dengan jadwal serta perlu penyesuaian sesuai dengan kondisi sebelum dan/atau sesudah Rencana Strategis;
 - Keterlambatan dalam penyusunan Profil Risiko Manajemen Risiko;
4. Adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU memberikan dampak berupa:
 - Penyesuaian pada beberapa produk hukum;
 - Perubahan pada peta lintas fungsi dan proses bisnis DJPI.
5. Pengelolaan BMN DJPI :
 - Proses Alih Status BMN DJPI masih berlanjut dikarenakan terdapat pemenuhan dokumen yang masih harus dilengkapi;

- Proses pendataan ulang Barang Milik Negara (BMN) DJPI karena perpindahan ruang kerja, alih status BMN DJPI ke Kementerian PKP dan alih status BMN ex Direktorat Jenderal Perumahan ke DJPI;
 - Pelaksanaan Lelang BMN peralatan dan mesin sebanyak 861 unit masih menunggu jadwal Lelang dari KPKNL.
6. Pelaksanaan Uji Kompetensi belum dapat dilakukan di Tahun 2025 dikarenakan persiapan pelaksanaan Uji Kompetensi melebihi waktu yang direncanakan dan adanya keterbatasan kuota pelaksanaan uji kompetensi di tahun 2025 oleh BPSDM.

4.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan kepada kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dan menghadapi beberapa kendala/permasalahan yang terjadi selama tahun anggaran 2025, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi dan tindak Lanjut berupa:

1. Melakukan dan terus meningkatkan fungsi pelayanan terhadap seluruh unsur di Direktorat Jenderal dengan baik;
2. Menerapkan budaya dialog kinerja antara pimpinan dan staf/pegawai sebagai wujud komunikasi dan komitmen terhadap pengelolaan kinerja dan kegiatan guna mencapai output sesuai dengan rencana;
3. Koordinasi dengan satuan kerja, unit kerja, unit organisasi dan/atau kementerian/Lembaga lainnya dalam memaksimalkan pencapaian kinerja;
4. Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada SE No 3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pola Kerja Baru Dalam Rangka Efisiensi Belanja di Kementerian PU;
5. Penyusunan profil risiko disusun mengacu pada kejadian di tahun 2024 dengan penyesuaian di tahun 2025;
6. Meningkatkan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kualitas kinerja dan efisiensi organisasi;
7. Review dan revisi dokumen perencanaan (Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja) sesuai dengan perubahan dan dinamika selama tahun berjalan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
8. Memaksimalkan penyelesaian dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
9. Merencanakan pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya sebaik mungkin dengan mengacu pada pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun berjalan/sebelumnya;
10. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun untuk meminimalisir adanya revisi selama pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Dokumen Perjanjian Kinerja
- LAMPIRAN 2 Bukti Dukung Capaian Kinerja
- LAMPIRAN 3 Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja
- LAMPIRAN 4 Penghargaan Dari Pihak Luar
- LAMPIRAN 5 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

LAMPIRAN 1

Dokumen Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Awal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reni Ahiantini
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rachman Arief Dienaputra
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua


RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Pihak Pertama


RENI AHANTINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
(1)	(2)
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
IKSP. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya (DJPI)	
SK. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	
IKK 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	15 %
IKK 2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15 %
IKK 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15 %
IKK 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15 %
IKK 5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	15 %
IKK 6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	15 %
IKK 7. Nilai SAKIP Unit Organisasi	10 %

Kegiatan:
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Anggaran
Rp 68.053.675.614,00

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 31 Januari 2025
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RENI AHANTINI

Perjanjian Kinerja Revisi Ke-1

	REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama : Reni Ahianti	
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama : Rachman Arief Dienaputra	
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
 RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA	Jakarta, 12 Agustus 2025  RENI AHianti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM		REVISI																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 70%;">SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR</th><th style="width: 30%;">TARGET</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</td></tr><tr><td style="text-align: center;">(1)</td><td style="text-align: center;">(2)</td></tr><tr><td colspan="2">SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</td></tr><tr><td colspan="2">IKSP. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya (DJPI)</td></tr><tr><td colspan="2">SK. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum</td></tr><tr><td>IKK 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan</td><td style="text-align: center;">15 %</td></tr><tr><td>IKK 2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum</td><td style="text-align: center;">15 %</td></tr><tr><td>IKK 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai</td><td style="text-align: center;">15 %</td></tr><tr><td>IKK 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran</td><td style="text-align: center;">15 %</td></tr><tr><td>IKK 5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran</td><td style="text-align: center;">15 %</td></tr><tr><td>IKK 6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik</td><td style="text-align: center;">15 %</td></tr><tr><td>IKK 7. Nilai SAKIP Unit Organisasi</td><td style="text-align: center;">10 %</td></tr></tbody></table>		SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		(1)	(2)	SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		IKSP. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya (DJPI)		SK. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		IKK 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	15 %	IKK 2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15 %	IKK 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15 %	IKK 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15 %	IKK 5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	15 %	IKK 6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	15 %	IKK 7. Nilai SAKIP Unit Organisasi	10 %	
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET																											
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN																												
(1)	(2)																											
SP. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya																												
IKSP. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya (DJPI)																												
SK. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum																												
IKK 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	15 %																											
IKK 2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15 %																											
IKK 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15 %																											
IKK 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15 %																											
IKK 5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	15 %																											
IKK 6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	15 %																											
IKK 7. Nilai SAKIP Unit Organisasi	10 %																											
Kegiatan: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		Anggaran Rp69.779.268.000,00																										
DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA		Jakarta, 12 Agustus 2025 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  RENI AHianti																										

Perjanjian Kinerja Revisi Ke-2

REVISI
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Reni Ahiantini Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Rachman Arief Dienaputra Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. 2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua  RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA Jakarta, 30 September 2025 Pihak Pertama  RENI AHANTINI

REVISI														
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: center;">SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR</th><th style="text-align: center;">TARGET</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</td><td></td></tr><tr><td style="text-align: center;">(1)</td><td style="text-align: center;">(2)</td></tr><tr><td>SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya</td><td></td></tr><tr><td>IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)</td><td></td></tr><tr><td>SK. Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)</td><td></td></tr><tr><td>IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum</td><td style="text-align: center;">84,72 %</td></tr></tbody></table> Kegiatan: Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Anggaran Rp69.779.268.000,00 DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA Jakarta, 30 September 2025 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  RENI AHANTINI	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		(1)	(2)	SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya		IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)		SK. Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)		IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	84,72 %
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET													
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN														
(1)	(2)													
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya														
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)														
SK. Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)														
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	84,72 %													

MANUAL INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (10%) 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (10%) 1. Layanan pengelolaan BMN yang dilakukan Indikator 3 (10%) 1. Layanan hukum yang dilakukan Indikator 4 (10%) 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 5 (10%) 1. Layanan keuangan yang dilakukan Indikator 6 (10%) 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 7 (10%) 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB Indikator 8 (10%) 1. Layanan komunikasi publik yang dilakukan Indikator 9 (10%) 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 10 (10%) 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM


RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Jakarta, 30 September 2025
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM


RENI AHANTINI

Perjanjian Kinerja Revisi Ke-3

	REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Reni Ahianti Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Rachman Arief Dienaputra Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: - Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. - Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua  RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA	Jakarta, 24 Desember 2025 Pihak Pertama  RENI AHIANI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025		REVISI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM		
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
(1)		(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)		
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)		
IKK 1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		84,72 %
Kegiatan: Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		Anggaran Rp75.582.753.000,00
DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA		Jakarta, 24 Desember 2025 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  RENI AHIANI

MANUAL INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja (DJPI)	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	CARA PENGUKURAN Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (10%) 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (10%) 1. Layanan pengelolaan BMN yang dilakukan Indikator 3 (10%) 1. Layanan hukum yang dilakukan Indikator 4 (10%) 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 5 (10%) 1. Layanan keuangan yang dilakukan Indikator 6 (10%) 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 7 (10%) 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPANRB Indikator 8 (10%) 1. Layanan komunikasi publik yang dilakukan Indikator 9 (10%) 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 10 (10%) 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM


RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

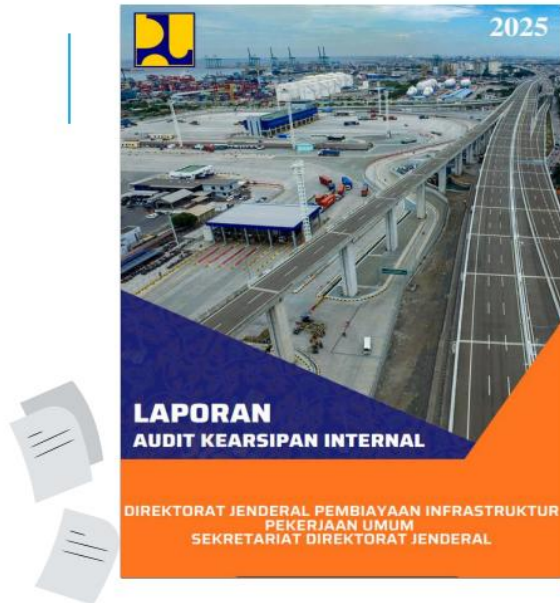
Jakarta, 24 Desember 2025
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM


RENI AHANTINI

LAMPIRAN 2

Bukti Dukung Capaian Kinerja

1. Nilai Pengawasan Kearsipan



HASIL PENILAIAN:

Adapun hasil penilaian untuk setiap aspek adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK/SUB ASPEK	Nilai Standar	Nilai	Bobot Sub Aspek	Nilai Sub Aspek	Bobot Aspek	Nilai Aspek
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	1100			75	60	45
	1.1. Subaspek Pengendalian Naskah	100	100	0,1	10		
	1.2. Subaspek Penggunaan	100	100	0,25	25		
	1.3. Subaspek Pemeliharaan	700	590	0,35	29,5		
	1.4. Subaspek Penyusutan	200	70	0,3	10,5		
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	500			70	0,4	28
	2.1. Subaspek SDM Kearsipan	300	120	0,5	20		
	2.2. Subaspek Prasarana dan Sarana Kearsipan	200	200	0,5	50		
		Total Nilai Standar/ Nilai/ Bobot Aspek/ Nilai Akhir				1	73
						BB (Sangat Baik)	

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12110, Telepon : (021) 72796124

Nomor : PR.0304-PR/121
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat
Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2024

Jakarta, 21 Maret 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan laporan tersebut disampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 10/KPTS/Dp/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024;
2. Surat Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: 18.3/SPT/Dp/2025 tanggal 14 Maret 2024 tentang Penugasan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

B. Tujuan Evaluasi

1. Mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat implementasi AKIP;
4. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
5. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP; dan
6. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang

memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

D. Uraian Hasil Evaluasi

1. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP, maka implementasi atas AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024 dapat dikategorikan **A** dalam pengertian bahwa **Memuaskan**, dengan pencapaian nilai **87,65%** dengan rincian per komponen:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2024 (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,20
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	87,65

Hasil implementasi AKIP pada tahun anggaran 2024 meningkat sebesar 1,65% apabila dibandingkan dengan hasil implementasi AKIP tahun anggaran 2023, berikut hasil implementasi AKIP tahun 2023:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2023 (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,20
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	86,00

2. Tidak tercapainya nilai maksimal dalam implementasi AKIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan disebabkan masih adanya kelemahan dalam komponen/subkomponen AKIP sebagai berikut:

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
1.	Perencanaan Kinerja	
	a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	Dokumen Renstra setditjen yang disampaikan belum ada tanggal dan

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
		bulan penetapan mendahului Renstra DJPI
	b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	Dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan tidak tepat waktu
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Indikator kinerja individu pada SKP telah selaras dengan kinerja organisasi karena telah mengacu pada perjanjian kinerja pimpinan tertinggi, telah mengacu pada tugas dan fungsi entitas, dan telah menggambarkan hubungan kausalitas. Namun belum terdapat pohon kinerja secara keseluruhan
2.	Pengukuran Kinerja	
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	Belum terdapat SOP Pengukuran dan Pengumpulan data kinerja
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang	Bukti administrasi berupa undangan, bahan tayang, dan notulen rapat terkait pembahasan capaian kinerja belum rutin dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Belum ada bukti keikutsertaan pimpinan dalam kegiatan monev capaian kinerja secara berkala serta verifikasi berjenjang dari Tim Pelaksana hingga pimpinan tertinggi
3.	Pelaporan Kinerja	
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	Laporan Monev Bulanan belum disampaikan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan SAKIP PUPR
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	Laporan Kinerja belum menyampaikan informasi terkait pencapaian Sasaran Strategis dan Sasaran Program

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Pelaksanaan pembahasan capaian kinerja tidak dilakukan secara berkala, yaitu hanya dilakukan pada bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	-
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	Tim Evaluator dalam surat tugas telah sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021. Direkomendasikan kepada DJPI untuk Menyusun Tim Evaluator Internal dalam surat tugas dengan standar minimal terdiri dari Penanggung jawab berasal dari Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama) dan Pengawas (supervisor) berasal dari Eselon III (Jabatan Administrator) atau Ahli Madya sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 02/SE/IJ/2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat namun masih ada yang belum memiliki sertifikat
	c. Implementasi AKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisien Kinerja.	Terdapat beberapa rekomendasi dari evaluasi AKIP Setditjen PI tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti pada tahun

E. Rekomendasi

No	Komponen	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	Menyampaikan dokumen perencanaan kinerja yang sesuai dengan hasil unggahan pada e-Sakip yang telah dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang

No	Komponen	Rekomendasi
		- Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja sesuai dengan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR - Menyampaikan bukti dukung terkait pohon kinerja secara keseluruhan pada Setditjen PI untuk menunjukkan kesinambungan antara indikator kinerja individu dan indikator kinerja organisasi
2.	Pengukuran Kinerja	- Menyusun SOP unit kerja terkait pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai panduan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan - Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti-bukti rapat pembahasan mengenai peningkatan Capaian Kinerja berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebagai bukti pendukung pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal - Melakukan pembahasan terkait monev capaian kinerja secara berkala dengan tertib administrasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku dengan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja yang dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>
3.	Pelaporan Kinerja	- Menyampaikan laporan monev berkala secara tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan SAKIP PUPR - Menyajikan segala informasi terkait capaian kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program dalam Laporan Kinerja secara relevan - Melakukan pemantauan secara berkala serta verifikasi secara berjenjang dari Tim Pelaksana hingga melibatkan pimpinan atas pengukuran kinerja dalam Laporan Monev berkala sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan SAKIP PUPR
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Menyusun tim Evaluator Internal dalam surat tugas dengan keanggotaan yang telah memiliki sertifikat bimtek SAKIP sesuai dengan Permen PUPR Nomor

No	Komponen	Rekomendasi
		09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR dan SE Itjen Nomor 02/SE/IJ/2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi di Kementerian PUPR • Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja unit kerja tahun sebelumnya, sehingga seluruh perbaikan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Pembiayaan,



Agus Sulaeman
NIP. 196808271997031002

Tembusan:
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

3. Nilai Transformasi Digital

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI Jalan Pemuda Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telpom (021) 7232300, Faksimile (021) 7220219 Nomor : PA 0101-Sd/1090 Sifat : Biasa Lampiran : Satu set Hal : Pembertitahuan Hasil Penilaian dan Predikat Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 Yth. Daftar Penerima Terlampir di Tempat Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan seluruh peserta dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025. Sehubungan dengan telah selesainya seluruh tahapan Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 telah dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh Unit Organisasi, Unit Kerja, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Balai melalui beberapa tahapan yaitu <i>Launching Technical Meeting</i>, Pengumpulan Bukti Dukung, Penilaian Tahap I, Penilaian Tahap II dan Pleno Penetapan Pemenuhan. 2. Rekap Hasil Penilaian dan Predikat Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 pada lingkup Unit Organisasi, Unit Kerja, dan Unit Pelaksana Teknis dapat diakses melalui tautan https://s.pu.go.id/NTM3/HasilPredikatTD2025 3. Segala keputusan hasil penilaian oleh Tim Penilai adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 4. Hasil Penilaian Transformasi Digital bertujuan membangun budaya kerja yang inovatif dan berbasis data di Kementerian Pekerjaan Umum dan diharapkan hasil Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 menjadi bahan evaluasi seluruh peserta dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Transformasi Digital. Selanjutnya dalam menunjang pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, PUSDATIN Kementerian PU berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan prima. Demikian...	Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi  Komang Sri Hartini Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian PU; 2. Inspektur Jenderal Kementerian PU; 3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air; 4. Direktur Jenderal Bina Marga; 5. Direktur Jenderal Cipta Karya; 6. Direktur Jenderal Prasarana Strategis; 7. Direktur Jenderal Bina Konstruksi; 8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; 9. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; 10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 11. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol.
--	--

REKAP PENILAIAN TRANSFORMASI DIGITAL TAHUN 2025				
PADA UNOR DAN UNKER DI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM				
NO	Unor/ Unker/UPT	Total Nilai 2025	Rangking Kategori Unor/Unker /UPT	Predikat
Unor				
1	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;	97,73	1	Sudah Transformasi Digital
Unker				
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum;	78,79	22	Sudah Transformasi Digital
2	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan;	95,95	3	Sudah Transformasi Digital
3	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;	83,00	12	Sudah Transformasi Digital
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga;	86,71	7	Sudah Transformasi Digital
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya.	97,00	2	Sudah Transformasi Digital
Predikat Unor				
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum:		Sudah Transformasi Digital		
Jumlah Predikat Unker				
Sudah Transformasi Digital :		5		
Proses Transformasi Digital :		0		
Belum Transformasi Digital :		0		

4. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
Jalan Pattimura No. 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7397727

Jakarta, 31 Juli 2025

Nomor : PW 0204 - DP / 117
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Ikhtisar Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan
Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2024 pada UPR T-2
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2024 pada Unit Pemilik Risiko T-2 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, berdasarkan laporan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Surat Inspektur Jenderal Nomor PW.0204-Ij/1686 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penyampaian Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko; dan
4. Surat Tugas Nomor: 50/SPT/Pk/2025 tanggal 28 Mei 2025.

B. Tujuan Evaluasi

1. Menilai apakah Proses Manajemen Risiko yang dilakukan oleh UPR telah berjalan efektif, efisien, sistemis, terstruktur, komprehensif, dan terintegrasi; dan
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri PUPR pada Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Surat Inspektur Jenderal Nomor: PW.0204-Ij/1686 Tanggal 30 Desember 2022 Hal Penyampaian Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilakukan atas penerapan Manajemen Risiko UPR selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.

D. Struktur Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko Tingkat 2 (UPR T-2)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: 76/KPTS/Dp/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: 18/KPTS/Dp/2024 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat...

No.	Nama UPR T-2	Struktur Manajemen UPR sesuai SK Tim MR TA 2024
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pemilik Risiko: Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Pengelola Risiko: Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan
2	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Pemilik Risiko: Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Pengelola Risiko: Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur
3	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Pemilik Risiko: Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Pengelola Risiko: Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Pemilik Risiko: Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pengelola Risiko: Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Pemilik Risiko: Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Pengelola Risiko: Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi

Keterangan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat perubahan nomenklatur untuk sebagian Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berubah menjadi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Setditjen PI);
2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (PSSPP) tidak mengalami perubahan nomenklatur;
3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) tidak mengalami perubahan nomenklatur;
4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan berubah menjadi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga (PPIBM); dan
5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman berubah menjadi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya (PPICK).

E. Ikhtisar Hasil Evaluasi

1. Kesimpulan Hasil Evaluasi atas **Komponen Infrastruktur Manajemen Risiko**
Telah dilakukan penilaian terhadap Komponen Infrastruktur Manajemen Risiko, hasil reviu dan survei tiap Subkomponen pada Komponen mempunyai nilai berbeda untuk tiap Unit Kerja, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Subkomponen	Unit Kerja				
		Setditjen PI	PSSPP	PPISDA	PPIBM	PPICK
Reviu Dokumen						
1	Nilai Budaya Sadar Risiko	100	90	90	90	100
2	Nilai Struktur Manajemen Risiko	90	100	100	70	100
3	Nilai Sistem Informasi Manajemen Risiko	100	50	50	100	100
4	Nilai Anggaran Penerapan Manajemen Risiko	100	100	50	50	100
Survei						
1	Nilai Survei Infrastruktur Manajemen Risiko	80,45	86,15	84,82	80,93	96,84

Hal yang menjadi catatan keseluruhan pada setiap Unit Kerja, yaitu:

- Setditjen PI: Aspek budaya sadar risiko, sistem informasi manajemen risiko, serta anggaran penerapan manajemen risiko telah optimal, namun masih terdapat catatan pada aspek struktur manajemen risiko yaitu tingkat partisipasi pegawai dalam *workshop* manajemen risiko baru mencapai 96%;
- Direktorat PSSPP: Aspek struktur manajemen risiko serta anggaran penerapan manajemen risiko telah optimal, namun masih terdapat catatan pada aspek budaya sadar risiko yaitu belum terdapat bukti konkrit penerapan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan serta aspek sistem informasi manajemen risiko yaitu belum seluruh pencatatan *Loss Event Database* terdapat pada aplikasi SIMR;
- Direktorat PPISDA: Aspek struktur manajemen risiko telah optimal, namun masih terdapat catatan pada aspek budaya sadar risiko yaitu belum terdapat bukti konkrit penerapan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan, aspek sistem informasi manajemen risiko yaitu belum seluruh pencatatan *Loss Event Database* terdapat pada aplikasi SIMR, serta aspek anggaran penerapan manajemen risiko yaitu Manajemen Risiko Organisasi belum dianggarkan secara eksplisit pada Rencana Kerja Anggaran;
- Direktorat PPIBM: Aspek sistem informasi manajemen risiko telah optimal, namun masih terdapat catatan pada aspek budaya sadar risiko yaitu belum terdapat bukti konkrit penerapan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan, aspek struktur manajemen risiko yaitu tingkat partisipasi pegawai dalam *workshop* manajemen risiko baru mencapai 88%; serta aspek anggaran penerapan manajemen risiko yaitu Manajemen Risiko Organisasi belum dianggarkan secara eksplisit pada Rencana Kerja Anggaran; dan
- Direktorat PPICK: Aspek budaya sadar risiko, struktur manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko, serta anggaran penerapan manajemen risiko telah optimal.

2. Kesimpulan Hasil Evaluasi atas **Komponen Proses Manajemen Risiko**

Telah dilakukan penilaian terhadap Komponen Proses Manajemen Risiko, hasil reviu dan survei tiap Subkomponen pada Komponen mempunyai nilai berbeda untuk tiap Unit Kerja, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Subkomponen	Unit Kerja				
		Setditjen PI	PSSPP	PPISDA	PPIBM	PPICK
Reviu Dokumen						
1	Nilai Komunikasi dan Konsultasi	75	75	75	75	100
2	Nilai Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria	80	80	60	80	80
3	Nilai Identifikasi Risiko	100	100	90	70	100
4	Nilai Analisis Risiko	100	100	100	100	100
5	Nilai Evaluasi Risiko	100	100	100	70	70
6	Nilai Respon Risiko	75	100	100	100	75
7	Nilai Pemantauan dan Tinjauan	100	100	100	100	100
8	Nilai Pencatatan dan Pelaporan	100	100	70	40	70
Survei						
1	Nilai Survei Proses Manajemen Risiko	83,62	84,42	85,23	80,72	96,76

Hal yang menjadi catatan keseluruhan pada setiap Unit Kerja yaitu:

- Setditjen PI: Aspek identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pemantauan dan tinjauan, serta pencatatan dan pelaporan telah optimal, namun masih terdapat catatan pada aspek komunikasi dan konsultasi yaitu rapat triwulanan belum dilaksanakan secara rutin dan tidak semua rapat triwulanan dipimpin oleh Pemilik/ Pengelola Risiko, aspek perumusan lingkup, konteks, dan kriteria yaitu penyusunan Profil Risiko melebihi batas waktu yang ditentukan, serta aspek respon risiko yaitu terdapat respon risiko yang belum tepat pada profil risiko;
- Direktorat PSSPP: Aspek identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respon risiko, pemantauan dan tinjauan, serta pencatatan dan pelaporan telah optimal, namun masih terdapat catatan pada aspek komunikasi dan konsultasi yaitu rapat triwulanan belum dilaksanakan secara rutin dan tidak semua rapat triwulanan dipimpin oleh Pemilik/ Pengelola Risiko, serta aspek perumusan lingkup, konteks, dan kriteria yaitu penyusunan Profil Risiko melebihi batas waktu yang ditentukan;
- Direktorat PPISDA: Aspek analisis risiko, evaluasi risiko, respon risiko, serta pemantauan dan tinjauan telah optimal, namun masih terdapat catatan pada aspek komunikasi dan konsultasi yaitu rapat triwulanan belum dilaksanakan secara rutin, aspek perumusan lingkup, konteks, dan kriteria yaitu penyusunan Profil Risiko melebihi batas waktu yang ditentukan, aspek identifikasi risiko yaitu perumusan kategori risiko belum konsisten, serta aspek pencatatan dan pelaporan yaitu dokumen pelaporan belum lengkap;
- Direktorat PPIBM: Aspek analisis risiko, respon risiko, serta pemantauan dan tinjauan telah optimal, namun masih terdapat catatan pada aspek komunikasi dan konsultasi yaitu rapat triwulanan belum dilaksanakan secara rutin dan tidak semua rapat triwulanan dipimpin oleh Pemilik/ Pengelola Risiko, aspek perumusan lingkup, konteks, dan kriteria yaitu penyusunan Profil Risiko melebihi batas waktu yang ditentukan, aspek identifikasi risiko yaitu perumusan kategori risiko belum konsisten, aspek evaluasi risiko yaitu Profil Risiko belum diurutkan sesuai dengan prioritas risiko, serta aspek pencatatan dan pelaporan yaitu dokumen pelaporan belum lengkap; dan

e. Direktorat PPICK...

- e. Direktorat PPICK: Aspek komunikasi dan konsultasi, identifikasi risiko, analisis risiko, serta pemantauan dan tinjauan telah optimal, namun masih terdapat catatan pada aspek perumusan lingkup, konteks, dan kriteria yaitu penyusunan Manajemen Risiko melebihi batas waktu yang ditentukan, aspek evaluasi risiko yaitu Profil Risiko belum diurutkan sesuai dengan prioritas risiko, aspek respon risiko yaitu terdapat respon risiko yang belum tepat pada profil risiko, serta aspek pencatatan dan pelaporan yaitu dokumen pelaporan belum lengkap.
3. Kesimpulan Hasil Evaluasi atas **Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko**
Telah dilakukan penilaian terhadap Komponen Hasil Penerapan Manajemen Risiko, hasil revidi dan survei tiap Subkomponen pada Komponen mempunyai nilai berbeda untuk tiap Unit Kerja, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Subkomponen	Unit Kerja				
		Setditjen PI	PSSPP	PPISDA	PPIBM	PPICK
Reviu Dokumen						
1	Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	100	100	85	100	60
Survei						
1	Nilai Survei Hasil Penerapan Manajemen Risiko	83,02	85,78	85,49	81,66	93,06

Hal yang menjadi catatan keseluruhan pada setiap Unit Kerja yaitu:

- Setditjen PI, Direktorat PSSPP, dan Direktorat PPIBM: Efektivitas sangat tinggi dengan mayoritas risiko terkendali dan tercapainya target kinerja Unit Kerja;
 - Direktorat PPISDA: Target kinerja (IKSP 95,08% dari 100%, IKK 23,77% dari 25%) tidak tercapai sepenuhnya; dan
 - Direktorat PPICK: Terdapat 2 (dua) dari 4 (empat) risiko belum terkendali (Risiko 1 dan 4) yang dibuktikan dengan nilai risiko aktual lebih besar daripada target nilai risiko yang diharapkan.
4. Kesimpulan Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 di DJPI
Kesimpulan Hasil Reviu dan Survei tiap Sub Komponen mempunyai nilai berbeda untuk tiap Unit Kerja, masing-masing Unit Kerja mempunyai catatan sebagai berikut:

No.	UPR T-2	Tingkat Efektivitas	Peringkat
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	<i>Optimized/</i> Level 5 (92,69)	1
2	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	<i>Managed/</i> Level 4 (89,83)	2
3	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	<i>Managed/</i> Level 4 (86,04)	3
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	<i>Managed/</i> Level 4 (83,89)	4
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	<i>Managed/</i> Level 4 (79,71)	5

F. Rekomendasi

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menugaskan kepada setiap Unit Pemilik Risiko (UPR) untuk:

1. Meningkatkan keterlibatan pegawai dalam pengembangan kompetensi manajemen risiko secara menyeluruh, baik yang diselenggarakan internal DJPI atau dari eksternal dengan target partisipasi 100%;
2. Melakukan pencatatan atas seluruh kejadian (*Loss Event Database*) ke dalam sistem informasi;
3. Memperkuat komitmen pimpinan dan tata kelola di seluruh unit kerja melalui alokasi anggaran manajemen risiko yang eksplisit, memastikan keterlibatan aktif Pemilik/Pengelola Risiko dalam komunikasi rutin pembahasan risiko, serta melakukan pembaruan Komitmen Manajemen Risiko secara berkala sesuai dinamika Unit Kerja;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh proses manajemen risiko, mencakup kepatuhan terhadap jadwal penyusunan profil risiko, kesesuaian format pelaporan, dan penerapan metodologi prioritas risiko yang konsisten sesuai pedoman, serta penyampaian terhadap penerapan Manajemen Risiko; dan
5. Meningkatkan efektivitas respon risiko dengan merumuskan rencana mitigasi yang lebih terukur untuk mengurangi kemungkinan dan dampak, serta memperhatikan pencapaian target kinerja utama organisasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum,



Rachman Arief Dienaputra
NIP. 196606271996031001

Tembusan:

1. Inspektur IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; dan
2. Para Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

LAMPIRAN 3

Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja



BERITA ACARA KESEPAKATAN
NOMOR PR0303/T/PS/2026/5

**CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya telah disepakati Berita Acara Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan/IKK	Jenis Indikator/Komposit	Target PK	Target Renstra	Capaian	Kinerja
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI) (7764 Kegiatan 1. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum)					
IKK.1. Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)		84,72%	84,72%	93,21%	110,02%

2. Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA 2025

Jenis Belanja	2025					
	Pagu DIPA	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi		
	Rp Ribu	Rp Ribu	Rp Ribu	Rp Ribu	% Pagu DIPA	% Pagu Efektif
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(4)
Belanja Pegawai	47.968.775	0	47.968.775	43.022.360	89,69	89,69
Belanja Barang	24.807.351	1.902.842	22.904.509	21.049.517	84,85	91,90
- Operasional	20.646.708	1.223.565	19.423.143	17.659.389	85,53	90,92
- Non Operasional	4.160.643	679.277	3.481.366	3.390.128	81,48	97,37
Belanja Modal	2.806.627	0	2.806.627	2.803.292	99,88	99,88
Total	75.582.753	1.902.842	73.679.911	66.875.169	88,48	90,76

Status iemonitoring PU tanggal 13 Januari 2025, 08.00 WIB.

Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Blokir	Realisasi	Keuangan (%)			Fisik (%)		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL DIPA	RL Efektif	RN	RL	Kinerja
Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)			78.125.339	1.902.842	68.380.950	100	87,53	90,76	100	100	100
Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan/ Laporan /Dokumen	71.323.118	1.669.797	62.884.331	100	88,17	90,28	100	100	100
Layanan BMN	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	122.983	76.602	40.172	100	32,66	86,61	100	100	100
Layanan Hukum	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	303.026	110.035	189.374	100	62,49	98,13	100	100	100
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	413.902	55.194	355.776	100	85,96	99,18	100	100	100
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	564.296	135.515	426.307	100	75,55	99,42	100	100	100
Layanan Umum	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	1.260.325	56.991	1.163.446	100	92,31	96,69	100	100	100
Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	43.103	11.895	27.507	100	63,82	88,14	100	100	100
Layanan Perkantoran	1	Layanan/ Laporan /Dokumen	68.615.483	1.223.565	60.681.749	100	88,44	88,92	100	100	100
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	93	Unit/m2/ Paket	2.806.627	0	2.803.292	100	99,88	99,88	100	100	100
Layanan Sarana Internal	93	Unit/m2/ Paket	2.806.627	0	2.803.292	100	99,88	99,88	100	100	100
Layanan Manajemen SDM Internal	272	Orang/ Layanan	318.428	114.350	196.889	100	61,83	96,48	100	100	100
Layanan Manajemen SDM	272	Orang/ Layanan	318.428	114.350	196.889	100	61,83	96,48	100	100	100
Layanan Manajemen Kinerja Internal	8	Layanan/ Laporan /Dokumen	1.134.580	118.695	990.657	100	87,31	97,52	100	100	100
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3	Layanan/ Laporan /Dokumen	472.031	57.061	414.405	100	87,79	99,86	100	100	100
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	Layanan/ Laporan /Dokumen	237.325	0	237.044	100	99,88	99,98	100	100	100
Layanan Manajemen Keuangan	3	Layanan/ Laporan /Dokumen	425.224	61.634	339.209	100	79,77	93,29	100	100	100

Status iemonitoring PU tanggal 13 Januari 2025, 08.00 WIB.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Januari 2026

Yang Menyepakati,

Kepala Bagian Perencanaan,
Anggaran dan Keuangan



Desy Nina Wulandari

NIP. 197712092005022001

Kepala Bagian
Kepegawaian dan Umum



Bambang Adhityo

NIP. 198008212005021002

Kepala Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik



Anggoro Widyastika

NIP. 198001222009121001

Mengetahui,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum



Reni Ahiantini

NIP. 196910181996032002

LAMPIRAN 4

Penghargaan Dari Pihak Luar



Telah berhasil mempertahankan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 sesuai Hasil Audit Eksternal Tanpa Temuan Mayor dan Minor



Nilai IPA (Indeks Penilaian Aset) DJPI per 20 Oktober 2025 adalah 3,13



Setditen PI berhasil meraih nilai AKIP tertinggi di DJPI Tahun 2024 dengan nilai 87,65, Kategori A dan predikat Memuaskan



Juara 3 Kategori Penataan Arsip Terbaik di Lingkungan Kementerian PU tahun 2025



Capaian nilai Manajemen Risiko UPR T2 Setditen PI tertinggi di DJPI dengan Tingkat Efektivitas Optimized atau pada level 5 dengan nilai 92,69



Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi DJPI Tahun 2025 Adalah 4,67 (naik dibandingkan tahun 2024 : 4,55)



Telah dilaksanakan Likuidasi Satker BA033 tepat waktu



Juara 3 Penataan Arsip



Surveillance SMAP



Majalan VFM



Sosialisasi Core Value BerAKHLAK, Kode Etik, Disiplin dan Mutasi Pegawai



Penyelesaian Cost of Fund



Dokumentasi Kegiatan Pimpinan



Perayaan Hari Besar



Penajaman Pagu Alokasi Tahun 2026



Pelayanan Kehumasan

LAMPIRAN 5

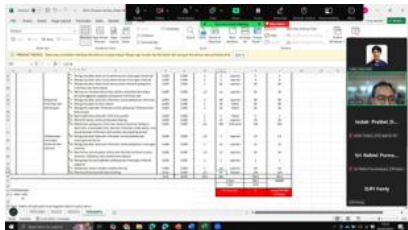
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

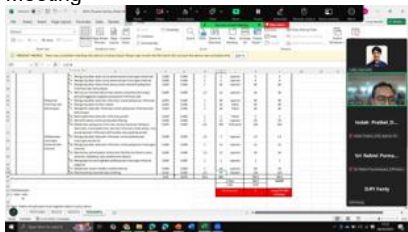
NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyusunan Profil Risiko Korupsi 2025 Tanggal : 6 Januari 2025 RR. Setditjen, Lantai 2 Wing 1, Gedung DJPI 	Terdapat satu pernyataan risiko korupsi yang dirumuskan yaitu "Terjadinya suap menyuap dalam pengadaan barang" dengan RTP berupa: 1. Melakukan evaluasi capaian target penggunaan bela pengadaan. 2. Memetakan target penggunaan Bela Pengadaan dalam rangka mendorong penggunaan bela pengadaan melalui surat Setditjen ke unit kerja sebagai target uker dalam penggunaan bela pengadaan. 3. Melaporkan target bela pengadaan ke Biro Perencanaan dan Bina Konstruksi 4. Mengundang LKPP, vendor dan unit kerja di DJPI untuk membahas pengadaan melalui Bela Pengadaan. 5. Sosialisasi terkait perbendaharaan dengan menitikberatkan pada penggunaan non-tunai dalam pembayaran belanja.	i. pengajuan konsep profil risiko kepada pemilik risiko. ii. Inputing profil risiko dan validasi unit kepatuhan internal melalui SIMR tanggal 10 Januari 2025.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
2	Koordinasi Penerapan MR UPR T2 Setditjen Triwulan IV 2024 Tanggal: 7 Januari 2025 RR. Setditjen, Lantai 2 Wing 1, Gedung DJPI 	1. Seluruh level risiko aktual telah berada di bawah garis toleransi. 2. Penyusunan Laporan Penerapan Manajemen Risiko UPR T2 Setditjen Periode Triwulan IV 2024 maksimal 31 Januari 2025 untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal.	Telah dilakukan penyusunan laporan penerapan manajemen risiko setditjen triwulan IV 2024.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
3	Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Creative Infrastructure Financing (CreatiFF) Tahun 2025 Tanggal : 10 Januari 2025 	Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Infrastruktur Kreatif (Creative Infrastructure Financing) Tahun 2025.	Waktu pelaksanaan kegiatan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pak Dirjen dan akan dibuatkan surat permohonan maaf pemunduran pelaksanaan kegiatan kepada Perusahaan yang ikut berpartisipasi menjadi sponsor.	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
4	Identifikasi Data Dukung LK Satker Subsidi BA.999.07.987252 Semester II Tahun 2024 Tanggal : 14 Januari 2025 RR. Setditjen, Lantai 2 Wing 1, Gedung DJPI 	1. Identifikasi transaksi keuangan Satker Subsidi. 2. Pengungkapan keterangan dan informasi keuangan subsidi. 3. Pengumpulan data pendukung untuk penuangan pada CaLK.	Disusunnya Laporan Keuangan Semester II Satker Subsidi.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
5	Koordinasi penerapan manajemen risiko UPR T1 DJPI terkait risiko Bantuan Pembiayaan Perumahan Tanggal : 14 Januari 2025 Ruang Rapat Setditjen, Lantai 2 Wing 1, Gedung DJPI 	Sampai dengan Triwulan IV, risiko ketidaktepatan sasaran dan ketidakterhunian rumah subsidi masih memiliki level risiko aktual di atas garis toleransi yang tercantum pada SE Menteri PUPR No.12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan MR di Kementerian PUPR. Pada tahun 2025 pemilik kegiatan perlu merumuskan kembali inovasi pengendalian/ rencana tindak pengendalian yang lebih efektif untuk menurunkan level risiko.	1. Kedua risiko perlu kembali dimasukan pada profil risiko pemilik kegiatan di Tahun 2025. 2. Setditjen akan menyusun Laporan Penerapan Manajemen Risiko Tingkat UPR T1 Triwulan IV 2024 dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal maksimal 31 Januari 2025. 3. Akan dilakukan pembahasan lanjutan mengenai progress penerapan MR berkaitan dengan risiko KPBU dan dukungan manajemen lainnya.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
6	Reviu Kebutuhan Jabatan ASN 2025-2029 Melalui Penyusunan Anjab dan ABK DJPI Tanggal: 14 Januari 2025 	1. Latar belakang reviu kebutuhan jabatan ASN DJPI yakni terbitnya Permen PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum serta Surat dari Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Nomor KP 1001-Sp/1286 bahwa beban kerja, kebutuhan pegawai dan pengangkatan dalam JF memperhatikan jumlah kebutuhan yang telah dirinci oleh unit kerja Pembina JF di Kementerian Pekerjaan Umum. 2. Berdasarkan peraturan dan surat tersebut, DJPI melakukan reviu terhadap kebutuhan jabatan ASN di DJPI untuk periode 2025-2029 melalui penyusunan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). 3. Hasil reviu terhadap kebutuhan jabatan ASN tersebut belum mempertimbangkan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Batas Usia Pensiun, serta masih bersifat sementara. Sehingga, Unit Kerja di lingkungan DJPI perlu untuk melakukan reviu kembali sesuai dengan kebutuhan dari setiap Unit Kerja.	1. Setiap Unit Kerja untuk melakukan reviu kembali terhadap usulan tersebut dengan menyampaikan dokumen usul kebutuhan berupa: - Surat pengantar usulan kebutuhan jabatan ASN Unit Kerja 2025-2029. - Rekapitulasi kebutuhan, bezetting dan formasi jabatan ASN berdasarkan sebagaimana format dalam Lampiran I. - Form Anjab dan ABK untuk setiap jabatan dan/atau jenjang jabatan (Struktural, Fungsional dan Pelaksana) sebagaimana format dalam Lampiran II. 2. Kelengkapan dokumen tersebut dapat disampaikan kepada kami paling lambat pada tanggal 24 Januari 2025 dan diunggah pada tautan berikut : https://bit.ly/uploadkebutuhanASNDJPI2025 Format sebagaimana Lampiran I dan II serta panduan penyusunan Anjab dan ABK dapat diunduh pada tautan berikut: https://bit.ly/datadanmateri_kebutuhanjabatanDJPI2025	Bagian Kepegawaian dan Umum
7	Identifikasi Data dukung LK Satker PI 033.16.631003 Semester II Tahun 2024 Tanggal : 15 Januari 2025 RR. Setditjen Lantai 2 Wing 1, Gedung DJPI 	1. Identifikasi transaksi keuangan satker PI. 2. Pengungkapan keterangan dan informasi belanja keuangan dan BMN. 3. Pengumpulan data pendukung untuk penuangan pada CaLK.	Disusunnya Laporan Keuangan Semester II Satker PI.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
8	Permohonan Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester II TA 2024 Tanggal : 16-20 Januari 2025 RR. Setditjen, Lantai 2 Wing 1, gedung DJPI 	Telah dilakukan reviu LK oleh Inspektorat Jenderal.	Dilakukan perbaikan berdasarkan catatan itjen pada LK.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
9	Pisah Sambut Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tanggal : 24 Januari 2025 Ruang Rapat Lantai 9  	Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tanggal 17 Januari 2025 dan telah dilantiknya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 20 Januari 2025, maka Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum telah berganti.	Serah terima jabatan dilakukan antara Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lama dengan yang baru.	Bagian Kepegawaian dan Umum

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
11	Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Humas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tanggal : Kamis, 6 Februari 2025 melalui Zoom Meeting 	- Pembahasan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Humas. - Hasil pembahasan bersama disepakati bahwa Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Humas yang dihitung kebutuhannya meliputi: - Jenjang Jabatan Ahli Madya 2 (dua) kebutuhan formasi. - Jenjang Jabatan Ahli Muda 4 (empat) kebutuhan formasi. - Jenjang Jabatan Ahli Pertama 4 (empat) kebutuhan formasi. - Jenjang Jabatan Terampil 1 (satu) kebutuhan formasi. - Perlu dilakukan telaahan kembali apakah Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat perlu ditempatkan pada setiap Unit Kerja di lingkungan DJPI.	- Menyampaikan Surat Usulan Kebutuhan dan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum serta melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan meliputi: - Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; - Form Perhitungan Beban Kerja Jabatan Fungsional Pranata Humas; - Peta Jabatan Unit Organisasi/ Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Untuk selanjutnya disampaikan kepada Biro Komunikasi Publik. - Melakukan penyesuaian terhadap proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun ke depan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.	Bagian Kepegawaian dan Umum
12	Pelaksanaan pemindahan ruang kerja DJPI 	Pelaksanaan pemindahan ruang kerja dilaksanakan dengan pemindahan barang secara berkala per unit eselon II.	Pelaksanaan pemindahan barang masih akan terus dilakukan hingga seluruh barang seluruhnya berpindah.	Bagian Kepegawaian dan Umum
13	Koordinasi pembukaan buka blokir anggaran Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025 Tanggal : 3 Februari 2025	Koordinasi dilakukan dengan Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum		Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
14	Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Humas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tanggal : Kamis, 6 Februari 2025 melalui Zoom Meeting 	- Pembahasan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Humas. - Hasil pembahasan bersama disepakati bahwa Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Humas yang dihitung kebutuhannya meliputi: - Jenjang Jabatan Ahli Madya 2 (dua) kebutuhan formasi. - Jenjang Jabatan Ahli Muda 4 (empat) kebutuhan formasi. - Jenjang Jabatan Ahli Pertama 4 (empat) kebutuhan formasi. - Jenjang Jabatan Terampil 1 (satu) kebutuhan formasi. - Perlu dilakukan telaahan kembali apakah Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat perlu ditempatkan pada setiap Unit Kerja di lingkungan DJPI.	- Menyampaikan Surat Usulan Kebutuhan dan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum serta melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan meliputi: - Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; - Form Perhitungan Beban Kerja Jabatan Fungsional Pranata Humas; - Peta Jabatan Unit Organisasi/ Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Untuk selanjutnya disampaikan kepada Biro Komunikasi Publik.. Melakukan penyesuaian terhadap proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun ke depan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.	Bagian Kepegawaian dan Umum
15	Pembahasan usulan profil risiko UPR T1 Direktorat PPICK Tanggal : 26 Februari 2025 RR. Dirjen Lantai 8 Gedung G Kementerian PU 	Membahas: - Telah disampaikan dua usulan profil risiko UPR T1 berkategori risiko kinerja yaitu: - Timeline proyek KPBU Sektor Permukiman tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan; - Penyelenggaraan KPBU infrastruktur PU belum optimal. Kedua usulan tersebut telah dibahas internal bersama dengan Direktur PPIP dan telah disepakati untuk diusulkan naik ke tingkat UPR T1.	Masih perlu dilakukan penyesuaian mengenai kesesuaian tabel profil risiko dengan aturan pada SE MR.	Masih perlu dilakukan penyesuaian mengenai kesesuaian tabel profil risiko dengan aturan pada SE MR.

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
17	Meliput Kegiatan Monitoring Kesiapan Jalur Lebaran 2025 Tanggal: 25 s.d. 28 Februari 2025, lokasi: Jakarta-Sukabumi-Bandung 	Kunjungan ini dilakukan dalam rangka persiapan menyambut Jalur Mudik Ramadhan Tahun 2025;	Disampaikan bahwa jalan yang dilalui aman terkendali tidak ada kerusakan yang signifikan, PU akan melakukan pemeliharaan terhadap jalan yang dianggap tidak memadai.	
18	Pembahasan usulan profil risiko UPR T1 Direktorat PPIBM Tanggal : 26 Februari 2025 RR. Dirjen Lantai 8 Gedung G Kementerian PU. 	Telah disampaikan lima usulan profil risiko UPR T1 dengan kategori risiko berbeda itu: 1) Keterlambatan pemenuhan persyaratan dokumen pra studi kelayakan pada Tahap Penyiapan Proyek KPBU Unsolicited (Risiko Kinerja); 2) Keterlambatan penetapan izin prinsip (Risiko Layanan); 3) Keterlambatan pelaksanaan pelelangan proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan (Risiko Kinerja); 4) Pemberitaan negatif di media massa dan media sosial terkait keterlambatan waktu pelaksanaan proyek akibat terjadi gagal lelang (Risiko Reputasi); 5) Badan Usaha mempengaruhi proses evaluasi dokumen studi kelayakan dalam rangka mendapatkan izin prinsip dan izin prakarsa (Risiko Korupsi).	Seluruh risiko tersebut akan disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai usulan profil risiko UPR T1.	
19	Revisi Manual Book SMAP Tanggal : 10 Maret 2025 RR. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU, Lantai 8 Gedung G Kementerian PU. 	Pada tabel 4.1. Analisa SWOT: - Kolom Aksi Setditjen pada Isu eksternal Intervensi pihak luar terhadap proses analisis/telaah hukum diubah menjadi Analisis/telaah hukum mengenai perjanjian kerja sama di DJPI mengenai titik rawan fraud; - Mengganti Isu Internal Proses Rekrutmen Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur (API) belum optimal menjadi Belum ada sistem perhitungan angka kredit untuk Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur (API). Pada tabel 4.2. Persyaratan dan Pemangku Kepentingan: - Mengupdate daftar peraturan dalam kolom Peraturan terkait Penyusunan sesuai dengan peraturan yang masih berlaku; - Menghapus BP Tapera dari daftar mitra;	Akan dilakukan koordinasi menunggu hasil penyusunan renstra setditjen	Bagian Pencanaan, Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		- Merubah Bank Pelaksana Penyalur Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dari daftar mitra; - Menambahkan Bank Pelaksana Penyalur Gaji Pegawai Setditjen menjadi mitra.		
20	Rapat Koordinasi Penyusunan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Tanggal: 10 Maret 2025 RR Setditjen PI Gedung G lantai 7 Kementerian PU	• Risiko program pembangunan nasional merupakan risiko pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas sektoral/tematik sebagai bagian dari implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN); • Kriteria pemilihan PSN yang diangkat dalam MRPN DJPI Tahun 2025: - Merupakan proyek dengan skema KPBU; - Masuk pada daftar PSN (berdasarkan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 12/2024 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025); - Masuk pada RKA/KL Tahun 2025. • Memastikan mitigasi risiko dapat diimplementasikan dan dipantau pada Tahun 2025	• Biro Keuangan, PAKLN, dan Inspektorat Jenderal mengusulkan untuk tetap dilakukan perumusan profil risiko pembangunan nasional sesuai dengan amanat pada SE Menteri PUPR Nomor 12/2024; • Sampai dengan saat ini yang paling memungkinkan untuk diangkat yaitu proyek yang ada pada Direktorat PPISDA. Sehingga akan dilakukan diskusi lebih lanjut dengan tim manajemen risiko Direktorat PPISDA.	Direktorat Sistem dan Strategis Penyelenggaraan Pembiayaan.
21	Sosialisasi Aturan Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21 dan Coretax Tanggal: 11 Maret 2025 RR Setditjen PI Gedung G lantai 7 Kementerian PU. 	Menindaklanjuti PMK Nomor 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.	Diharapkan setiap pegawai di lingkungan DJPI dapat mengetahui penerapan perhitungan TER PPh pasal 21.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan.

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
22	Pemetaan SOP Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Tanggal: 19 Maret 2025 RR. Setditjen PI Gedung G lantai 7 Kementerian PU 	SOP Kesatkeran belum dilakukan reviu sejak tahun 2020, sementara peraturan maupun mekanisme pengelolaan keuangan telah berubah	Tim Pokja Bidang Tugas Organisasi dan tata Laksana akan menyusun SOP dengan berkoordinasi bersama Tim Satuan Kerja dan Bagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan.	Penanggungjawab: Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan.
23	Finalisasi Profil Risiko UPR T1 DJPI Tahun 2025. Tanggal: 20 Maret 2025 RR. Setditjen PI Gedung G lantai 7 Kementerian PU 	- Dilakukan finalisasi atas tujuh risiko yang sebelumnya telah dibahas dengan Direktur Jenderal; - Risiko reputasi tidak dapat diangkat karena risiko tersebut tidak terjadi di 2025 pada Direktorat PPICK, tidak adanya anggaran terkait kegiatan pada Direktorat PPIBM, dan diluar kendali Direktorat PPISDA; - Terdapat permintaan penambahan risiko benturan kepentingan pada UPR T2 dan UPR T1 sesuai dengan surat itjen.	- Masih terdapat data yang perlu dipenuhi oleh masing-masing unit kerja; - Setelah data didapatkan akan dilakukan inputing profil risiko pada sistem informasi manajemen risiko (e-PURISK) untuk kemudian dilegalisasi oleh Direktur Jenderal; Untuk memenuhi jumlah minimal kategori risiko, akan dilakukan koordinasi dengan Unit Kepatuhan Internal apakah bisa memasukkan risiko reputasi tahun sebelumnya.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan.
24	Pengungkapan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Tahun 2024 Tanggal: 24 Maret 2025 RR Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan Lantai 8 gedung G 	Agenda rapat adalah pembahasan pembaruan data pada 10 rekomendasi BPK yang berstatus BS dan BT; Hasil pembahasan akan disajikan pada Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dan Tingkat satuan Kerja BA.999.07.987252 Tahun Anggaran 2024 periode 14 (audited).	- Terhadap 6 rekomendasi progress "sudah dilakukan upload SIPTL dan sedang diproses telaah BPK", akan menunggu hasil telaah BPK di semester I Tahun 2025. - Terhadap 4 rekomendasi "pelengkapan dokumen": 2 rekomendasi telah dinyatakan lengkap dan dapat diajukan permohonan validasi ke Subdit Kepatuhan Intern dan verifikasi ke Itjen; 2 rekomendasi sisanya masih berproses dalam pemenuhan dokumen	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
25	Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan CreatIFF 2025 Tanggal : 10 April 2025 RR. Sesditjen PI, Lantai 7 Gedung G Kementerian PU 	- Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mengusulkan penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Infrastruktur Kreatif atau Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) Tahun 2025 sebagai salah satu langkah untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kebijakan dalam mendukung pembiayaan penyediaan infrastruktur yang berasal dari pembiayaan non APBN; - Pelaksanaan kegiatan CreatIFF 2025 kami mengusulkan untuk diadakan pada Hari Rabu, Tanggal 21 Mei 2025, dan saat ini kami telah berkoordinasi dengan TU Menteri untuk melakukan konfirmasi agenda Bapak Menteri; - Tema yang akan diangkat pada kegiatan CreatIFF Tahun 2025 adalah "Menjawab Tantangan Pembiayaan Kreatif di Tengah Optimalisasi Anggaran", yang berbentuk bincang Infrastruktur untuk meningkatkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk pengembangan pembiayaan kreatif dalam Pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum sebagai Upaya mencapai visi Pemerintah Baru "Asta Cita". - Dalam acara CreatIFF 2025 ini terdapat Booth Pameran dari 13 perusahaan yang akan berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan acara ini.	- Tim Substansi telah menyiapkan Konsep Acara dengan perubahan narasumber dan penanggung beserta pokok bahasannya (paparan dan TOR terlampir); - Pihak Event Organizer (EO) akan mulai mempersiapkan beberapa hal terkait yang memerlukan proses produksi seperti desain publikasi dengan adanya konsep dan jumlah pengisi acara; Akan dilakukan penyesuaian perhitungan anggaran oleh Tim sponsor dan EO dengan konsep acara CreatIFF 2025 yang terbaru sehingga nantinya akan pembaruan komitmen kerjasama kepada para sponsor untuk dana sponsorship yang akan diberikan namun tetap memperhatikan benefit yang telah dijanjikan akan terlaksana	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
26	Rapat Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I DJPI TA.2025 Tanggal: 14 April 2025 RR. Sesditjen PI, Lantai 7 Gedung G Kementerian PU. 	- Realisasi anggaran DJPI berdasarkan iemonitoring PU tanggal 31 Maret 2025, pukul 16.00 WIB adalah Rp16.535.478.000,- (16,71%) dari pagu anggaran Rp98.961.375.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp18.397.234.000,-; - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPI TA.2025 pada triwulan I belum terbit dikarenakan masih proses pengisian salah satu indikator yaitu Capaian Output yang pengisiannya maksimal dilakukan 30 April 2025; - Masih terdapat 3 Unit Kerja yang memiliki deviasi diatas ambang batas toleransi +/-5% terhadap rencana halaman III DIPA.	- Unit Kerja perlu mempersiapkan data revisi rencana keuangan/rencana halaman III DIPA periode triwulan 2-4 disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, link pengisian akan diberikan pada surat terpisah; - Unit Kerja perlu mempersiapkan Target Capaian Output per rincian output (RO) periode Januari s.d Desember 2025 dan realisasi capaian output per rincian output (RO periode Januari s.d April 2025 yang disesuaikan dengan data revisi rencana keuangan/rencana halaman III DIPA, link pengisian akan diberikan pada surat terpisah; - Dalam menyusun rencana diharapkan nilai blokir dapat dihitung/dimasukkan pada bulan	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
			Desember (Triwulan IV) 2025, untuk meminimalisir deviasi yang tinggi; - Melakukan percepatan belanja, khususnya belanja modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.	
27	Finalisasi Revisi <i>Manual Book</i> SMAP Tanggal: 15 April 2025 RR. Sesditjen PI, Lantai 7 Gedung G Kementerian PU. 	• Terdapat beberapa klausul yang dilakukan perubahan agar lebih menjelaskan maksud dari manual book tersebut; • Dilakukan perubahan mengenai penjelasan pengadaan barang/jasa di Setditjen; • Dilakukan pemisahan fungsi antara Setditjen dan Satker sehingga pengendalian yang dicantumkan di manual book hanya merupakan pengendalian yang dilakukan di Setditjen; Pada bagian penjelasan struktur organisasi yang membahas renstra, belum dapat dilengkapi karena renstra DJPI masih dalam proses pembahasan.	Dilakukan koordinasi kepada pihak-pihak yang berkaitan mengenai manual book tersebut.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
28	Rapat Koordinasi Updating RPD Hal III DIPA, Pencantuman Target Capaian Output Januari-Desember 2025 dan Pengisian Realisasi Capaian Output Januari-April 2025 Tanggal : 17 April 2025 RR. Sesditjen PI, Lantai 7 Gedung G Kementerian PU. 	• Pengisian Target Capaian Output Bulan Januari - Desember 2025; • Pengisian realisasi Capaian Output Bulan Januari - April 2025; • Perbaikan rencana penarikan halaman III DIPA periode Triwulan 2 sampai dengan triwulan 4 tahun 2025; • Target capaian output harus tidak lebih besar dari realisasi; • Rencana perubahan RO dapat dilakukan saat revisi halaman III DIPA; Diperlukan justifikasi dari setiap unit kerja yang mengalami penurunan jumlah output.	• Pengisian RPD diharapkan dapat dilakukan secara akurat sesuai dengan rencana kegiatan dan dana yang akan dikeluarkan; • Pengisian target capaian output (TRVRO dan TPCRO) oleh petugas penanggungjawab Tim Capaian Output masing-masing unit kerja (SK terlampir) periode Januari-Desember 2025 dan realisasi capaian output Januari-April 2025 diharapkan dapat selesai pada 24 April 2025 pada link yang disampaikan di undangan; • Unit kerja yang akan melakukan revisi POK dapat segera disiapkan berkasnya karena akan dilaksanakan setelah Revisi DIPA 3 selesai; • Unit Kerja yang akan melakukan pengajuan revisi DIPA 4 segera dipersiapkan berkas serta justifikasi dan urgensi terhadap perubahan tersebut; • Kinerja pelaksanaan anggaran akan tertuang dalam Laporan Keuangan dan bisa diakses/dibaca oleh BPK, diharapkan untuk teliti dalam melakukan pengisian capaian output	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

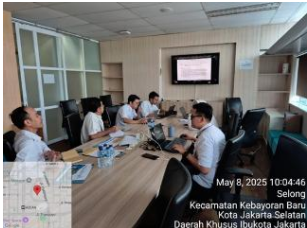
NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
29	Koordinasi Tindak Lanjut 60 Hari LHP BPK RI Nomor 2/LHP/XVII/01/2025 Tanggal : 22 April 2025 RR. Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan Lantai 8 Gedung G Kementerian PU. 	- <i>Updating</i> progres tindak lanjut rencana aksi; Pengumpulan dokumen tindak lanjut 60 hari.	Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Direktorat PPSIDA dalam rangka menindaklanjuti: - Akan dilakukan usulan revisi klausul Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021; - Akan dibuat SK Tim Kolaborasi antara DJPI dan DSDA guna penyusunan rencana induk (Master Plan) pemanfaatan bendungan; - Akan dibuat permintaan kelengkapan kajian skema pendanaan dari Dirjen PIPU kepada Direktur Utama PT. Brantas Abipraya (Persero); - Akan dilakukannya koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait skema pendanaan butir 3 di atas; - Akan dilakukan telaah/review atas kajian dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan tambahan penjelasan detail terkait Capacity Factor; - Akan melakukan kajian terkait batas bawah floor tarif penjualan tenaga listrik ke PT. PLN (Persero); - Akan dibuat SK Tim Kolaborasi Dirjen SDA dan DJPI serta Kementerian PU dengan ESDM; - Akan dikoordinasikan tindak lanjut sistem informasi dashboard aplikasi dengan Direktorat PSSPP.	Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan
30	Penyusunan SOP AP Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Tanggal : 22 April 2025 RR. Setditjen PI, Lantai 7, Gedung G Kementerian PU. 	Hasil kegiatan: • Berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan Nomor: 31/ND/ Ps.1/ 2025 tanggal 20 Maret 2025 Hal Laporan Kegiatan Pemetaan SOP Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, bahwa tindak lanjut dari hasil pembahasan tersebut Tim Pokja Bidang Tugas Organisasi dan Tata Laksana menyusun Konsep SOP AP Kesatkeran dengan berkoordinasi bersama Tim Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan; • Tim Pokja Bidang Tugas Organisasi dan Tata Laksana telah menyusun konsep SOP AP Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebanyak 17 SOP AP Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum untuk direview, disusun dan dibahas Bersama;	Melaksanakan kegiatan Lanjutan Penyusunan SOP AP Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.	Penanggung jawab: Bagian Kepegawaian dan Umum

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		- Penyusunan SOP AP Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tugas dan fungsi serta Proses Bisnis DJPI yang menasar pada Pengelolaan Program dan Anggaran; - Hasil pembahasan bersama dengan Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dapat diakses pada link https://s.pu.go.id/MTM2MA/SOPAPSatkerPI		
31	Pembahasan PIPK Tahun 2025. Tanggal : 23 April 2025 RR. Setditjen PI, Lantai 7 Gedung G Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: Penyusunan Matriks A (Matriks Risiko Pengendalian) Tahun 2025 yang memuat akun signifikan: - Belanja Jasa Konsultan; - Belanja Modal Peralatan dan Mesin; - Kas di Bendahara Pengeluaran; - Barang Konsumsi; Peralatan dan Mesin.	- Akan dilakukan koordinasi dengan satker mengenai dokumen pendukung; - Akan dilakukan penandatanganan matriks A oleh KPA dan akan disampaikan kepada Biro Keuangan.	Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan
32	Pembahasan Standar Kompetensi Teknis Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tanggal : 24 April 2025 RR. Pusat Pengembangan Talenta Gedung Heritage Lantai 2 Kementerian PU. 	Hasil kegiatan: - DJPI mengusulkan kamus kompetensi teknis Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebanyak 16 Judul Kompetensi; - Dari 16 judul tersebut, secara substansi telah sesuai kebutuhan dan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi, namun harus dibuat skala prioritas kompetensi maksimal tujuh (7) kompetensi perjabatan; DJPI sudah memiliki SK Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Perlu melakukan finalisasi internal dalam menetapkan nama kompetensi sekaligus penyusunan kamus kompetensi dan matriks standar kompetensi jabatan di lingkungan DJPI.	Bagian Kepegawaian dan Umum

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
32	Rapat Tinjauan Manajemen I SMAP Setditjen 2025 Tanggal : 25 April 2025 RR Sesditjen PI, Lantai 7 Gedung G Kementerian PU. 	Hasil kegiatan: • Tinjauan atas kebijakan prosedur; • Identifikasi masalah awal; • Penyampaian program kerja; • Mendorong komitmen dan pemahaman pihak-pihak terkait.	Akan dilakukan koordinasi antara Sekretaris Direktorat Jenderal dengan Direktur PSSPP mengenai: • Pembahasan kesepakatan mengenai unit kerja yang akan menjadi koordinator pelaksana SMAP di DJPI Tahun 2025; • Kesepakatan pihak yang melaksanakan audit internal dan pelaksanaan pelatihan bagi auditor internal tersebut; • Kesepakatan pelaksanaan sosialisasi eksternal dilakukan bersamaan untuk seluruh unit kerja atau dilakukan masing-masing	Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan
33	Pelaksanaan Aanwizjing Lelang KDO Bermotor Roda 2 (Dua) Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tanggal : 25 April 2025 Gedung A2 DJPI, Jl. Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 	Telah dilaksanakan pertemuan antara penyelenggara tender yakni DJPI dengan peserta untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai KDO yang akan dilelangkan.	KDO tersebut sudah dilakukan proses lelang dan sudah laku terjual.	Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
34	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Media Sosial Tanggal : 25 April 2025 RR. Setditjen PI, Lantai 7 Gedung G Kementerian PU 	Hasil kegiatan: - Pemisahan Kementerian PU dan Kementerian PKP butuh adaptasi dengan konten yang lebih beragam; - Konten dengan substansi KPBU yang belum mendapatkan banyak atensi dan reaksi; - Efisiensi anggaran menyebabkan konten Quiz DJPI untuk sementara ditiadakan sehingga menurunkan insight dan penurunan engagement; - Timeline pembuatan konten DJPI masih banyak yang belum sesuai dengan konten sebenarnya sehingga butuh perencanaan yang lebih matang; - Keterlambatan pengiriman materi substansi dari Unit Kerja DJPI menghambat target dari Biro Komunikasi Publik minimal 1 hari 1 konten; - Kebutuhan materi substansi edukasi dari unit kerja masih minim sehingga keberagaman konten @pu_djpi masih belum maksimal; - Bahan dan Revisi Script substansi DJPI yang dikirim ke unit kerja belum di respon dengan cepat; - Pemanfaatan Instagram story DJPI yang belum maksimal	Pembentukan PIC Media Sosial DJPI seluruh unit kerja dengan perwakilan 2 orang untuk tujuan pengiriman materi substansi final yang berasal dari 1 pintu; Pembuatan timeline rutin bulanan dengan mengikuti agenda setting yang ditetapkan oleh Biro Komunikasi Publik	Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan
36	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Triwulan I Tanggal: 25 April 2025 RR. Setditjen PI, Lantai 7 Gedung G Kementerian PU 	- Monitoring dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk masing-masing unit kerja dalam menjawab pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Pengaduan DJPI; - Pemetaan menjawab pengaduan dari masing-masing unit kerja; Masing-masing Unit Kerja membuat Laporan Triwulan dan tahunan.	Monitoring dan Evaluasi ini akan dilaksanakan setiap Triwulan untuk mengetahui tindak lanjut menjawab pengaduan dan kendala yang dihadapi dalam menjawab pengaduan.	Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
37	Koordinasi Alih Kepengurusan BMN Tanggal: 28 April 2025 RR. Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Lantai 7 Gedung G Kementerian PU. 	Hasil kegiatan: - Terdapat 4 jenis Barang Milik Negara (BMN) milik Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang berada di Direktorat Jenderal Bina Marga; - Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Tanggal 10 Februari 2025 Nomor: 2/SE/M/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Status Penggunaan dan Alih Kepengurusan Barang Milik Negara, maka diperlukan ijin prinsip dari Menteri/Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum atas proses alih kepengurusan tersebut; - Mengingat bahwa saat ini telah terdapat kode Satker baru untuk Satker di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka keseluruhan proses alih kepengurusan akan dilakukan menggunakan kode Satker baru; - Dari semua pihak yang terlibat di dalam alih kepengurusan tersebut yaitu Sekretariat Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Umum dan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga akan dibentuk Tim Internal untuk melakukan penelitian atas BMN yang akan dialih statuskan dan akan menerbitkan Rekomendasi Teknis Alih Kepengurusan.	- Akan segera disiapkan surat permintaan nama anggota tim untuk proses pembentukan SK Tim Internal Alih Kepengurusan; - Penyiapan draft SKtim internal sesuai dengan amanat SE; - Pengecekan fisik atas BMN yang dikuasai pihak lain; Bersurat ke Setditjen Bina Marga koreksi atas hasil pengecekan fisik.	Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan
38	Rapat Pembahasan <i>Cost of Fund</i> atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019 Tanggal: 6 Mei 2025 RR. Kabag PPK Lantai 8 Gedung G Kementerian PU. 	Konfirmasi nilai pengembalian Bank BTN terhadap Hasil Perhitungan <i>Cost of Fund</i> atas Biaya Retensi Dana Talangan FLPP Tahun 2019.	Perlu dilakukan sinkronisasi nilai pengembalian dan konfirmasi atas nilai setoran yang telah dilakukan.	Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan
39	Monitoring Dokumen Tindak Lanjut 60 Hari LHP BPK RI Nomor 2/LHP/XVII/01/2025 Tanggal: 8 Mei 2025	Hasil kegiatan: Monitoring Dokumen Tindak Lanjut 60 Hari LHP BPK RI atas Pemeriksaan Kinerja Pemanfaatan Bendungan: Terdapat beberapa dokumen baru terhadap dokumen tindak lanjut yang sudah ada;	Akan dilengkapi dokumen tindak lanjut s.d. proses validasi Sub Direktorat Kepatuhan Intern berlangsung, dilakukan secara parallel;	Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
	RR. Direktorat PSSPP Lantai 7 Gedung G Kementerian PU 	• Pada reff 3.1.3.a sampai saat ini masih proses koordinasi dengan Dirjen SDA untuk penyesuaian rencana induk pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi Listrik; • Sudah terdapat bukti dukung mengenai sinkronisasi data potensi PLTA dan PLTS; • Sudah terdapat konsep surat instruksi dari Dirjen kepada Direktur Utama PT. Brantas Abipraya berkaitan dengan Penugasan BUMN; Terkait dengan beberapa rekomendasi bersama-sama dengan Dirjen SDA, akan diadakan rapat koordinasi pada tanggal 9 Mei 2025 untuk melakukan penajaman dokumen tindak lanjut.	• Akan dibuat surat keterangan untuk masing-masing rekomendasi dalam menjelaskan kronologi dan proses tindak lanjut; Akan dilakukan rapat koordinasi dengan Dirjen SDA dalam menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut.	
40	Monitoring <i>Area of Improvement</i> Penilaian SPIP Terintegrasi DJPI. Tanggal: 9 mei 2025 RR. Setditjen PI, Lantai 7 Gedung G Kementerian PU. 	Hasil kegiatan: • Monitoring pelaksanaan Area of Improvement (AoI) Penjaminan Kualitas Inspektorat Jenderal dan BPKP; • Persiapan pengumpulan bukti dukung penilaian mandiri SPIP 2025: – Bukti dukung yang diupload berada pada rentang waktu Juli 2024 sampai dengan Juni 2025; – Bukti dukung paling banyak diperlukan dari bagian kepegawaian dan umum, Setditjen PI; Bukti dukung dikumpulkan melalui s.id/mr_djpi pada menu "bukti dukung SPIP 2025".	• Akan disampaikan ND permintaan bukti dukung SPIP kepada masing-masing unit kerja (List bukti dukung ada di lampiran paparan); • Pengumpulan bukti dukung melalui s.id/mr_djpi pada menu upload bukti dukung SPIP 2025 maksimal 28 mei 2025 (akhir mei).	Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan
41	Rapat Pembahasan Rencana Penghapusan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tanggal: 19 Mei 2025 RR. Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan, Lantai 7 Gedung G, Kementerian PU. 	Hasil Kegiatan: • Sesuai dengan nota dinas Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum nomor 43/ND/Ps.2/2025 hal Penyampaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, maka terdapat 916 NUP BMN yang diajukan untuk dilakukan penghapusan melalui lelang/penjualan; • Dari 916 NUP BMN yang akan dihapuskan tersebut telah dilengkapi dengan foto dan kondisi barangnya namun belum ada penjelasan tentang alasan kenapa BMN tersebut dihapuskan; Proses selanjutnya adalah memastikan kesesuaian data antara aplikasi SIMAN dan kondisi fisik di lapangan, serta melengkapi alasan penghapusan sebelum dilanjutkan ke tahap lelang/penjualan.	• Bagian Kepegawaian dan Umum akan menyampaikan 916 NUP BMN yang diajukan penghapusan dilengkapi dengan alasan BMN tersebut dihapuskan paling lambat tanggal 28 Mei 2025; Akan dilakukan pengecekan fisik BMN yang akan dihapuskan oleh Bagian Kepegawaian dan Umum bersama dengan Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan mulai tanggal 3 Juni 2025.	Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
42	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Setditjen PI TA.2024 Tanggal: 20 Mei 2025 RR. Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Lantai 7, Gedung G Kementerian PU 	Hasil kegiatan: - Kegiatan ini menindaklanjuti atas hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Tim Evaluator Dit. PSSPP kepada Setditjen PI; - Hasil evaluasi AKIP Setditjen PI tahun 2024 sebesar 87,65% dikategorikan A (Memuaskan), nilai evaluasi tahun ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang sebesar 86% (kategori A, memuaskan); - Dari seluruh permasalahan dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluator merupakan permasalahan administratif yang perlu tertibkan, sehingga Setditjen PI sudah mulai melakukan perbaikan penataan kelengkapan pemberkasan kegiatan; - Keterlibatan pimpinan sudah mulai dilakukan di Tahun 2025 dalam setiap pembahasan Laporan Monev Kinerja secara berkala; Terkait pencapaian Sasaran Strategis Dukman Setditjen PI belum terdapat proporsi perhitungan capaian terhadap Sasaran Strategis Dukman Kementerian PUPR sehingga untuk lebih jelasnya perlu bersurat ke Sekretariat Jenderal dan BPIW terkait crosscutting dan proporsi perhitungan Sasaran Strategis Dukman pada setiap unit organisasi;	- Terhadap hasil rekomendasi Tim Evaluator diharapkan Setditjen PI dapat menindak lanjuti seluruhnya, terutama untuk permasalahan berulang terkait kelengkapan administrasi, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan, keterlibatan pimpinan, dan pembahasan monev capaian kinerja berkala; - Unit Kerja fokus pada nilai keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan dalam pencapaian kinerja jika semua memenuhi maka nilai maksimal 90 yaitu kategori A, tanpa mengklaim kriteria inovasi dan percontohan nasional; - Setditjen PI untuk berkoordinasi dengan Direktorat PSSPP agar dapat bersurat ke BPIW terkait pertimbangan penyusunan laporan monev kinerja bulanan tahun 2025 di lingkungan DJPI; - Setditjen PI tetap menyusun draft laporan monev bulanan tahun 2025 sesuai indikator kinerja terakhir (sesuai PK) sembari menunggu Renstra 2025-2029 terbit; Setditjen PI segera melakukan penyusunan SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang mengacu pada 05/SE/Dp/2023 tentang SOP Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.	Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan
43	Pelaksanaan Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tingkat Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 Tanggal : 20 s.d. 22 Mei 2025 RR. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta. 	Hasil kegiatan: - Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon I dengan skema sewa sebanyak 1 (satu) unit dapat disetujui dengan catatan, yaitu agar dilakukan perubahan status penggunaan barang yang semula "Digunakan sendiri untuk Dinas Jabatan" diubah menjadi "Digunakan sendiri untuk Operasional"; - Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Operasional roda empat dengan skema sewa sebanyak 1 (satu) unit dengan skema sewa tidak dapat disetujui karena jumlah usulan perubahan melebihi jumlah kebutuhan ril BMN; Hasil reviu atas Usulan Perubahan RKBMN TA 2025 Pemeliharaan selain Tanah/Bangunan, yaitu Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Operasional roda empat sebanyak 1 (satu) unit dapat disetujui.	Pembahasan dengan DJKN.	Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
44	Rapat Penyusunan Draft Renstra Setditjen PI Tahun 2025-2029 Tanggal : 21 Mei 2025 RR. Kabag Perencanaan, Anggaran dan Keuangan, Lantai 7 Gedung G Kementerian PU. 	Hasil kegiatan: - Bagian BHKP (perundang-undang) melakukan update terkait regulasi yang dibuat untuk Tahun 2025-2029; - Bagian Kepegawaian dan Umum diminta untuk menyampaikan <i>existing</i> data kepegawaian Tahun 2025.	Terkait kebutuhan data tersebut kedua Bagian diharapkan menyampaikan data pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025.	Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan
45	Rapat Lanjutan Penyusunan SOP AP Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tanggal : 21 Mei 2025 RR. Setditjen PI Lantai 7 Gedung G, Kementerian PU. 	Hasil kegiatan: - Telah dilakukan konfirmasi kepada Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, bahwa pencantuman dasar hukum yang mengalami perubahan, dapat ditambahkan redaksi "sebagaimana telah diubah dengan....". Seperti pada contoh berikut: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024; - SOP AP Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang telah disusun dan berkaitan dengan barang dan jasa, perlu ditambahkan dasar hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; - Penyusunan SOP AP Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum disusun berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tugas dan fungsi serta Proses Bisnis DJPI yang menyasar pada Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan; - Telah disusun dan disepakati 21 konsep SOP AP. Hasil lanjutan pembahasan bersama dengan Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dapat diakses pada link: https://s.pu.go.id/MTM2MA/SOPAPSatkerPI	- Melaksanakan Finalisasi SOP AP Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; - Menyusun buku dokumen SOP AP sebagai panduan resmi bagi pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; - Menyusun berita acara hasil pembahasan bersama terkait penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; Melakukan pengesahan terhadap SOP AP yang telah disusun pada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.	Bagian Kepegawaian dan Umum

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
46	Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Anti Penyuapan Setditjen Tahun 2025 Tanggal : 26 s.d 27 Mei 2025 RR. lantai 17 Gedung Utama dan Ruang Rapat Setditjen PI Lantai 7 Gedung G, Kementerian PU. 	Hasil kegiatan: - Sosialisasi diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Setditjen PI; - Sosialisasi mengundang Inspektorat Jenderal, Kepala Bagian TU Balai Teknologi Air Minum, Ditjen Cipta Karya, dan Auditor Senior pada PT.MAS selaku auditor SMAP Setditjen PI di Tahun 2024; - Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai Setditjen PI terkait dengan pemahaman mengenai anti penyuapan di lingkungan Setditjen PI.	Akan dilakukan penyampaian hasil sosialisasi; Akan dilakukan sosialisasi berkaitan dengan SMAP kepada Pihak Eksternal Setditjen PI	Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan
47	Rapat Koordinasi Persiapan Booth Pameran pada Creatiff 2025 Tanggal : 28 Mei 2025 Via <i>zoom meeting</i>	Membahas terkait alur dan tata letak Booth pameran yang akan dikunjungi Menteri PU.	Pembahasan ini menjadi acuan pada pelaksanaan Creatiff 2025.	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.
48	Peliputan dan Dokumentasi pada kegiatan <i>Creative Infrastructure Financing Day</i> (CreatIFF) 2025 dengan mengusung tema "Menjawab Tantangan Pembiayaan Kreatif di Tengah Optimalisasi Anggaran. Tgl : 3 Juni 2025 Gedung Auditorium Kementerian PU 	Hasil kegiatan: - Dalam sesi arahan, Menteri Pekerjaan Umum Menteri PU menyampaikan bahwa selama periode 5 (lima) tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian PU telah berhasil mendukung pencapaian penandatanganan 15 (lima belas) perjanjian KPBU di berbagai sektor; - Menteri PU menerima masukan dari Kamar Dagang Industri (Kadin) terkait dengan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yaitu keluhan swasta dalam pelaksanaan KPBU; - Dirjen PI menyampaikan kepada media, bahwa Kementerian PU melaksanakan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan proyek KPBU yang belum rampung. Hal terpenting sebagaimana arahan Menteri adalah KPBU tetap jalan namun diupayakan tidak melibatkan pembiayaan dari Pemerintah.	Diharapkan para pihak yang terlibat dalam proyek KPBU untuk menyampaikan data terkait keluhan dalam pelaksanaan proyek KPBU, dikarenakan tanpa data Kementerian PU tidak dapat mengatasi permasalahan secara optimum.	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
49	Peliputan dan Dokumentasi Rapat Kerja (Raker) lingkup DJPI Tahun 2025. Tgl : 4 Juni 2025 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU 	Hasil kegiatan: • Dirjen PI menekankan pentingnya kelincahan DJPI dalam mencari tambahan pendanaan di tengah efisiensi anggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. Dirjen PI menegaskan bahwa upaya penggalangan dana harus tetap mengutamakan kepatuhan terhadap koridor hukum yang berlaku; • Proses bisnis harus dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang jelas tanpa melanggar aturan, karena akan menjadi beban di masa yang akan datang; • Pentingnya standardisasi dalam implementasi proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); • Perlu juga meningkatkan keseragaman standarisasi unit kerja khususnya terkait dengan standarisasi proyek-proyek KPBU; • Pentingnya mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pelatihan yang terstruktur.	• Perlu ada standardisasi terkait pekerjaan dan setiap pekerjaan harus terukur dan dilaksanakan dengan baik; Masing-masing unit kerja lingkup DJPI guna memastikan sinergi dalam pelaksanaan program kerja tahun 2025	
50	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan 11 Juni 2025 Ruang Rapat Dirjen PI, Lantai 8, Gedung G, Kementerian PU. 	Hasil kegiatan: Pelaksanaan penataan pengawasan kearsipan di lingkup Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.	Masih menunggu hasil penilaian dari Biro Umum, Kementerian PU.	Bagian Kepegawaian dan Umum

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
51	Pembahasan Serah Terima Piutang <i>Cost of Fund</i> Dana Retensi atas Dana Talangan FLPP tahun 2019 Tanggal: 12 Juni 2025 Ruang Rapat Setditjen PI, Lantai 7 Gedung G Kementerian PU 	Hasil kegiatan: - DJPI menjelaskan secara kronologis Monitoring Tindak Lanjut Hasil Reviu Perhitungan <i>Cost of Fund</i> atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019 sampai saat ini. Proses tindak lanjut masih terus dilakukan, dimana BPKP akan menyampaikan rekomendasi akhir terkait Monitoring Tindak Lanjut Hasil Reviu Perhitungan <i>Cost of Fund</i> atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019 dalam exit meeting yang akan dilakukan; - DJPI telah meminta saran kepada Inspektorat Jenderal terkait entitas yang seharusnya menatausahakan piutang terkait reviu BPKP terhadap <i>Cost of Fund</i> atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019, apakah penatausahaan piutang terkait <i>Cost of Fund</i> akan diserahkan ke Kementerian PKP atau masih tetap tercatat pada piutang DJPI.	Inspektorat Jenderal meminta kepada DJPI untuk berkoordinasi dengan BPKP agar dapat segera menyelesaikan proses Monitoring Tindak Lanjut Hasil Reviu Perhitungan <i>Cost of Fund</i> atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019; Perlu dilakukannya pembahasan bersama dengan PK BLU Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, DJPI dan Bank BTN dalam upaya penyelesaian <i>Cost of Fund</i> Dana Retensi atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019 terutama dalam memperhitungkan kembali nilai perhitungan pengembalian oleh Bank BTN agar nilai nominal terkait jumlah pengembalian nilai pokok dana talangan dapat sesuai dan dapat disepakati Bersama.	Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan
52	Peliputan dan Dokumentasi kegiatan <i>International Conference of Infrastructure (ICI) 2025</i> Tanggal : 11 s.d. 12 Juni 2025 Jakarta Convention Center, Jakarta 	Hasil kegiatan: Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) ikut berpartisipasi dalam sesi tematik pada acara <i>International Conference on Infrastructure (ICI)</i> yang mengusung tema <i>Partnering for Progress: Strengthening Public-Private Collaboration in Infrastructure</i>. (Memperkuat Kolaborasi Publik-Swasta untuk Memperluas Jangkauan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha dalam Sektor Infrastruktur), yang dilaksanakan di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).	Kegiatan ini diharapkan dapat menarik minat investor domestik dan asing serta mempercepat penyediaan layanan infrastruktur dasar yang andal dan berkelanjutan.	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
53	Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T1 DJPI Tahun 2025 Tanggal : 16-20 Juni 2025 Balai BP2JK Wilayah Jakarta 	Hasil Kegiatan : - Kegiatan diadakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi MR oleh Inspektorat Jenderal terkait penerapan MR DJPI Tahun 2024. - Evaluasi dilaksanakan terdiri dari dua unsur yaitu hasil revidi dokumen dan hasil survei. - Survei dilaksanakan kepada 49 pegawai sampling yang ditentukan oleh Inspektorat Jenderal. - Hasil sementara didapatkan bahwa nilai evaluasi tingkat efektivitas MR UPR T1 DJPI berada pada level 4 (managed) dengan nilai 79,78. Nilai tersebut belum merupakan nilai akhir karena DJPI masih dapat memberikan tanggapan dan pelengkapan dokumen sampai dengan Senin, 23 Juni 2025.	- Akan dilakukan pelengkapan data tambahan terkait penerapan MR DJPI TA.2024 - Akan dilakukan tanggapan atas catatan-catatan itjen pada nota kesepahaman sampai dengan tanggal 23 Juni 2025.	Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan
54	Sharing Session Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan DJPI Tanggal : 16 Juni 2025 Ruang Rapat Lantai 8 Gedung SDA Kementerian PU 	Hasil kegiatan: - Masing-masing Direktur memaparkan tugas dan fungsinya; - Pemaparan target dan indikasi kontribusi KPBU dan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025-2029.	Pembinaan CPNS Formasi Tahun 2025 dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja di Lingkungan DJPI.	Bagian Kepegawaian dan Umum
55	Peliputan Acara Workshop Optimalisasi Peluang (<i>Update Risk</i>) dalam Manajemen Risiko Tanggal: 2-3 Juli 2025 Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah III Jakarta, 	Hasil Kegiatan: - Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi melalui identifikasi serta optimalisasi risiko positif; - Berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal terhadap penerapan Manajemen Risiko tahun 2024, tercatat bahwa sebanyak 182 dari 189 pegawai aktif UPR T-1, atau sebesar 96,3%, telah mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi Manajemen Risiko; - Rangkaian <i>workshop</i> meliputi pemaparan materi terkait Manajemen Risiko dan SPIP, Pemahaman Konsep Peluang dalam Manajemen Risiko, dan pendampingan penyusunan peluang/risiko positif oleh narasumber dari Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal, Kementerian PU serta BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mendorong peningkatan budaya sadar risiko serta mendukung terwujudnya Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian PU	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
56	Rapat Informal Tim Pokja JF API terkait Persiapan Rapat Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tanggal : 2 Juli 2025 Lantai 8 Gedung G Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: Dalam menyusun bahan/materi, disusun template untuk dibahas berupa: - Sandingan Tugas JF API berdasarkan PermenPAN RB Nomor 44 tahun 2022 dengan Judul Kamus Kompetensi JF API; - Finalisasi Usulan Penggabungan Judul JF API; Finalisasi Kamus Kompetensi JF API	Tim Pokja JF API menyediakan link online: Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada: Hari/Tanggal : Kamis s.d Jumat / 3-4 Juli 2025; Pukul : 09.00 s.d selesai Media : Ms. Teams Meeting; Link Teams : https://s.pu.go.id/ODMw/KamusJFAPI	Bagian Kepegawaian dan Umum
57	Peliputan acara Seminar Perspektif Hukum dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Tanggal : 3 Juli 2025 Indonesia Convention Center (ICE) BSD, Jakarta 	Hasil Kegiatan : Kementerian PU saat ini sedang melakukan perubahan kerangka regulasi terkait Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi dengan peraturan yang baru terbit, seperti Permen PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 tahun 2024, dan Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2025; Kementerian PU juga sedang mendorong standarisasi dokumen untuk mengoptimalkan pelaksanaan KPBU, seperti standarisasi dokumen pengadaan dan dokumen perjanjian, serta kriteria seleksi proyek untuk menentukan proyek infrastruktur yang paling layak melalui KPBU	Dengan kuatnya tata kelola pelaksanaan KPBU, diharapkan setiap tahapan proyek KPBU dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
58	Rapat Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tanggal: 3-4 Juli 2025 Ruang Rapat Setditjen PI Lantai 7 Gedung G 	Hasil Kegiatan: Pembahasan Standar Kompetensi JF API: - Sandingan Tugas JF API (berdasarkan PermenPAN RB no 44 tahun 2022) dengan Judul Kamus Kompetensi JF API dan kesesuaian Tugas dan Fungsi lingkup DJPI, telah dibahas dan disusun laporan dalam bentuk ND Kabag Kepegawaian & Umum kepada Sesditjen PI; - Finalisasi Usulan Penggabungan Judul JF API telah dibahas dan disusun laporan dalam bentuk ND Kabag Kepegawaian & Umum kepada Sesditjen PI; - Finalisasi Kamus Kompetensi JF API telah dibahas dan disusun laporan dalam bentuk ND Kabag Kepegawaian & Umum kepada Sesditjen PI.	Pembahasan lanjutan Rapat Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, khususnya membahas indikator perilaku, yang direncanakan pada M3 Juli 2024	Bagian Kepegawaian dan Umum

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
59	Peliputan acara Rapat Internalisasi Pembangunan Zona Integritas di lingkungan DJPI Tahun 2025 Tanggal : 4 Juli 2025 Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah III Jakarta, JL. Sapta Taruna Raya Komplek PU Pasar Jum'at No. 26, Pd. Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 	Hasil Kegiatan: - Melalui penandatanganan ini, setiap individu diharapkan dapat menjaga integritas, mencegah serta mengelola potensi benturan kepentingan, dan menjunjung tinggi kepentingan publik dalam setiap pengambilan Keputusan; - Pentingnya Zona Integritas sebagai predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); - Zona Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen kita bersama untuk membangun budaya kerja yang beretika, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima,	Diharapkan kegiatan ini sebagai momentum strategis untuk memperdalam wawasan, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat pemahaman terhadap pelaksanaan Zona Integritas	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
60	Penyusunan dan Reviu atas Laporan Keuangan dan Laporan BMN pada DJPI Semester I TA.2025 Tanggal: 9 - 11 Juli 2025 Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Citeureup, Kabupaten Bogor 	Hasil Kegiatan: - Terdapat 2 Laporan Keuangan dan Laporan BMN yang disusun pada BA 033.16.631003 dan BA 145.08.694437 pada periode Semester I TA 2025; - Terdapat juga 1 Penyusunan Laporan Keuangan pada BA 999.99.987010 Kegiatan Dana Dukungan Kelayakan KPBU Air Minum (VGF) Semester I TA 2025 dengan catatan s.d. periode tersebut belum terdapat realisasi, rencana realisasi akan dilaksanakan pada periode Oktober 2024; - Untuk data yang dijadikan dasar penyusunan Laporan Keuangan, masih terkendala terkait Sistem Aplikasi yang digunakan saat ini	- Akan disampaikan data penyusunan Laporan Keuangan pada Minggu selanjutnya dan dilakukan reviu secara parallel oleh Inspektorat Jenderal; - Proses inventarisasi oleh BMN akan dikoordinasikan dengan Sekjen PU dan Sekjen PKP, serta dalam pelaksanaannya dapat memohonkan pendampingan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PU; - Terkait kewenangan penyusunan LK 999.07.987252 akan menunggu keputusan dari Biro Keuangan, Sekjen PU. Untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Sekjen PKP, DJPI dapat membantu proses penyusunan LK dalam masa transisi tersebut.	Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
61	Dokumentasi dan Peliputan acara Internalisasi Pengendalian Anti Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistleblowing System Tanggal: 9 Juli 2025 Balai Jasa Konstruksi III, Kecamatan Citeureup, Bogor 	Hasil Kegiatan: - Rapat ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Astacita Presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, termasuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi; - Untuk indeks integritas DJPI sendiri mengalami kenaikan sebesar 6,3 poin dari 74,55 di tahun 2023 menjadi 80,85 di tahun 2024.	Diharapkan budaya integritas tidak hanya sekedar slogan saja, tetapi benar-benar menjadi napas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas sehari-hari	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
62	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II dan Strategi Peningkatan IKPA Triwulan III TA.2025 Tanggal : 15 Juli 2025 Ruang Rapat Setditjen PI lantai 7 Gedung G Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: - Kegiatan rapat bertujuan untuk membahas evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan II dan peningkatan nilai IKPA triwulan III tahun 2025 di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; - Pada data ieMonitoring PU Tanggal 30 Juni 2025, terdapat beberapa Paket Kegiatan masing-masing Unit Kerja Eselon II di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan deviasi lebih dari +5% atau -5%. Selanjutnya membahas penyebab serta solusi atas deviasi yang ada dari masing-masing Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (terlampir); - Nilai IKPA DJPI periode Triwulan II (Juni 2025) sebesar 95,03, mengalami peningkatan dari Triwulan I yang sebesar 94,18; - Untuk pengajuan anggaran operasional PPK TA.2026 dapat dibuat sesuai dengan jumlah PPK sesuai SK Menteri yang bisa dimasukkan di dalam operasional pimpinan; - Kegiatan kontraktual Direktorat PPIBM yang direncanakan terkontrak pada akhir Juli 2025 dan selesai pada Desember 2025 sehingga terdapat kemungkinan tagihan termin akhir akan masuk RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran)	- Seluruh unit kerja diharapkan melaksanakan realisasi kegiatan dan keuangan sesuai dengan rencana penarikan dana dan target capaian output yang telah disampaikan; - Hindari pagu minus melalui monitoring berkala mandiri (oleh pelaksana kegiatan); - Memanfaatkan dan meningkatkan penggunaan UP Non Tunai (KKP, Digipay dan Bela Pengadaan); - Unit Kerja Direktorat PPIBM Bersama PPK perlu melakukan monitoring progres Lelang Paket Kegiatan Reviu Studi Kelayakan Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi (Ruas Pekutatan –Soka – Mengwi) dan memastikan kesesuaian penagihan termin dengan RPD yang telah disampaikan; - Unit kerja yang akan melakukan revisi anggaran dan perubahan target output	Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan

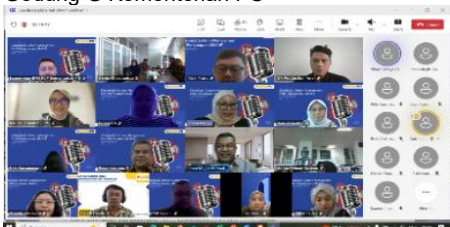
NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
63	Peliputan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI Tanggal: 17 Juli 2025 Sheraton Grand Jakarta City Hotel, Jakarta Selatan 	Hasil Kegiatan: - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DirjenPI) bersama jajaran pimpinan tinggi pratama dan administrator lingkup Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI), hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komis V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) membahas Rencana Kerja Tahun Anggaran (TA) 2026; - Di dalam kesempatan tersebut Dirjen PI, Rachman Arief Dienaputra menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran DJPI TA 2026 sebesar Rp.79.939.703.000,- "Penambahan usulan tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja non-operasional dan belanja modal; - Di sisi lain, wakil anggota Komisi V DPR RI, dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasti Soepredjo Mokoagow menyampaikan kepada jajaran DJPI untuk memperluas jaringan dalam rangka mencari dana tambahan lainnya selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek KPBU. "Dengan anggaran yang sedikit tidak ada yang dapat dikerjakan DJPI.	Pada akhir rapat, ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengingatkan pemerintah untuk menyampaikan nota keuangan pada tanggal 15 Agustus 2025 serta kemungkinan adanya tambahan anggaran atas usulan Kementerian dan Lembaga, ungkap Lasarus	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
64	Sosialisasi Tata Cara Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dan Collaboration Tools bagi CPNS DJPI. Tanggal: 23 Juli 2025 Ruang Rapat Setditjen PI, lantai 7, Gedung G, Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: - Kegiatan ditujukan untuk mensosialisasikan Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dan <i>Collaboration Tools</i> bagi CPNS dalam upaya meningkatkan Transformasi Digital di lingkungan DJPI; - Kegiatan dihadiri oleh narasumber dari Biro Umum dan Pusdatin; - Narasumber selain menayangkan materi sosialisasi, juga langsung memberikan contoh tata cara penggunaan TNDE dan <i>Collaborations Tools</i> kepada para peserta sosialisasi; <i>Collaborations tools</i> memiliki banyak fitur yang dapat dimanfaatkan bagi para CPNS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, seperti: <i>teams</i>, <i>onedrive</i>, <i>sharepoint</i>. Bekerja secara kolaborasi dengan digital diharapkan akan dapat lebih efisien dan efektif.	CPNS diharapkan dapat menggunakan TNDE dan <i>collaboration tools</i> dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	Bagian Kepegawaian dan Umum

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
65	Rapat Penerapan Manajemen Risiko UPR T2 Setditjen Semester I 2025 Tanggal: 24-25 Juli 2025 Ruang Rapat Setditjen PI lantai 7, Gedung G, Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: - Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP); - Pemantauan Level Risiko Aktual; Pemantauan risiko 2021 s.d 2024	- Akan dilakukan koordinasi mengenai perubahan profil risiko UPR T2 Setditjen PI dan akan diajukan verifikasi kepada UKI; - Akan dilakukan penyusunan Laporan Penerapan Manajemen Risiko UPR T2 Setditjen PI Semester I 2025	Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan
66	Technical Meeting Turnamen Tennis Meja PU Tanggal: 6 Agustus 2025 RR. BPAK, lantai 8, Gedung G, Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: Penjelasan tatacara Turnamen Tennis Meja yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2025.	- Turnamen dilakukan dalam waktu 1 hari, dengan sistem gugur; - Peserta turnamen ASN, PPPK, IPPU, Dharma Wanita, dan Non PNS di lingkungan PU.	Bagian Kepegawaian dan Umum.
67	Rapat Koordinasi Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran TA 2025 Tanggal: 7 Agustus 2025 Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 	Hasil Kegiatan: - Siklus APBN mencakup empat fase utama yang berlangsung sebelum tahun anggaran berjalan (T-1) dan berakhir setelah tahun anggaran selesai (T+1), yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan APBN, pencatatan dan pelaporan serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Semua siklus APBN basisnya adalah Dokumen Perencanaan Anggaran (DIPA), dan selanjutnya di detailkan dalam bentuk POK; - Peran pejabat perbendaharaan sangat penting terutama saat berada di siklus pelaksanaan dan pemeriksaan. Saat di siklus pelaksanaan, pejabat perbendaharaan harus punya kontrol pengendalian dimana pelaksanaan anggaran harus berjalan sesuai prinsip efektif dan efisien. Pada siklus pemeriksaan dan pertanggungjawaban, pejabat perbendaharaan harus mempersiapkan seluruh bukti dokumentasi pengendalian yang sudah dilakukan.	- Penguatan kapasitas dan pemahaman pejabat perbendaharaan sesuai UU No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; - Melaksanakan peningkatan tata kelola dan sistem pengendalian internal, mulai dari tahap pelaksanaan komitmen hingga penerbitan SPP/SPBy di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.	Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan.

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
68	Pembahasan Hasil Catatan Hasil Reviu (CHR) RKA-K/L DJPI TA. 2026 Tanggal: 6 Agustus 2025 RR BPAK, Lantai 8, Gedung G, Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: Catatan dari Reviu Itjen kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing Unit Kerja untuk diberikan tanggapan; Tanggapan CHR dari DJPI kemudian disampaikan kepada Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.	DJPI telah mengirimkan tanggapan Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada Inspektorat IV melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum Nomor: PW0105-Ps/497 tanggal 7 Agustus 2025 hal Penyampaian Tanggapan Catatan Hasil Reviu (CHR) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Pagu Anggaran TA. 2026.	Bagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan.
69	Uji Instrumen Penilaian Kompetensi Teknis sesuai Rancangan Standar Kompetensi Teknis Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tanggal: 7-8 Agustus 2025 Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah III Jakarta 	Hasil Kegiatan: - Terdapat revisi yang sifatnya <i>editorial</i> terhadap Rancangan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, sehingga perlu dilakukan finalisasi untuk Uji Keterbacaan selanjutnya; - Simulasi telah dilakukan oleh JF API lingkup DJPI Kementerian PU dan Kementerian PKP, namun dinilai perlu melakukan Simulasi bagi JF API di luar DJPI termasuk JF API Pemerintah Daerah; - Perlu dilakukan identifikasi calon Penilai Teknis untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi JF API, yang nantinya akan mendapatkan pembekalan dari Pusat Pengelolaan Talenta BPSDM.	Pelaksanaan Uji Keterbacaan atas dokumen final Rancangan Standar Kompetensi Teknis Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Simulasi Uji Kompetensi Calon Asesi di luar DJPI termasuk JF API Pemerintah Daerah yang direncanakan pada akhir Agustus 2025.	Bagian Kepegawaian dan Umum.
70	Rapat Penyusunan Timeline Media Sosial Bulan Agustus 2025 Tanggal: 8 Agustus 2025 Ruang Rapat Setditjen PI, lantai 7, Gedung G, Kementerian PU.	Hasil Kegiatan: Membahas <i>Coffee morning</i>, narasi bulan Agustus dan <i>timeline</i> media sosial; Biro Komunikasi sudah tidak membahas lagi agenda setting bulanan, namun Birkom meminta setiap Unit Komunikasi Publik membuat strategi komunikasi bertahap. Diutamakan terkait ASTA CITA dan ICOR PU 608. Strategi komunikasi sekarang diutamakan yang bersifat kolaboratif	Unit Kerja memberikan materi untuk konten media sosial bulan Agustus 2025, Perbanyak pembuatan konten <i>Video Reels</i> .	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
71	Dokumentasi Kegiatan Lomba Tim Bola Voli DJPI Tanggal: 11 Agustus 2025 Lapangan Gateball 2 Kementerian PU. 	Hasil Kegiatan: Kegiatan lomba dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-80 di Lingkungan Kementerian PU.	Hasil dokumentasi kegiatan akan dimasukkan dalam laporan kegiatan Setditjen PI.	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
72	Dokumentasi Kegiatan Turnamen Tenis Meja dalam Rangka HUT RI Ke 80 di Kementerian PU Tanggal: 12 Agustus 2025 Gedung Ditjen SDA Lantai 8. 	Hasil Kegiatan: Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus pencarian bibit atlet untuk mewakili PU di PORNAS XVII KORPRI 2025.	Kementerian PU akan mengambil bibit atlet untuk mewakili PU di PORNAS XVII KORPRI 2025.	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
73	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Penyusunan Naskah Renstra DJPI 2025-2029 dan Masukan Renstra Setditjen PI 2025-2029 Tanggal: 25 Agustus 2025 Ruang Rapat Setditjen PI, Lantai 7 Gedung G Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: • Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan (BPAK) telah menyusun masukan Setditjen PI dimaksud; • BKU diharapkan dapat menyediakan wadah bagi setiap pegawai untuk bertukar informasi terkait KPBU; • Masukan dari Bappenas terkait pencantuman Manajemen Risiko pada Bab II Renstra untuk tingkat Kementerian/ Lembaga sedangkan pada tingkat Unit Organisasi cukup menyalin saja dari Renstra Kementerian; • Bahasa Identifikasi Risiko tingkat Kementerian itu berbeda sehingga tidak sesuai apabila digunakan oleh Unit Organisasi, oleh karena itu pencantuman Manajemen Risiko dalam Renstra Unit Organisasi dan Unit Kerja membutuhkan kesepakatan antara BPIW dan Biro Keuangan	• BKU dan BHKP diharapkan dapat menyampaikan masukan terkait Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Regulasi dalam Kertas Kerja Renstra DJPI 2025-2029 untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktorat PSSPP sebagai koordinator penyusunan Renstra DJPI 2025-2029; • Direktorat PSSPP perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan BPIW terkait pencantuman Manajemen Risiko dalam Renstra DJPI 2025-2029.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
74	Rapat Pembahasan Inventarisasi dan Penentuan Nilai Limit Penghapusan, Penjualan/Lelang Barang Milik Negara Tanggal: 25 Agustus 2025 Ruang Rapat Setditjen PI, Lantai 7 Gedung G Kementerian PU. 	Hasil Kegiatan: - Barang Milik Negara berupa peralatan kantor dengan nilai Perolehan dibawah Rp50.000.000,- sejumlah 893 NUP dengan nilai perolehan sebesar Rp4.948.534.519,-; - Barang Milik Negara berupa peralatan mesin (perangkat server) dengan nilai perolehan diatas Rp50.000.000,- sejumlah 24 NUP dengan nilai perolehan sebesar Rp7.837.331.600,-; - Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Bersama dengan Biro Pengelolaan BMN akan melakukan cek fisik barang yang berada di gudang Cipete sebelum menentukan nilai limit barang yang akan diajukan penghapusan; - Untuk menentukan nilai limit barang yang diajukan penghapusan kepada Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/SEM/2024 tentang petunjuk teknis penjualan BMN pada Kementerian PUPR.	Akan dilakukan pembahasan terkait penentuan nilai limit, pembuatan Berita Acara hasil penelitian dan penafsiran Barang Milik Negara yang akan dilakukan Penghapusan pada minggu pertama bulan September.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
75	Exit Meeting Cost of Fund atas Dana Talangan FLPP Tahun 2019 Tanggal: 27 Agustus 2025 Grand Hotel Mercure Karawang, Jawa Barat 	Hasil Kegiatan: Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Pengawasan BLU, BLUD dan desa BPKP Nomor PE.12.02/S-223/D505/1/2025 tanggal 22 Agustus 2025 hal <i>Exit Meeting Monitoring</i> Tindak Lanjut Hasil Reviu <i>Cost of Fund</i> atas dana Talangan FLPP Tahun 2019.	Disepakati bahwa penyelesaian kelebihan pembayaran <i>Cost of Fund</i> atas dana talangan FLPP Tahun 2019 akan disetorkan ke Negara paling lambat tanggal 4 September 2025.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
76	Rapat Persiapan Sosialisasi Eksternal SMAP Setditjen PI Tanggal: 28 Agustus 2025 Ruang Rapat Bersama Sekretariat Direktorat Jenderal PI Lantai 5 Gedung G Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: - Sosialisasi akan dilaksanakan pada Jumat, 29 Agustus 2025; - Undangan telah disampaikan kepada peserta undangan terlampir; - Seluruh kebutuhan kegiatan telah disiapkan; Perlu dilakukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian dan Umum mengenai koneksi internet yang kurang baik di Lantai 5.	Telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian dan Umum serta pusdatin sehingga telah dilakukan pemasangan sambungan LAN agar koneksi stabil selama rapat daring dilaksanakan.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
77	Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada Pihak Eksternal Tanggal: 29 Agustus 2025 <i>Online Meeting</i> dan Ruang Rapat Bersama Sekretariat Direktorat Jenderal PI Lantai 5 Gedung G Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: Sosialisasi SMAP kepada pihak eksternal mengenai: - Kebijakan anti penyuapan; - Prosedur pelaporan; - Konsekuensi hukum dan administrative Studi kasus kemitraan dan pelanggaran kontraktual	Sosialisasi telah selesai dilaksanakan.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
78	Rapat Pemenuhan Bukti Dukung Penilaian Transformasi Digital Tingkat Unit Kerja Tanggal: 11 September 2025 Ruang Rapat BHKP lantai 5 Gedung G, Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: Pembahasan terkait matriks kriteria penilaian lingkup unit kerja Setditjen PI	Berkoordinasi dengan PIC masing-masing bagian di Setditjen PI untuk pemenuhan bukti dukung.	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
79	Sosialisasi Implementasi PMK 56 Tahun 2025 dalam rangka Persiapan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi DJPI TA 2026 Tanggal: 12 September 2025 Ruang Rapat Direktorat PPICK, Lantai 5 Gedung G Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: • PMK Nomor 56 Tahun 2025 diterbitkan dalam rangka efisiensi anggaran TA. 2025 dan TA 2026; • Dengan adanya pergantian Menteri Keuangan, akan ada perubahan kebijakan penganggaran TA. 2026; • Besaran efisiensi pada masing-masing akun belanja masih menunggu kebijakan dari Menteri Keuangan; • Kegiatan ceremonial diperbolehkan apabila dalam rangka menunjang Tusi dengan tetap memperhatikan keterlibatan peserta; • Belanja Jasa Konsultan dibatasi untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan tetap memperhatikan jumlah orang; • Dalam rangka persiapan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026, perlu dilakukan pengecekan kembali kesesuaian antara KAK dan RAB dengan RKA-K/L; • Penyusunan RKA-K/L TA. 2026 perlu diperkuat guna mengurangi jumlah revisi.	• Diharapkan masing-masing Unit Kerja dapat melakukan identifikasi mandiri terhadap potensi efisiensi pada RKA-K/L Pagu Anggaran TA. 2026 yang telah disusun mengacu kepada PMK Nomor 56 Tahun 2025; • Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan akan menyelenggarakan kegiatan Pra-Review bersama Biro PAKLN dan Itjen dalam rangka persiapan penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA. 2026.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
80	Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Setditjen PI Bulan Juli dan Agustus Tahun 2025 Tanggal: 16 September 2025 Ruang Rapat Setditjen PI Lantai 7, Gedung G Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: • Realisasi Anggaran Setditjen PI periode 31 Agustus 2025 sebesar Rp40.764.511.000,00 (58,4%) dari total pagu Rp69.779.268.000,00 dengan blokir sebesar Rp3.072.268.000,00 (belanja barang); • Realisasi Setditjen PI berdasarkan jenis belanja diantaranya: - Belanja pegawai Rp27.787.039.000,00 (61,61%) dari pagu Rp45.102.177.000,00; - Belanja Barang Rp12.824.154.000,00 (59,86%) dari pagu Rp24.497.091.000,00; - Realisasi Belanja Modal Rp153.318.000,00 (85,18%) dari pagu Rp180.000.000,00; • Pada minggu ke 3 bulan September akan dilakukan audit internal terkait SMAP; • Perlu ada pembahasan terkait alokasi saat pemrograman anggaran RB, ZI dan SMAP di setiap unit kerja di DJPI dengan arahan dan masukan dari Setditjen PI sebagai leader atas kegiatan tersebut; • Pembahasan dan kesepakatan progres kegiatan untuk mendukung ketercapaian output serta isu permasalahan tindak lanjut Bulan Juli dan Agustus 2025 yang disampaikan oleh masing-masing bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (terlampir).	• Pada Triwulan 4 move capaian kinerja akan dilakukan per minggu atau per 2 minggu, untuk memastikan kinerja Setditjen PI dapat tercapai di akhir tahun; • Setiap bagian perlu menyusun rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan terhadap sisa anggaran hingga akhir tahun 2025; • Untuk masing-masing bagian yang masih membutuhkan tambahan anggaran, di sarankan segera membuat surat ke Setditjen PI untuk pengajuannya dilengkapi dengan data dukungnya; • Percepatan pelaksanaan kegiatan yang memiliki realisasi di bawah 50%	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
81	Rapat Pembahasan Konsolidasi Penambahan Data dan Nilai Barang Milik Negara yang akan dihapuskan Tanggal: 18 September 2025 Rapat Bersama BPAK & BHKP, Lantai 5 Gedung G, Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: • Bagian Kepegawaian dan Umum mengajukan data tambahan BMN yang akan dilakukan penghapusan; • Masih terdapat BMN yang diajukan penghapusan yang berada di gedung G Patimura dan belum dipindahkan ke Gudang Cipete berupa Meja rapat, lemari penyimpanan dan <i>Kitchen Set</i>; • Barang Milik Negara yang belum dilakukan pengecekan fisik dan perhitungan di gudang Cipete berupa <i>Filling</i> kabinet kayu dan lemari kayu; • Bagian Kepegawaian dan Umum berkoordinasi dengan Kementerian PKP untuk dilakukan penghentian pengembalian BMN yang sudah tidak digunakan agar dilakukan setelah proses Likuidasi; • Barang Milik Negara untuk pengadaan tahun 2025 agar dilakukan distribusi oleh bagian Kepegawaian dan Umum dan dibuatkan BAST ke masing-masing Pengguna; • Barang Milik Negara yang rencananya akan digunakan oleh Balai SDA untuk dilakukan alih kepengurusan BMN.	• Akan dilakukan pengecekan fisik dan pemindahan BMN yang akan dihapuskan oleh Bagian Kepegawaian dan Umum bersama dengan Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan selama 2 minggu, mulai tanggal 13 s.d. 21 September 2025; • Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan saat ini masih proses mencari Link untuk harga Tafsiran nilai Limit BMN yang akan dilakukan Penghapusan/ Penjualan.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
82	Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tanggal: 18 September 2024 Ruang Rapat Lantai 5 Gedung G Kementerian Pekerjaan Umum 	Hasil Kegiatan: • Menindaklanjuti LHP BPK RI Nomor 30b/LHP/XVII/06/2023 DJPI sudah melaksanakan: DJPI sudah melakukan <i>coaching</i> kepada Tim Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat IV, Kementerian PU; • Penyusunan dokumen; • Sudah terdapat surat kronologi tindak lanjut terkait temuan tersebut dengan menyatakan terkait harga timpang, mengutip surat pada butir 6.g di atas yaitu Surat Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Nomor 0302-Kg/252 tanggal 22 Juni 2023.	• Akan disusun secara bersama surat kronologi kembali yang memfokuskan terhadap keterangan harga yang dinyatakan timpang oleh BPK RI pada temuan tersebut; • Akan dilakukan koordinasi dengan Biro PAKLN, Sekretariat Jenderal terhadap hasil telaah BPK RI tersebut untuk meminta arahan penyelesaian temuan tersebut; • Akan dilakukan koordinasi kepada LKPP atas ketentuan kebijakan pada Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tersebut atas keterkaitannya dengan kontrak <i>lump sum</i> yang dilakukan DJPI pada kegiatan PMC, <i>Loan</i> ESP tersebut.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
83	Rapat Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Statistisi dan Surveyor Pemetaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tanggal: 23 September 2025 	Hasil Kegiatan: Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum bersama dengan seluruh Unit Kerja, telah melakukan penghitungan Kebutuhan JF Pranata Komputer, Statistisi dan Surveyor Pemetaan dengan hasil sebagai berikut: • Hasil Perhitungan Kebutuhan JF Pranata Komputer di lingkungan DJPI, dengan kumulatif perhitungan meliputi: - Jenjang Jabatan Ahli Pertama sebanyak 13 kebutuhan; - Jenjang Jabatan Ahli Muda sebanyak 5 (lima) kebutuhan; - Jenjang Jabatan Ahli Madya sebanyak 1 (satu) kebutuhan; • Hasil Perhitungan Kebutuhan JF Statistisi di lingkungan DJPI, dengan kumulatif perhitungan meliputi Jenjang Jabatan Ahli Pertama sebanyak 2 (dua) kebutuhan; • Hasil Perhitungan Kebutuhan JF Surveyor Pemetaan di lingkungan DJPI, disepakati bahwa Unit Kerja memerlukan penelaahan lanjutan terhadap kebutuhan Jabatan Fungsional tersebut.	Setiap Unit Kerja melakukan revidi terhadap penghitungan kebutuhan formasi JF Pranata Komputer, JF Statistisi serta JF Surveyor Pemetaan. Adapun formulir penghitungan JF tersebut dapat diakses pada link berikut: https://s.pu.go.id/MTM2MA/FormasiJFPrakomStatistisiSurta, Form Penghitungan JF tersebut paling lambat disampaikan oleh Unit Kerja pada tanggal	Bagian Kepegawaian dan Umum
84	Panduan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tanggal: 25 September 2025 Ruang Rapat Bersama BPAK dan BHKP Lantai 5 Gedung G Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: • Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dan dihadiri oleh unit Direktorat PPICK, PPIBM, PPSP dan Seditjen PI serta tim Komunikasi Publik; • Masih banyaknya fasilitas untuk disabilitas yang belum memadai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; • Belum tersedia akses bagi penyandang tunarungu untuk membuka <i>website</i> DJPI PU. Saat ini aplikasi <i>Callback</i> sudah ada, namun masih terbatas untuk pengguna IOS; • Semua video yang sudah di unggah pada sosial media DJPI sudah menggunakan teks untuk mempermudah akses untuk tuna rungu.	Menjadi acuan untuk menpan RB mengenai sudah sampai mana fasilitas terhadap kelompok rentan, lalu survei kepuasan masyarakat dan komponen pendukung lainnya.	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

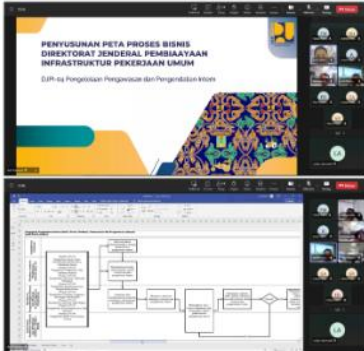
NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
85	Rapat Persiapan Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA. 2026 Tanggal : 1 - 2 Oktober 2025 Ruang Rapat Kawasan Bendungan Sukamahi Kampung Cibogo, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 	Hasil Kegiatan: • Terdapat alokasi uang harian “<i>fullday/halfday</i>” yang sudah tidak ada di SBM TA 2026 dan masih ada paket perjadiin yang “digelondongkan”; komponen perjadiin perlu dirinci; • Efisiensi ditetapkan per K/L per jenis/item belanja (barang, modal, lainnya) dengan prioritas dari Rupiah Murni; bila tak cukup, dapat dari PNB (RMP/BLU), Pinjaman/Hibah, SBSN. Item yang disesuaikan mencakup ATK, seremonial, rapat/seminar, kajian/analisis, diklat, honor/jasa profesi, percetakan/souvenir, sewa, lisensi aplikasi, konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan, perjadiin, peralatan/mesin, infrastruktur, dan lainnya; • Skema efisiensi mandiri DJPI (acuan PMK 56/2025 & S-37/MK.02.2025) - contoh persentase efisiensi: • ATK 90,0%; Seremonial 56,9%; Rapat 45,0%; Kajian 51,5%; Diklat 29,0%; Honor/Jasa Profesi 40,0%; Percetakan/ Souvenir 75,9%; Sewa 73,3%; Lisensi aplikasi 21,6%; Konsultan 45,7%; Bantuan Pemerintah 16,7%; Pemeliharaan 10,2%; Perjalanan Dinas 53,9%; Peralatan & Mesin 28,0%; Infrastruktur 34,3%; Lainnya 59,1%.	Menunggu hasil reviu RKA-K/ L oleh Biro PAKLN dan Itjen.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
86	Rapat Penyusunan Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Tanggal : 2 - 3 Oktober 2025 Ruang Bougenville, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Citereup, Kabupaten Bogor 	Hasil Kegiatan: • Penyampaian konsep peta proses, subproses, dan judul peta lintas fungsi DJPI; • Penyampaian materi teknis penyusunan peta proses bisnis; Penyusunan peta lintas fungsi pengelolaan kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.	• Akan dilakukan penyusunan peta lintas fungsi pada proses pendukung dan lainnya; Akan dilakukan koordinasi dengan Direktorat PSSPP mengenai proses pengesahan pedoman KPBU di kementerian PU.	Bagian Kepegawaian dan Umum

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
87	Penyusunan Konsep Kesepakatan Kerja Auditor Eksternal SMAP Tanggal : 10 Oktober 2025 Ruang Rapat Lantai 5 Gedung G Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: - Berdasarkan pertimbangan kesatkeran, disepakati bahwa pelaksanaan <i>audit surveillance</i> SMAP dapat dilakukan melalui penunjukan langsung kepada PT.MAS; - Untuk menindaklanjuti pelaksanaan <i>audit surveillance</i>, akan dilaksanakan rapat lanjutan antara PT.MAS dan Satker membahas rencana teknis pelaksanaan audit, kelengkapan dokumen pendukung, dan proses penyusunan serta penandatanganan kontrak kerja; - Berdasarkan hasil diskusi dengan Ibu Dewi selaku Direktur PT.MAS telah disepakati bahwa pelaksanaan <i>audit surveillance</i> direncanakan pada tanggal 6 November 2025; - Hingga saat ini, <i>International Accreditation Forum</i> (IAF) belum menetapkan ketentuan resmi terkait masa transisi (<i>transition period</i>), sehingga Komite Akreditasi Nasional (KAN) belum mengeluarkan pedoman skema transisi bagi lembaga sertifikasi; - Sertifikasi SMAP Setditjen PI yang masih mengacu pada ISO 37001:2016 tetap berlaku secara sah.	Kebutuhan Informasi dari PT MAS kepada Setditjen PI: <i>Audit Plan Surveillance</i> Setditjen PI; <i>Time Frame</i> (jadwal pelaksanaan audit); - Balasan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh Setditjen PI; - Ketentuan terkait proses Transfer Audit dari KAN (jika diperlukan); - Ringkasan perbedaan antara ISO 37001:2025 dan ISO 37001:2016.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
88	Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN DJPI Triwulan III TA.2025 Tanggal : 14 - 15 Oktober 2025 Ruang Adenium, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III, Jl. Lio/Kintaka, Sanja, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 	Hasil Kegiatan: - Per tanggal 14 Oktober 2025 masih terdapat <i>to do list</i> pada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; - Terdapat Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-208/PB/2025 tanggal 30 September 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Triwulan III Tahun 2025.	- Akan dilakukan tutup buku Modul persediaan, dan GL Pelaporan paling lambat tanggal 19 Oktober 2025. Terkait dengan modul aset tetap sudah dilakukan tutup buku; - Terkait permasalahan pada modul persediaan yang masih belum selesai akan menunggu proses dari percepatan oleh Biro Keuangan dan Direktorat SITP Kementerian Keuangan; - Akan dilakukan pengisian kertas kerja lampiran laporan keuangan; - Terkait Ralat Akun sudah dilakukan penginputan SP2D Koreksi atas SPM yang sudah disetujui koreksi oleh KPPN JKT V	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
89	Penyusunan <i>Timeline</i> Media Sosial Bulan Oktober Tahun 2025 Tanggal: 15 Oktober 2025 Ruang Rapat Lantai 5 Gedung G, Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: Kegiatan pengambilan gambar telah dijadwalkan sebagai berikut: Kamis, 16 Oktober 2025 Dilaksanakan pengambilan gambar untuk sosialisasi skema KPBU <i>Solicited</i> oleh PSSPP dan Tim KOMPU, dengan melibatkan 4 (empat) talent dari PSSPP; - Kamis, 24 Oktober 2025 Dilaksanakan shooting sosialisasi skema KPBU <i>Unsolicited</i> oleh PSSPP dan Tim KOMPU, dengan melibatkan 3 (tiga) talent dari PSSPP; - Akhir Bulan Oktober 2025. - Dilaksanakan pengambilan Testimoni PPIBM di lapangan, berfokus pada wawancara masyarakat (pengguna jalan, driver, pedagang di rest area). Kegiatan ini menjadi tanggung jawab PPIBM dan Tim Komunikasi Publik; - Dilaksanakan pengambilan Testimoni PPICK dengan Penerima Manfaat SPAM Jatiuluhur. PPICK dan Tim Komunikasi Publik bertugas memastikan konsep wawancara di lapangan telah ditetapkan.	- Rencana Liputan Testimoni Proyek Infrastruktur - SPAM Jati Luhur 1 (Lokasi: Bekasi): - Jalan Tol Serpong–Balaraja (Sereja) Lokasi: Banten; - Jadwal <i>Shooting</i> dan Kesiapan PSSPP Pelaksanaan pengambilan gambar untuk dokumentasi Program/Proyek PSSPP dijadwalkan pada Kamis, 16 Oktober 2025 dan Kamis, 24 Oktober 2024 Dimohon kepada Unit/Tim Teknis terkait untuk mempersiapkan secara menyeluruh baik kesiapan pemeran (talent) dan kelengkapan kostum untuk menjamin kelancaran dan efisiensi waktu pelaksanaan. - Penyusunan Istilah KPBU. - Unit kerja terkait diminta untuk dapat menyampaikan jika ada istilah kunci KPBU kepada Tim Kompu untuk penyusunan materi ilustrasi dan visualisasi yang representatif.	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
90	Focus Group Discussion Penyusunan Peta Lintas Fungsi DJPI-05 Pengelolaan Program, Anggaran, Keuangan dan Kinerja Tanggal : 17 Oktober 2025 Ruang Rapat Lantai 7 Gedung G, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 	Hasil Kegiatan: - Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Nomor: 34/ KPTS/ Dp/ 2025 tentang Tim Perumus Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, serta dalam rangka penguatan tata laksana organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI); - Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/SE/M/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi, Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lainnya untuk Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	- Melakukan penyempurnaan visualisasi gambar Peta Lintas Fungsi DJPI-05 mengenai Pengelolaan Program, Anggaran, Keuangan dan Kinerja; - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, secara paralel, akan melakukan rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dalam penyusunan Peta Lintas Fungsi pada proses pendukung dan proses lainnya; - Hasil Penyusunan Proses Bisnis DJPI dapat diakses pada tautan berikut: https://s.pu.go.id/MTM2MA/PenyusunanProses BisnisDJPI; - Apabila terdapat usulan/ masukan lebih lanjut terhadap penggambaran Proses Bisnis DJPI, dapat disampaikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.	Bagian Kepegawaian dan Umum

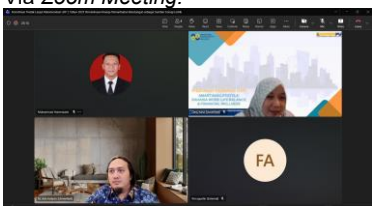
NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
91	Sosialisasi Pemilahan dan Pengelolaan Sampah di Kantor Pusat Kementerian PU Tanggal : 17 Oktober 2025 Via Ms Teams 	Hasil Kegiatan: Tujuan dilaksanakannya kompetensi ini adalah: • Mendorong budaya pemilihan sampah di lingkungan Kementerian PU; • Meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan; • Menjadikan kantor Pattimura sebagai role model pengelolaan sampah di sumber; • Memberikan kontribusi nyata terhadap target nasional pengurangan sampah	Setelah sosialisasi, maka pada tanggal 20-29 Oktober 2025 akan berlangsungnya masa kompetisi, dengan detail pelaksanaannya: Pegawai melakukan pemilahan sampah secara mandiri; • Petugas kebersihan/mitra internal mengumpulkan sampah terpilah dengan frekuensi tertentu ke wadah komunal; • Pengisian logbook harian (jumlah per jenis sampah) serta mengambil dokumentasi penimbangan dan pengumpulan.	Bagian Kepegawaian dan Umum
92	Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Setditjen PI Bulan September 2025 Tanggal : 17 Oktober 2025 Ruang Rapat Direktorat PSSPP Lantai 7, Gedung G Kementerian PU 	Hasil Kegiatan : • Pembahasan Kendala/ Permasalahan masing-masing Bagian/ Tim pada Bulan September 2025; • Pembahasan kekurangan anggaran pada pelaksanaan bulan Oktober s.d. Desember 2025.	Hasil rapat tersebut akan menjadi bahan evaluasi serta menjadi Laporan Bulanan Monev Setditjen PI bulan September yang akan dilaporkan kepada pimpinan.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
93	Koordinasi Tindak Lanjut Area of Improvement (Aol) Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi di DJPI 2025 Tanggal : 24 Oktober 2025, Ruang Rapat Lantai 5, Gedung G, Kementerian PU 	Hasil Kegiatan : • Terdapat delapan Aol yang perlu ditindaklanjuti oleh DJPI dalam rentang waktu Juli 2025 sampai dengan Juni 2026; • Atas delapan Aol tersebut telah disusun rencana tindak lanjut beserta target waktu pelaksanaan yang tercantum pada tabel rencana tindak lanjut; • Diharapkan seluruh penanggungjawab dapat melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut tepat waktu.	Akan disusun ND Sesditjen PI kepada penanggungjawab masing-masing Aol terkait rencana tindak lanjut <i>area of improvement</i> penjaminan kualitas SPIP Terintegrasi DJPI tahun 2025.	Bagian Kepegawaian dan Umum

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
94	Pelaksanaan Audit <i>Surveilans</i> I Setditjen PI Tanggal : 6 November 2025 Ruang Rapat Setditjen PI Lantai 7 Gedung G Kementerian PU. 	Hasil Kegiatan: - Audit <i>Surveilans</i> Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) dilakukan oleh Tim Auditor dari PT MAS; - Audit mencakup ruang lingkup pelayanan teknis dan administrasi di seluruh setditjen dengan cara observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen kepada: - Top Manajemen / FKAP; - Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan; - PPK / Pengadaan Barang dan Jasa / Satker; - Bagian Kepegawaian dan Umum; - Bagian Hukum dan Komunikasi Publik. - Audit diawali dengan Rapat Pembukaan, dilanjutkan pemeriksaan tiap unit sesuai jadwal, dan ditutup dengan Rapat Penutupan serta penyampaian laporan hasil audit dengan hasil 3 observasi dan 5 positif.	Setditjen PI direkomendasikan dapat mempertahankan sertifikat SMAP SNI ISO 37001:2016.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
95	Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai di lingkungan DJPI. Tanggal : 7 November 2025 Gedung Utama Lantai 17 dan Daring <i>Ms. Teams</i>. 	Hasil Kegiatan: - Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional; - Pengangkatan Pertama; - Pengangkatan Perpindahan Jabatan lain; - Penyesuaian dan Penyetaraan; - Promosi; dan - Pengangkatan Kembali. - Konversi Kinerja menjadi PAK; - Kenaikan Pangkat dan Kebutuhan Angka Kredit; - Pengangkatan JF dari kategori Keterampilan menjadi Keahlian; - Kondisi JF di Kementerian PU; - Uji Coba menu proses mutasi jabatan di e-HRM.	Penyampaian angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional serta penyampaian materi penggunaan modul layanan Jafung di e-HRM.	Bagian Kepegawaian dan Umum.
96	Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Bulan Oktober Tahun 2025 Tanggal : 13 November 2025 Ruang Rapat Setditjen Lantai 7, Gedung G Kementerian PU 	Hasil Kegiatan: - Realisasi Anggaran Setditjen PI periode 31 Oktober 2025 sebesar Rp50.323.610.000,00 (67,53%) dari total pagu Rp74.517.793.000,00 dengan blokir sebesar Rp1.902.842.000,00 (belanja barang); - Capaian kinerja Setditjen PI pada Bulan Oktober berdasarkan pada Perjanjian Kinerja adalah 81,05 (lebih tinggi dibandingkan target yaitu 80,16). Sedangkan capaian kinerja berdasarkan Draft Rencana Strategis pada IKK 1 adalah 69,73 dan pada IKK 6 adalah 76,81; - Pembahasan dan kesepakatan progres kegiatan untuk mendukung ketercapaian output serta isu permasalahan tindak lanjut Bulan Oktober 2025 yang disampaikan oleh masing-masing bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	- Seluruh unit bagian perlu untuk segera menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran detail perminggu hingga Desember 2025; - Perencanaan untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan kinerja) tahun 2027 sebaiknya sudah ada sebelum Februari 2026 untuk digunakan pada penyiapan pagu anggaran 2026; - Disiplin dalam pengajuan pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran tidak melewati batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun 2025.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
97	Focus Group Discussion Penyusunan Peta Lintas Fungsi DJPI-04 Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Intern Tanggal : 25 November 2025 Via Ms. Teams. 	Hasil Kegiatan: - Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Nomor: 34/ KPTS/ Dp/ 2025 tentang Tim Perumus Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, serta dalam rangka penguatan tata laksana organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI); - Telah disusun dan dilakukan pembahasan bersama dengan Tim Perumus terkait Proses Bisnis Pendukung pada Peta Lintas Fungsi (PLF) DJPI-04 Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Intern dengan judul PLF yang telah tersusun (gambar terlampir) sebagai berikut: - Pengajuan Pengawasan Intern/ Pemeriksaan Ekstern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya) (DJPI-04.01.CFM.01); - Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan/ Pengawasan (DJPI-04.01.CFM.02); - Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi (DJPI-04.02.CFM.01); d. Pengelolaan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (DJPI-04.02.CFM.02); dan - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (DJPI-04.02.CFM.04).	- Melanjutkan pembahasan peta lintas fungsi DJPI-04.02.CFM.03 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan DJPI-04.02.CFM.05 Pengelolaan Manajemen Risiko bersama pemangku fungsi terkait; - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, secara paralel, akan melakukan rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dalam penyusunan peta lintas fungsi pada proses bisnis pendukung dan lainnya; - Hasil penyusunan Proses Bisnis DJPI dapat diakses pada tautan berikut: https://s.pu.go.id/MTM2MA/PenyusunanProsesBisnisDJPI	Bagian Kepegawaian dan Umum
98	Rapat Pembahasan Kebutuhan Data Penyusunan Laporan Kinerja dan Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Bulan November Tahun 2025 Tanggal : 2 Desember 2025 Ruang Rapat Bersama BPAK dan BHKP lantai 5, Gedung G Kementerian PU 	- Diharapkan penyusunan Laporan Kinerja menggunakan data yang seragam; - Penyusunan Lakin sesuai dengan Permen PUPR No. 09 Tahun 2018 adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian PUPR; - Laporan Kinerja Setditjen PI harus selesai pada minggu ke-2 Januari 2026; - Lakin DJPI harus selesai pada Minggu ke-3 Januari 2026; - Februari 2026 Draft Lakin Kementerian PU lalu di reviu Itjen dan jadi Dokumen Laporan Kinerja diberikan ke Menpan RB, Bappenas, Kementerian Keuangan; - Pedoman penyusunan LAKIN sudah ada yang terbaru sudah terdapat dalam TNDE.	- Seluruh unit bagian diharapkan dapat bekerjasama dalam pemenuhan data untuk penyusunan Laporan Kinerja; - Perlu diperhatikan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran dan perhitungan capaian kinerja mengingat BPK mulai melakukan audit kinerja; - Bagian Kepegawaian dan Umum perlu untuk menyampaikan dan memastikan data pegawai yang sudah sinkron dengan data E-HRM dan BKO.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan.

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
99	Rapat Tindak Lanjut CHR Pasca Terbitnya DIPA TA 2026 Tanggal: 4 Desember 2025 Ruang Rapat Amarilis, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Citeureup 	- Tindak lanjut dari CHR adalah wujud komitmen dalam memperbaiki perencanaan anggaran; - Hampir seluruh Unit Kerja terdapat ketidaksesuaian dalam CHR; - Terkait catatan dalam poin a, Setditjen akan melakukan revisi DIPA untuk memperbaiki ketidaksesuaian antara Renja dan RKAKL; - Masing-masing Unit Kerja diharapkan dapat menindaklanjuti catatan CHR pada poin b; - Terkait tindak lanjut catatan poin b, Unit Kerja dapat melakukan perbaikan RAB atau menjelaskan urgensi kebutuhan belanja tersebut; - Catatan pada poin c akan ditindak lanjuti dengan melakukan perubahan besaran volume keluaran; - Catatan pada poin d, e dan f akan ditindak lanjuti dengan melakukan revisi terhadap dokumen RKBMN yang direncanakan akan dilakukan pada bulan Januari – Februari 2026.	Masing-Masing Uni Kerja Menindaklanjuti Berita Acara Hasil Perbaikan Tindak Lanjut CHR Pasca Terbitnya DIPA TA 2026 yang menjadi Catatan Itjen pada saat Penelitian dan Reviu Pagu Alokasi TA 2026, BA tersebut ditandatangani oleh Masing-masing Direktur Unit Kerja dan Sesditjen.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan.
100	Pelatihan Manajemen Risiko Tanggal: 8 s.d. 11 Desember 2025 Ruang Teratai Lantai 4, Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah III Jakarta 	- Tingkat Serapan Materi Tingkat serapan peserta terhadap materi manajemen risiko selama 4 hari pelatihan sebesar 73% melalui Post Test; - Penilaian Pengajar terhadap Peserta Penilaian pengajar dilakukan untuk melihat tingkat partisipasi, pemahaman, dan keterlibatan peserta selama sesi pembelajaran. Hasil rata-rata penilaian per materi adalah sebagai berikut: - Core Values: 82,37; - Budaya Anti Korupsi: 80; - Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko: 85; - Konsep Manajemen Risiko: 85; - Proses Manajemen Risiko: 82,37; - Budaya Sadar Risiko: 86,5	Interaksi peserta dan pengajar berlangsung cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai penilaian pengajar yang cukup baik pada seluruh materi; Penerapan ruang kelas <i>round table</i> terbukti efektif meskipun jumlah peserta yang besar. Dengan kolaborasi antar pengajar, model pembelajaran ini mampu menjaga dinamika kelas yang ramai namun tetap terstruktur, memfasilitasi komunikasi dua arah, serta meningkatkan kualitas diskusi teknis.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan.

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
101	Sosialisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja serta Pelaporan Pajak Berbasis Coretax bagi PPPK Tanggal: 11 Desember 2025 Ruang Pendopo Gedung Cipta Karya Kementerian PU 	Dalam rangka meningkatkan pemahaman PPPK di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mengenai penggajian dan tunjangan kinerja, serta menyampaikan perkembangan regulasi terbaru yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan.	Diharapkan para PPPK dapat memahami mengenai penggajian dan tunjangan kinerja, serta menyampaikan perkembangan regulasi terbaru yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
102	Pembahasan Perhitungan Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029 Tanggal: 11 Desember 2025 Ruang Rapat Setditjen PI lantai 7, Gedung G, Sekretariat Kementerian PU 	• Tujuan rapat untuk sosialisasi perhitungan capaian kinerja Setditjen PI berdasarkan draft Rencana Strategis 2025-2029, perhitungan capaian kinerja Dukungan Manajemen DJPI dan pembahasan isu strategis, permasalahan dan tindak lanjut tahun 2025; • Perhitungan capaian kinerja Setditjen PI pada Laporan Kinerja berdasarkan pada draft Rencana Strategis 2025-2029. Capaian kinerja dapat dihitung melalui 2 IKK; • Perhitungan capaian kinerja Dukungan Manajemen DJPI melalui IKP. Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (DJPI) dengan 10 komposit. Capaian kinerja DJPI dikoordinasikan oleh Direktorat PSSPP; • Sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa isu strategis baik itu berdampak negatif maupun positif.	• Setditjen PI berkomitmen untuk mendukung capaian kinerja DJPI dengan memberikan data dukung yang dibutuhkan; • Pembahasan capaian kinerja Setditjen PI tahun 2025 akan dibahas lebih detail pada pembahasan berikutnya.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan.

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL RAPAT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
103	FGD Penyusunan Peta Lintas Fungsi DJPI-03 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Tanggal: 12 Desember 2025 Ruang Rapat Setditjen PI lantai 7, Gedung G, Sekretariat Kementerian PU. 	Telah tersusun Peta Lintas Fungsi DJPI-03 meliputi: - DJPI-03.01.CFM.01 Pengelolaan Data Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; - DJPI-03.01.CFM.02 Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; - DJPI-03.01.CFM.03 Pengelolaan Website DJPI; - DJPI-03.02.CFM.01 Layanan Informasi Publik; - DJPI-03.02.CFM.02 Layanan Pengaduan Masyarakat; - DJPI-03.02.CFM.03 Layanan Publikasi.	- Melanjutkan FGD dengan unit kerja terkait untuk penggambaran peta lintas fungsi dalam peta proses bisnis DJPI (DJPI-06 Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), DJPI-07 Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Laksana, dan DJPI-08 Pengelolaan BMN dan Layanan Umum); - Melakukan penyempurnaan penggambaran peta lintas fungsi sesuai masukan/ tanggapan hasil FGD dengan unit kerja terkait dan Tim Pendamping dari Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.	Bagian Kepegawaian dan Umum.
104	Koodinasi penyelesaian TLHP Kinerja Bendungan Tanggal: 22 Desember 2025 Via <i>Zoom Meeting</i>. 	- Untuk Dokumen terkait SK Tim sudah terdapat beberapa progres dari PU namun belum terdapat tanggapan dari Kemen ESDM; - Terkait dengan aplikasi SINBAD akan ditanyakan mekanisme peraturan dan Penetapan Aplikasi tersebut; - Terkait dengan evaluasi kebijakan OP dan BJPSDA akan diusulkan agenda pertemuan di tahun 2026 untuk membahas kendala dan tindak lanjut masing-masing pihak.	Akan dilakukan koordinasi dengan Direktorat Teknis di Ditjen SDA atas progres tindak lanjut temuan yang beririsan dengan DJPI.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
105	Penetapan Ruang Lingkup, Struktur dan Proses serta Kriteria Manajemen Risiko UPR T-1 Tahun 2026 Tanggal: 24 Desember 2025 Ruang Rapat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum lantai 8 Gedung G, Kementerian PU 	- Pembahasan difokuskan pada keterkaitan antara sasaran program "Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya" serta "Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal dan berkualitas" dengan potensi risiko yang dihadapi DJPI. - Pernyataan Risiko yang akan diangkat menjadi usulan Risiko UPR T-1: - Tidak tercapainya target proyek KPBU; - Terjadinya gagal Lelang pada proyek KPBU Sub Sektor Ketenagalistrikan; - Kegagalan pengamanan fisik BMN dalam proses perlihan status penggunaan selama masa transisi ; - Gagalnya penerbitan surat persetujuan prakarsa tepat waktu - Potensi gugatan pidana terhadap pemerintah; - Ketidaktersediaan atau kerusakan data pada Dashboard SIMPUL KPBU akibat serangan siber (peretasan/ <i>malware</i>).	Akan dilakukan finalisasi dan pengesahan UPR T-1 2026.	Bagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan



Kementerian Pekerjaan Umum
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

2025